CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Februari 2021

BUNGA RAMPAI 2020

POLITIK KEBANGSAAN EDUKASI BERSAMA HADAPI COVID-19

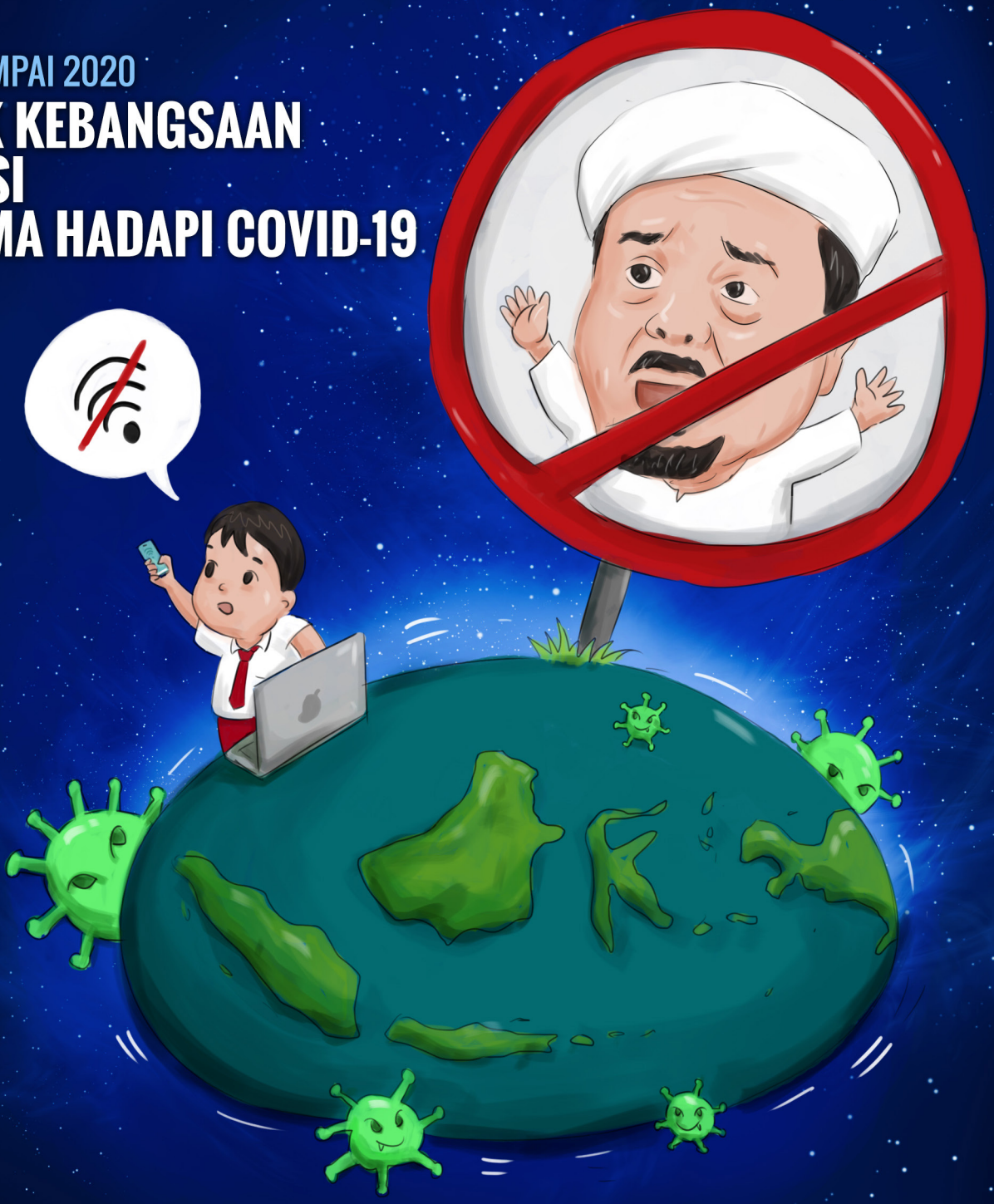

9 772746 105042

KUMPULAN OPINI, KOLOM, PERSPEKTIF CARAPANDANG 2020

DAFTAR ISI

POLITIK KEBANGSAAN

Final Drama FPI vs Penguasa 4
Pembubaran FPI dan Ruang Berdialektika 6
Ungkap Fakta, Buka CCTV Tol Jakarta Cikampek 7
Haruskah Mahasiswa Berpolitik? 8
Bisakah Omnibus Law UU Ciptaker Dibatalkan? 10
Sudah Sejauh Manakah Kita Mengenal Kartini ? 13
Spirit RA Kartini di Tengah Pandemi Covid-19 14
Tugas Tak Mudah dan Pilar Keempat Demokrasi 16
Jalan Panjang Anies Baswedan 18
Mana Nasi Goreng Favoritmu? 20
Demokrasi dan Reformasi Akankah Sejalan? 21

EDUKASI

Problematika Bangsa Dalam Perspektif Pendidikan 22
Tantangan dan Peluang Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 24
Pembelajaran Daring di Masa Pandemi 26
Tantangan dan Peluang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 28
Kurikulum Darurat dan Kuota Internet Saat PJJ 30
Protokol Kesehatan dan Pendidikan 32
Solusi Pembelajaran PAUD Saat Pandemi 34
Anak, Pandemi dan Kreativitas Sekolah 36
Memburu Sekolah Bermutu 38
Menjaga Ketahanan Dalam Normal Baru 40
PPDB, Sekolah dan Ujian Pedagogi Humanis 42
PPDB dan Pencegahan Covid-19 44
Merdeka Belajar Dengan Mencintai Buku 46
Peduli Kita Terhadap Penyandang Disabilitas 47
Problematika Pendidikan Tinggi di Tengah Pandemi Covid-19 (Refleksi Hari Pendidikan) 48
Dana BOS dan Covid-19 50
Program 'Belajar dari Rumah' Menjangkau Siswa Lebih Luas 53
Bekerja Dari Rumah dan Belajar Dari Rumah 54
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa di Tengah Pandemi 55
Setiap Rumah Menjadi Sekolah? 57
Membangun Bangsa Berpendidikan 58
Mitigasi Covid-19: Pentingnya Kebijakan Pendidikan 60
Kampus Merdeka dan Inovasi Perguruan Tingi 62
Menatap Masa Depan Anak-anak Indonesia 64
Mengemas Kebijakan Merdeka Belajar Ala Mas Menteri Nadiem 67

BERSAMA HADAPI COVID-19

Mengurai Disinformasi Covid-19 di Sintang Jelang Pilkada 68
Investasi Saat Resesi 72
Haji Corona 74
Bert empur Dengan COV ID-19, Cara Bekerja Dengan Kelaziman Baru 75
Sudahkah Kita Belajar Dari Covid-19? 79
Melawan Corona Melalui Pesantren Moral 80
Dari Data Menuju Kebijakan Publik Yang Tepat Sasaran 82
Kemampuan Beradaptasi Adalah Kunci 83
Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah Pandemi 84
Stafsus Milenial dan Alarm Dana Penangulangan Covid-19 85
Memperkuat Fungsi Keluarga di Tengah Ancaman Corona 86
Kerja Dari Rumah dan Unit Ekonomi Indonesia 88
Tugas Cendekiawan Muslim Meminimalisir Penyebaran Covid-19 89
Gaji Dipotong Karena Covid-19, Bagaimana Hukum di Indonesia Serta Dampaknya? 91
Corona dan Munculnya Problematika Fiqh 93
Dampak Corona Terhadap Kemiskinan dan Cara Dompet Dhuafa Mengatasin ya 95
Cara Pandang Lainya Terhadap Covid-19 98

CARA PANDANG Inspirasi Terkini

Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar
Pemimpin Perusahaan : Zulfikar Rachman **Penanggung Jawab**: Yayan Sopyani, Michael Malik **Pemimpin Redaksi** : Nafik Muthohirin **Redaktur Pelaksana** : Amir Fiqi, Zainal Arifin **Redaktur** : Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan **Desain Grafis** : Hengki, Dwi Saputra, Soki Rahman Wardi, Taqi khana **IT** : Zulfikar Iskandar **Fotografer** : Robby Firmansyah, Jirga **Reporter** : Ika, Amir, Edi, Afi, Marshal, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi **Sirkulasi**: Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi
Jalan Tebet Dalam IV Nomor 7B, RT 11/RW 01, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12081 Telp: (021) 21383521

Majalah Cara Pandang **menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi**

FINAL DRAMA FPI VS PENGUASA

Dzikru Izzudin*

SOSOK Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan organsasi yang dipimpinya FPI selalu panas untuk di perbincangkan, seolah-olah semua lensa menuju padanya. Namun sejak 30 Desember 2020 terpaksa dibubarkan, pertanyaannya dibubarkan bukan melalui pengadilan tetapi melalui pemerintah atas dasar pengaturan pemerintah UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan.

Menurut Pasal 59 UU Ormas, saksi hukum itu berlaku pada sebuah Ormas bila ormas itu membuat kerusuhan, melanggar ketertiban, mengangguketentraman merusak fasilitas umum dan merusak sosial, maka penegak hak penegak hukum boleh dibubarkan. Memang fakta FPI pernah melakukan pembubaran diskotik diskotik, perjudian itu jelas kemungkaran. "*Masalahnya selama ini hukum tidak ditegakkan secara konsisten saja, jadi bahan bermain politik*" ujar Bivitri susanti pakar hukum negara.

Sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan organisasi FPI dan segala aktivitas yang berhubungan FPI mula dari spanduk, poster logo dan lain lain. Keputusan ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pembubaran FPI sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sebelum organisasi FPI dibubarkan ada permainan "licik" politik yang bisa kita reka demi menumbangkan Habib Rizieq, organisasi dan pendukung nya yang sejalan, walaupun harus menghalal segala cara. Mulai dari kedatangan Habib Rizieq sebagian pada ribut, ketika beliau menjauh untuk menhindari pepercahan mereka bilang sang Habib pengecut ketika beliau mendekat dan merapat mereka bilang sumber perpecahan.

Setelah 3.5 tahun di Mekkah beliau pun kembali ke Indonesia dengan disambut oleh ribuan manusia yang merindukan kehadirannya. Kedatangan Habib menciptakan lautan manusia di sejumlah tempat, atas dasar ini HRS terkena sanksi melanggar protokol dan dikenai denda 50 juta dan sangksi pidana.

Pakar hukum tata negara, Rafly Harun langsung merespon kabar tersebut. Pejabat yang lalai terhadap kerumunan juga harus dipidana. "*kalau di ilmu hukum itu ada yang namanya sense of justice atau rasa keadilan, kalau kita terapkan pada kasus Habib Riziq ini ada yang namanya kejahatan dan pelanggaran*" ujarnya.

Hukum pidana di Indonesia hanya menanggani kasus berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain lain. Nyata nya HRS dijebloskan penjara, ancaman 6 tahun penjara. Sedangakan kerumunan Pilkada terkesan dibiarkan.

Sebelum HRS masuk sel penjara beliau rela ditahan pihak kepolisian dalam kasus apapun termasuk kasus kerumunan, namun syaratnya satu "*Asalkan keadilan dan tegakkan dengan proses tangkap dan hukum pembunuh kasus enam laskar FPI yang dibunuh secara keji*" ujar Aziz (25/12/2020). Artinya HRS lapang dada dan patuh terhadap hukum negara walaupun harus bayar denda dan masuk Bui. Minta beliau tegakkan keadilan kupas tuntas atas pembunuhan 6 laskar.

Hingga mendapatkan respon komentar pedas dari berbagai tokoh karena sikap polisi telah menghabisi 6 nyawa melayang dil uar kebijakan hukum, hal ini sangat tidak dibenarkan. Prof Din Syamsudin menggakatan "*Perisitiwa penembakan terhadap laskar Front Pembela islam (FPI) merupakan suatu kezaliman yang besar dan nyata*". Serta Mantan (MK) Hamdan Zoelva berkomentar; "*Atas Nama Hukum, Nyawa manusia dihabisi dengan mudah, yang beda di tangkap*".

Dosen kepolisian juga angkat bicara soal pembunuhan ini,"*Polisi itu dilatih untuk menembak kaki bukan kepala atau jantung, agar penjahat bisa dibawah ke pengadilan bukan ke kuburan. Kalau tentara baru nembak kepala dan jantung*" ujar Dr.Mulyadi Masalah beda argument siapakah sejatinya yang bersalah pihak Polisi atau FPI. Kedua-duanya memiliki data dan bukti masing masing. penulis tidak memihak sebelah dari keduanya, cukuplah tuhan yang tidak pernah tidur yang lebih tau akan kasus ini, entah itu direkayasa atau di manupulasi hingga tertutupi kebohongannya.

Kesimpulannya pemerintah habis tenaga untuk mengurusi Habib Rizieq dan FPI di tenggah keterpurukan negeri ini yang dimana Indonesia sudah *danger* (Darurat) akan wabah Covid-19 yang tak kunjung pulih seperti sedia kala, ekonominya merosot dan pendidikan juga belum ada harapan seperti kembali semula. Semoga pemerintah cepat sadar akan kondisi ini, dan tidak hanya fokus menahan ruang gerak Habib Rizieq yang bukan siapa siapa, pejabat juga tidak, perusak NKRI juga tidak.

Saran penulis, perlunya kita duduk bersama saling merangkul membangun negeri. Soal kebencian terhadap Habib Rizieq Shihab segera sudahi, sebagaimana yang pernah disampaikan Babe Haikal Hassan Sekjen HRS sudah lama pesan sejak 2017 ia sampaikan kepada Presiden Jokowi, HRS ingin mengajak dialog namun selalu ada hambatan. Kita negara demokrasi sangat menghargai pendapat, mari kita bermusyarah hingga mufakat. [**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

PEMBUBARAN FPI DAN RUANG BERDIALEKTIKA

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga salah satu poinnya yakni Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.

Menilik hal tersebut menurut hemat saya ibarat rentetan yang terus menohok bagi FPI. Semenjak kembalinya Habib Rizieq Shihab, pemimpin FPI, “desakan” terhadap FPI begitu kuat. Rangkaian kasus pun terjadi dimana terjadi dinamika antara pemerintah dan FPI.

Reaksi warga pun (seperti biasa) terbelah dengan pembubaran FPI. Hal ini semakin mengukuhkan masih masifnya polarisasi dan masih jauhnya kata rekonsiliasi. Secara peta politik, memang di kubu pemerintahan telah berkumpul partai-partai politik yang tadinya mendukung capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. Bahkan Prabowo-Sandiaga kini telah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Akan tetapi di tingkat masyarakat, pembelahan, polarisasi masih begitu lekat. Masing-masing pihak kerap masih asyik berada di echo chamber, berada di gua yang menggaungkan suara dukungannya, sembari dengan sinis melihat pihak yang berseberangan.

Pembubaran FPI menjadi amunisi baru yang bisa terus berlarut akan fenomena pembelahan tersebut.

Akankah ruang berdialektika masih tersisa? Hal tersebut yang layak diapungkan. Beda pendapat, beda pemikiran, sesungguhnya hal yang lumrah dan seharusnya disikapi dengan santai. Hal tersebut merupakan salah satu parameter dari sehat tidaknya demokrasi di suatu negara atau entitas.

Maka menjelang 2021, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, demokrasi pun menjadi deretan yang masih tanda tanya. Sinyal akan diaktifkannya polisi siber di 2021, menjadi tanda-tanda yang semakin benderang, jangan-jangan ruang berdialektika akan semakin susut.

UNGKAP FAKTA, BUKA CCTV TOL JAKARTA CIKAMPEK

Mahmuddin Muslim*

PERISTIWA tertembaknya 6 orang Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh kepolisian Indonesia, mengundang polemik. Wajar saja, FPI dalam konferensi pers nya menyatakan, para pengawal Muhammad Rizieq Shihab itu tidak pernah dipersenjatai, selalu pakai tangan kosong, kata Munarman kepada wartawan. Bahkan pada pagi hari sebelumnya, Munarman menyatakan bahwa 6 orang Laskar FPI diculik oleh preman OTK.

Sementara pihak kepolisian kepada media massa memapar peristiwa penembakan tersebut dilakukan karena jiwa petugas Polri terancam, karena 10 orang tersebut (4 orang melarikan diri) menyerang petugas dengan senjata api (3 kali tembakan) dan senjata tajam. Bukti foto mobil kepolisian ditembus oleh peluru pun dipublis beserta 2 senjata api, samurai dan senjata tajam lainnya.

Peristiwa ini tentu saja mendapatkan atensi dari pelbagai pihak, baik yang "menuduh" Polri unprofesional maupun yang mendukung tindakan tegas polri tersebut. Bahkan dari gedung DPR pun beragam pendapat disampaikan oleh politisi Senayan.

Banyak pihak berharap agar Presiden Jokowi segera membentuk tim investigasi yang bekerja secara independen agar publik mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta kejadiannya.

Sebelum anasir-anasir semakin meluas dan membuat kebingungan di masyarakat, sebaiknya pihak Polri segera memeriksa 4 orang Laskar yang melarikan diri. Mereka yang berada di tempat kejadian perkara selain petugas kepolisian. Pun jika FPI berniat untuk mencari kebenaran kejadian ini, maka 4 laskar mereka yang melarikan diri bisa membuat testimoni secara terbuka ke publik kronologis kejadian tanpa mengurangi, menutupi apalagi menambahi.

Paling elagan, FPI bisa membawa mereka ke Polri guna memberikan keterangan agar semakin jelas peristiwa ini. FPI yang selalu bicara taat pada aturan hukum dan selalu bekerjasama dengan aparat penegakkan hukum, saat ini, menurut saya FPI bisa menunjukkan sikapnya dengan bekerjasama dengan Polri untuk mengungkap fakta kejadian di tol Jakarta Cikampek ini. Jika ini bisa dilakukan tentu akan memudahkan bagi kita semua, terutama masyarakat untuk menilai peristiwanya sesuai dengan fakta yang ada.

Fakta-fakta yang sudah dipublis ke masyarakat baik dari Polri maupun FPI, sebenarnya akan mudah dikonfirmasi validasinya, dengan membuka semua rekaman CCTV jalan tol.

Merujuk pada keterangan Polri, tim penyelidik Polri, mengikuti rombangan FPI dari salah satu perumahan di Sentul, Kabupaten Bogor, mestinya sepanjang jalan tol tersebut ada rekaman CCTV, termasuk di jalan tol Jakarta Cikampek, dimana terjadi peristiwa yang menewaskan 6 orang Laskar FPI tersebut. Cctv bisa membantu mengkonfirmasi semua peristiwa. Misalnya rekaman yang diduga percakapan para pengawal Rizieq Shihab yang tersebar luas di masyarakat, rekaman CCTV tentu akan bisa mengkonfirmasi melalui visual kejadian saling tutup, Pepet memepet, menahan laju kendaraan dll yang ada dalam rekaman percakapan tersebut.

Selain itu tentu saja, visual di CCTV juga akan terlihat, peristiwa tembak menembak di KM 50 Tol Jakarta Cikampek tersebut.

Saat ini, anasir-anasir bertebaran yang akan menguras energi kita di tengah belum jelasnya kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Ada baiknya, Polri dan FPI saling bekerjasama agar terungkap fakta sesungguhnya dari pada saling sangah dan perang opini. Jika faktanya sesuai dengan apa yang di sampaikan Polri, makanya FPI mesti mengikuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pun bisa menjadi bahan evaluasi dan koreksi diri bagi FPI dalam memperbaiki organisasi maupun sikapnya di masa yang akan datang.

Demikian pula jika ditemukan fakta, ada kesalahan polri dalam peristiwa ini, maka Kepolisian juga melakukan tindakan hukum yang tegas pada personilnya dan memperbaiki sistem operasi penyelidikan dan sikap anggotanya. Wallahualam [**]

*) PP Baitul Muslimin Indonesia

HARUSKAH MAHASISWA BERPOLITIK?

Lutfi Muktar*

MENJADI seorang mahasiswa tentu merupakan pilihan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan sejenisnya. Mahasiswa adalah agent of change atau sebagai gerakan perubahan, tentu banyak hal yang menuntutnya senantiasa harus terus belajar menjadi seseorang yang terdidik. Antara lain dia tidak boleh buta akan dunia politik. Kebutaan mahasiswa terhadap politik akan membuat negara tidak tertata dengan baik. Sebab suara mahasiswa selama ini menjadi suara yang ditunggu masyarakat untuk tersampaikan aspirasinya kepada pemangku kekuasaan.

Pendidikan politik tentu tidak semua instansi mempelajarinya. Melainkan mahasiswa harus aktif sendiri mencari dan menggali apakah politik itu? Apa ruang lingkupnya? Dan apa dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang memaknai politik sebagai kegiatan yang jelek, penggelapan uang. Bahkan tidak sedikit yang memiliki argumentasi jika masuk dalam dunia politik maka bersiaplah bertempat di neraka.

Apakah sejahat itu makna dari politik? Indonesia sebagai negara demokrasi tentu memberikan kebebasan berpikir kepada rakyatnya. Namun tentu tidak boleh segala pikiran dapat dituangkan dan digembor-gemborkan dalam kehidupan. Karena segala argumentasi yang dibangun senantiasa akan dimintakan pertanggung jawaban. Jangan-jangan argumentasinya mengandung pelecehan. Maka dari sinilah sedikit kita dapat memahami bagaimana semestinya kita menyampaikan pendapat. Jangan sampai argumentasi kita malah menjerumuskan kita pada kehinaan.

Memang melihat dari kondisi kita saat ini, Kondisi negeri saat ini, sangat miris dan membuat kita menggigit jari. Dengan kebijakan-kebijakan yang diselewengkan oleh pemangku kekuasaan senantiasa mengurangi kesakralan makna politik itu sendiri. Padahal bukan seperti itu keabsahan politik yang sesungguhnya. Hanya saja penyalahgunaan itulah yang membuat kita seakan tidak peduli pada politik sehingga muncul kemalasan dan argumentasi-argumentasi tidak enak di telinga tentang apa politik itu.

Pada dasarnya belajar politik sama dengan belajar kesenian, belajar seni juga belajar keindahan. Artinya belajar politik itu belajar tentang keindahan tatanan sosial yang berkemajuan. Bagaimana tidak? Dalam politik itu lengkap ada politik hukum ada etika politik juga ada ilmu politik. Tentu jika hal ini dapat diselaraskan maka akan tercipta nada yang indah. Sehingga keindahan itu dapat kita rasakan.

Memang bukan hal mudah untuk menerapkan politik yang indah. Sebab kebanyakan kita ketahui para pelaku politik (politisi) memiliki kepentingan yang tidak selaras dengan etika dan hukum politik. Sehingga penyelewengan seperti menghalalkan segala cara dapat dilakukan oleh para politisi untuk memenuhi apa yang menjadi kepentingannya sekalipun hal itu melanggar etika dan hukum politik itu sendiri.

Siapakah yang patut disalahkan jika hal itu betul-betul dilakukan oleh para politisi? Apakah politisi tersebut tidak paham akan etika dan hukum politik? Jelas mereka paham, namun kepentingan kekuasaan yang menggebu-gebulah sehingga mereka acuh dan lupa akan etika dan hukum politik. Sehingga seakan apa yang dikerjakan benar asal segala kepentingannya bisa terpenuhi.

Menyikapi hal tersebut siapakah yang mampu meluruskan. Tentu kekuatan terbesar yang dapat diharapkan oleh masyarakat adalah mahasiswa. Masyarakat sangat berharap aspirasinya bisa tersampaikan kepada pemangku kekuasaan, bagaimana ketidakadilan mereka rasakan, kenaikan harga-harga bahan pokok. Sehingga masyarakat dalam hal ini berharap mahasiswa sebagai orang yang terdidik mampu menyampaikan aspirasi tersebut. Sedangkan mahasiswa sendiri tidak akan mampu menyampaikan amanah masyarakat atau rakyat jika mahasiswa buta akan politik.

Maka dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi mahasiswa paham bagaimana politik itu sebenarnya. Sehingga eksistensi mahasiswa juga tetap kokoh sebab mengemban julukan agent of change tidak akan mampu direalisasikan jika mahasiswa buta dan tidak paham apa politik dan bagaimana kondisi politik saat ini. Sehingga akan sangat memalukan jika ada mahasiswa yang merasa acuh dan tidak ingin tahu pada ilmu politik.

Belajar politik tidak harus dari instansi politik. Sudah keharusan bagi semua kalangan paham akan hal itu apalagi mahasiswa. Bagaimana bisa kita mampu mengubah sistem pemerintahan yang dianggap sudah tidak baik lagi jika kita tidak mau belajar dan mengkaji kesalahan itu datang dari mana. Semua akan terjawab jika kita paham akan ilmu dan strategi politik, karena para pemangku kekuasaan merupakan orang-orang yang didelegasikan dan diutus oleh politisi-politisi dan dari sanalah lahir penguasa yang memberikan kebijakan.

Sehingga jelas. Dengan belajar ilmu politik, hukum politik maupun etika politik akan dengan mudah kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemangku kekuasaan yang tidak senada dengan kepentingan rakyat. Bahkan hanya dengan politik pula kita mampu membuat kebijakan baru yang berpihak pada kepentingan ideologi dan kepentingan rakyat.[**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Prodi Hukum Keluaga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

BISAKAH OMNIBUS LAW UU CIPTAKER DIBATALKAN?

Imroatus Solihah*

GELOMBANG Demonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kata yang tepat dipakai sebetulnya bukan, membatalkan, melainkan Presiden membuat Peraturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang (Perppu) yang kemudian disahkan dan otomatis mencabut Undang-Undang. Namun demikian, inisiatif Omnibus Law Cipta Kerja datang dari Presiden Jokowi yang ingin menggenjot investasi dan memangkas aturan yang dirasa menghambat. Jika dalam konteks politik praktis, mungkinkah Presiden Jokowi menerbitkan Perppu?

Jalan tengah disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, melalui artikel Fikih Judicial Review yang diterbitkan pada Harian Republika, 19 Oktober 2020, Mu'ti menilai Peluang Perpu membatalkan UU Ciptaker sangat kecil, mengingat UU Ciptaker memuat lebih dari 70 Undang-Undang terkait. Jalan tengah yang coba ditawarkan oleh Abdul Mu'ti adalah dengan mengajukan Judicial Review pasal-pasal yang dirasa bertentangan dengan Konsitusi.

Apa itu Omnibus Law?

Pertama-tama yang perlu diluruskan adalah sistematikan Omnibus Law yang dalam konteks hukum berarti hukum yang bisa mencakup satu isu besar tertentu yang pasal-pasal diantaranya bisa dirubah dan dihapus sesuai dengan kebutuhan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Dengan kata lain, Omnibus Law adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi dalam satu regulasi atau payung hukum. Metode omnibus Law lebih sering disebut Undang-undang sapu jagat ini lebih identik dengan Negara penganut sistem hukum common Law, meski begitu, banyak pihak menilai metode Omnibus Law dapat menjadi jalan keluar persolaan tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundang-undangan.

Misalnya, persoalan tumpang tindih aturan dalam Undang-Undang dengan UUD 1945 harus diuji materikan dulu ke Mahkamah Konsitusi. Disharmoni antar Undang-Undang, harus melalui proses perubahan Undang-Undang antara DPR dan Presiden, hal ini dipandang ribet menghambat proses percepatan kebutuhan aturan perundang-undangan tertentu. Metode Omnibus, dianggap efektif menangani persolaan tersebut.

Namun demikian, banyak pihak juga menyayangkan penerapan metode Omnibus dalam sistemaika peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Maria Farida Indrati, menurutnya, Omnibus Law berpotensi merusak tatanan sistem kenegaraan, merusakan tatanan sistem perundang-undangan serta menimbulkan tumpang tindih aturan baru. Selain itu, omnibus law yang bisa mencabut, menggantikan, atau mengubah pasal dari banyaknya UU yang tergabung (74 UU dalam Omnibus Ciptaker) pasti sangat sulit menyusun dan membutuhkan kejelian. Alih-alih menjadi solusi, dikhawatirkan justru menjadi sumber masalah baru.

Pandangan berbeda disampaikan Prof Jimly Asshiddiqie , Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan menulis Buku berjudul Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, menurutnya, omnibus law merupakan teknik pembentukan UU. Omnibus Law berfungsi antara lain untuk menata hukum yang saling tumpang tindih dan mengintegrasikan beberapa regulasi ke dalam satu regulasi. Selain itu menurutnya, teknik omnibus law mampu menata hukum lebih cepat karena dalam pembahasan bisa menyasar banyak UU untuk dicabut atau diubah. Ketentuan yang masuk dalam omnibus law tidak melulu menghapus pasal, tapi juga bisa menambah atau mengubah. Keuntungan lain, teknik/metode omnibus law dapat digunakan untuk mengintegrasikan, harmonisasi, konsolidasi berbagai kebijakan hukum, menyelesaikan UU yang saling bertentangan substansinya. Hal ini karena sistem pembentukan peraturan Negara Indonesia yang menganut civil Law terlalu kaku mengakibatkan eksekutivisasi sistem legislasi. Hukum Indonesia sudah seharusnya mengurangi ketergantungan pada pembentukan UU dengan lebih meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas yudisprudensi dalam aneka penyelesaian masalah-masalah hukum dalam praktik.

Namun praktik pelaksanaan Omnibus Law di tengah pandemi Covid-19 membuat partisipasi masyarakat secara subsantif tidak maksimal dan berpotensi melanggar demokrasi. Selain itu, banyaknya muatan UU dalam omnibus Law cipta Kerja menurut Jimly terlalu gemuk, justru tidak substantif dan menyasar pokok permasalahan.

Namun sebenarnya secara yuridis normatif, bisakah Perppu membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja?

Terlepas dari kabar dari Istana, bahwa presiden Jokowi tidak berniat menerbitkan Perppu guna membatalkan Omnibus Law UU Cipta kerja, namun secara yuridis normatif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pasal 1, menyebutkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Senada dengan itu, dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 22 (2) , Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Penjelasan lebih lanjut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan dalam Perpres Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 58 ayat (1) Presiden menugaskan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pemrakarsa.

Untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden. Pemrakarsa (dalam hal ini menteri yang ditunjuk oleh Presiden) juga harus membuat Rancangan Undang-Undang untuk menetapkan Perppu sebagai Undang-

Undang, dimana Undang-Undang tersebut mencabut Undang-Undang yang dimaksud dalam hal ini Undang-Undang Omnibus Law Cipta kerja.

Namun pembentukan Perppu tersebut harus tetap mendapat persetujuan DPR, hal ini berdasarkan Pasal 22 (2) UUD 1945, Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ditegaskan kembali dalam Pasal 52 (1) UU 12 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Bagaimana jika DPR tidak setuju dengan Perppu? Pasal 52 (5) UU 12 tahun 2011, Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

Mengingat, omnibus cipta kerja berisi sekitar 74 Undang-Undang, dan metode omnibus dapat dikatakan merupakan metode baru dalam sistem peraturan peraundang-undangan di Indonesia, maka secara politik praktis, peluang Perppu dapat membatalkan Undang-Undang Omnibus Law cipta kerja sangat kecil apalagi inisiatif muatan materi Undang-Undang ini datang dari pemerintah sendiri.

Judicial Review bisa batalkan UU

Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, maka pengujiannya diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagau mana ketentuan Pasal 9 UU No. 12 tahun 2011, yang berbunyi: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Banyak pihak yang tidak ingin menempuh jalur Judicial review karena dianggap hanya bisa menghapus pasal-pasal yang bertentangan dengan Konstitusi dalam arti uji materi, tidak dapat mencabut atau menghapus seluruh Undang-Undang, yakni uji formil.

Mengutip mkri.go, jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak bolehbertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Diperkuat oleh Jimly Asshiddiqie, menurutnya proses pembentukan Undang-Undang dianggap melanggar UUD jika melangggar prinsip konstitusi, MK berwenang menyatakan proses pembentukan bertentangan dengan konstitusi sehingga Undang-Undang tidak berlaku untuk seluruhnya. Menurutnya, judicial review ada dua jenis, yaitu uji materi dan uji formil. Selama ini, yang lebih sering bahkan hampir selalu diajukan adalah uji materi. Adapun uji formil, pernah juga dimintakan ke MK dan MA (untuk peraturan perundangan di bawah Undang-Undang) tetapi belum ada satu pun yang dikabulkan. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, Jimly melihat ada peluang untuk pengajuan baik uji formil maupun uji materi. Bahkan, kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali bisa membuat preseden putusan uji formil melalui judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.

Lagipula MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Menurut hemat penulis, jika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dirasa telah keluar dari koridor konstitusi, maka MK sebagai lembaga menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum sudah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia.

*) Staff di Laboratorium Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhamamdiyah Malang.

SUDAH SEJAUH MANAKAH KITA MENGENAL KARTINI?

Sudah sejauh manakah kita mengenal Kartini? Klub Buku Narasi merekomendasikan dua buku terkait Kartini yakni ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ dan ‘Panggil Aku Kartini Saja’. Dalam caption di Instagram-nya disebutkan ‘Saatnya tanggalkan dulu lomba kostum di perayaan Hari Kartini. Mari kita kenang Kartini sebagai sosok yang kritis karena banyak membaca.’

Merayakan Hari Kartini selain segala hal yang seremonial dan kasat mata, perlu juga untuk menyelami alam pemikiran Kartini. Dengan demikian Kartini tak sekadar tampil dalam kebaya, sosok mudanya yang melekat di ingatan, ataupun lagu ‘Ibu Kita Kartini’.

Sudah sejauh manakah kita mengenal Kartini? Apakah setelah dirilis film Kartini (2017), literasi terkait Kartini juga menjadi santapan publik? Medium pop yakni film memungkinkan untuk menjangkau massa yang lebih luas serta memantik rasa ingin tahu.

Kenang-kenanglah Kartini secara proporsional. Cari tahu narasi pemikiran dan pergulatannya. Maka daya gedor ide itu akan lebih menggigit dalam berbagai aspek.

SPIRIT RA KARTINI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Amir Fiqi*

HARI ini, tanggal 21 April merupakan hari yang sangat bersejarah bagi perjuangan perempuan Indonesia. Maka, setiap tahun diperingati sebagai Hari Kartini. Tentunya perayaan ini bertujuan untuk mengenang jasa perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini dalam mengangkat derajat perempuan di Indonesia.

Pada saat pandemi virus corona atau Covid-19, peringatan hari bersejarah ini tidak seperti biasanya. Tidak ada perayaan dengan menggelar pawai dengan mengenakan pakaian-pakaian adat dari seluruh Indonesia. Dan bisa jadi tidak ada lomba-lomba yang mengumpulkan massa banyak.

Namun, tidak adanya perayaan yang meriah seperti tahun-tahun sebelumnya jangan sampai melupakan atau menyurutkan semangat kaum perempuan Indonesia untuk terus mengambil spirit perjuangan RA Kartini. Teruslah berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia meskipun hanya langkah-langkah kecil, misalnya dengan memberikan peran besar dalam kehidupan keluarga.

Ibu menjadi guru di rumah

Di masa pandemi virus corona atau Covid-19 seperti saat ini, sungguh peran kaum perempuan di Indonesia sangat dibutuhkan. Pasalnya, seluruh aktivitas di pusatkan di rumah. Seperti imbauan dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka pemerintah meminta kepada warganya untuk melakukan aktivitas di rumah saja, misalnya belajar di rumah, beribadah di rumah dan bekerja di rumah.

Kondisi ini menjadi momentum kaum perempuan (ibu rumah tangga) untuk mengambil peran penting, khususnya dalam mendidik anak selama pandemi Covid-19. Karna selama pendemi ini, maka rumah telah berubah menjadi sekolah bagi anak.

Mengutip kalimat hikmah yang masyhur diungkapkan “Wanita adalah tiang negara. Apabila wanita baik maka baik pula negara. Apabila wanita rusak maka rusak pula negara,” ini harus menjadi spirit kaum perempuan Indonesia. Yakni menjadi sosok perempuan yang mampu mencerahkan dan berkontribusi besar bagi perubahan bangsa ini.

Dalam pandangan Islam perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk keberlangsungan bangsa yang religius. Maka itu, jangan sekali-kali meremehkan peran perempuan.

Hal ini juga menjadi spirit RA Kartini untuk memperjuagkan kaum perempuan di Indonesia. Dia memperjuangkan kaum perempuan pada saat itu harus memiliki hak yang setara dalam hal pendidikan. Karena dia sadar bahwa perempuan kelak akan menjadi ibu dari anak-anak mereka. Maka itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan untuk mendidik anak-anaknya kelak.

Pada saat itu, Kartini sudah memiliki pandangan jauh ke depan yakni bahwa kaum perempuan lah yang pertama kali akan memikul kewajiban sebaagai pendidik. Seorang perempuan akan menjadi ibu yang akan menjadi pusat kehidupan rumah tangga. Dan seorang ibu menurut Kartini, dibebankan tugas besar untuk membentuk budi pekerti. Dia menyadari betul bahwa mendidik bukan hanya sekadar membuat seseorang menjadi pintar. Ilmu pengetahuan dan intelektualitas seseorang tidak akan berarti apa-apa tanpa diimbangi dengan watak budi pekerti yang baik. Dan itu hanya bisa didapatkan melalui pendidikan dari seorang ibu dalam sebuah keluarga.

"Perempuanlah, kaum ibu yang pertama-tama meletakkan bibit kebaikan dan kejahatan dalam hati sanubari manusia, yang biasanya terkenang dalam hidupnya. Bukan saja sekolah yang harus mendidik jiwa anak, tetapi juga yang terutama pergaulan di rumah harus mendidik! Sekolah mencerdaskan pikiran dan kehidupan di rumah tangga hendaknya membentuk watak anak itu!," ungkap Kartini. (Kompas)

Maka itu, di masa-masa pandemi ini jadikan momentum untuk mendidik anak. Mungkin selama ini orang tua, khususnya ibu jauh dari anak, mulai

lah mendekat dengan membimbing mereka. Jadikan kehadiran ibu menjadi guru yang siap mendidik dan memberikan motivasi.

Intropeksi bersama

Jadikan belajar di rumah menjadi intropeksi bersama di dalam keluarga. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang tua yang seutuhnya bagi anak-anak?. Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya memberikan atau mencukupi kebutuhan fisik, tapi kita lupa hadir dengan memberikan kebutuhan psikis atau jiwa kepada mereka.

Keduanya harus hadir dan diberikan kepada anak-anak. Jangan sampai kita fokus mencukupi kebutuhan fisik tapi lupa memberikan kebutuhan psikis kepada anak. Sebab, sejatinya kebutuhan jiwalah yang paling utama; dengan cukup memberikan pendidikan psikis/ jiwa ini akan membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi anak. Yakni akan menjadikan mereka yang memiliki sikap atau budi pekerti yang baik.

Marilah kita intropeksi bersama yakni dengan memberikan kebutuhan yang seimbang antara dunia dan akherat. Jangan sampai hanya mengedepankan kepintaran/ intelektual, tapi orang tua harus menyiram dan merawat anak-anak dengan dengan nilai-nilai agama. Sebab inilah yang sejatinya dibutuhkan bangsa ini.

Apabila kita jujur melihat kondisi generasi muda saat ini sangat memprihatinkan. Generasi muda saat ini hidup dalam pergaulan bebas. Seperti dikutip dari laman Kompas.com jumlah kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya mencapai 2,3 juta. Dan angka 30 persennya dilakukan oleh para remaja. Tidak hanya pergaulan bebas generasi muda saat ini juga dihadapkan dengan godaan pengggunaan obat-obat terlarang (narkoba) jumlahnya juga sangat tinggi.

Seperti disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisiaris Jenderal Polisi Heru Winarko bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika.

Berdasarkan World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.

Ini menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang berat. Jika generasi bangsa ini tidak ditanamkan akhlak yang baik maka sungguh berat bangsa ini ke depan. Maka itu, peran keluarga menjadi sangat penting, karena benteng terakhir mencetak generasi bangsa yang unggul baik intelektual dan moral ada di keluarga. Dan peran ibu menjadi penting untuk senantiasa membimbing anak-anak mereka menjadi pribadi yang paripurna.

Jadikan momentum pandemi Covid-19 menjadi sarana untuk menuju perubahan yang besar yakni dengan menyiapkan generasi yang unggul. Semoga semangat RA Kartini menjadi spirit bagi kaum perempuan Indonesia saat ini menjadi obor penerang bagi perubahan bangsa yang gemilang.

*) Penulis merupakan wartawan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UHAMKA

PERS diungkap sebagai pilar keempat demokrasi. Tentu sebelumnya dikenal trias politika (eksekutif, legislatif, yudikatif). Demokrasi memberikan ruang bagi narasi yang berbeda, imajinasi yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Memang pilar demi pilar tersebut dapat sekadar hanya nama tanpa substansi. Sebut saja dengan eksekutif yang terlalu dominan hingga dapat menganeksasi legislatif, yudikatif, serta pers. Hal itu dapat terjadi diantaranya karena sumber finasial, sumber kekuasaan terpusat di eksekutif.

Metode checks and balances tidak berjalan dengan baik. Pers pun dapat terkontaminasi, alih-alih menyuarakan suara rakyat dan berpihak pada kepentingan publik, menjadi sekadar perpanjangan tangan, suara dari pihak tertentu. Maka narasi pemikiran di publik pun menjadi tidak sehat.

Yang berada di tataran masyarakat pun bisa jadi terkecoh. Dari mana Anda tahu tentang sosok politikus tertentu? Diantaranya melalui kanal pers. Maka jika kanal pers telah berpihak pada kepentingan pihak tertentu, maka tekan pedal gas pencitraan dapat berlaku. Dipasoklah kegiatan-kegiatan, framing terhadap tokoh tertentu. Sebuah kebijakan publik yang keliru pun dapat disulap menjadi seolah baik dengan menggunakan framing pemberitaan tertentu. Celakanya lagi rimba informasi memberikan ruang bagi para pendengung yang getol mendukung pihak tertentu sembari mengebiri pihak seberang.

Maka prinsip etik jurnalisme harus dipegang secara saksama. Bagaimana menghasilkan konten pemberitaan yang baik. Sudahkah menerapkan cover both sides? Dalam pemberitaan apakah tidak terkontaminasi dengan kepentingan pihak pengiklan, preferensi politik redaksi, dan sebagainya.

Tugas jurnalistik memang tidak mudah. Diantaranya merawat ingatan. Untuk secara "dingin" mengulas konsistensi para politikus dalam kata dan perbuatan.

Tugas jurnalistik memang tidak mudah. Untuk tetap hidup secara ekonomi sekaligus menyajikan konten bermutu.

Demokrasi dapat hidup karena benturan pemikiran yang ada, benturan pendapat. Maka sudah sejauh manakah pers memberikan ruang bagi benturan pemikiran tersebut? Dahulu kala para fouding fathers Indonesia menyadari arti penting pers untuk diseminasi gagasan, sebagai dialektika pemikiran. Tentu di era kemerdekaan hal tersebut tetap harus terjadi. Pers yang dapat menjadi pilar demokrasi, bukan sekadar penyambung lidah mereka yang memberi "kue".

PERBEDAAN PSBB DAN PPKM

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali sejak 11-25 Januari 2021, dan kembali diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Kebijakan ini diambil untuk menekan angka kasus penyebaran Virus Corona.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartanto menjelaskan bahwa PTPKM bukanlah kebijakan lockdown wilayah. PPKM berfungsi untuk membatasi kegiatan masyarakat secara ketat, khususnya pada daerah zona merah COVID-19.

Dari segi aturan atau regulasi PPKM merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

PSBB	PPKM
Kegiatan belajar mengajar di rumah secara daring (dalam jaringan)	Pasar ritel modern (pasar swalayan maupun toko swalayan), apotek dan tempat makan (warung makan/rumah makan/restoran), tidak tutup saat wilayah tertentu saat PSBB
Kegiatan restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25 persen	Pembatasan moda transportasi dari kapasitas hingga jam operasional
Pembatasan jam operasional untuk pusat pembelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB	Kegiatan tempat umum dihentikan sementara
Pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Menghentikan kegiatan keagamaan di rumah ibadah
Penyediaan kebutuhan pokok, tetap dapat beroperasi 100 persen. Namun, jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Peliburan sekolah dan tempat kerja
	Pembatasan kegiatan sosial budaya

Data: Kemenkes RI, Carapandang.com Riset: Tim Grafis: Hengki

CARA PANDANG
Inspirasi Terkini!

JALAN PANJANG ANIES BASWEDAN

Amir Fiqi*

Anies Baswedan akan menjadi sosok penting di Pilpres 2024 mendatang. Namanya menempati posisi kuat untuk bertarung di Pilpres 2024, setelah Prabowo Subianto.

BERBICARA soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memang masih lama, yakni empat tahun lagi. Namun, dinamika politik untuk menyambut pesta demokrasi lima tahunan ini sudah terasa. Masing-masing kelompok yang memiliki kepentingan sudah memainkan strateginya.

Pilpres 2024 merupakan pertarungan terbuka dan seimbang. Sebab, tidak ada lagi calon petahana seperti Pilpres 2019 lalu. Jadi para pertempuran Pilpres 2024 mendatang menjadi medan laga yang menarik bagi masing-masing kontestan nanti.

Tidak bisa dipungkiri untuk melawan calon petahana terbilang sulit, apalagi calon petahana itu dalam kontestasi Pilpres, berarti pada saat itu sang calon sedang menjabat posisi tertinggi di Indonesia - yang memiliki dan menguasai instrument dan institusi negara dari desa, daerah hingga pusat. Yang jelas akan sedikit "menggunakan" kekuasaan yang dimiliki untuk mempertahankan kekuasaannya.

Jika melihat hasil survei terbaru, yang dikeluarkan oleh dua lembaga survei yakni Indo Barometer dan Media Survei Indonesia (Median) menempatkan nama Anies Baswedan menjadi sosok yang kuat untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Anies menempati posisi kedua sebagai kandidat calon presiden pada Pemilu 2024 nanti. Di posisi pertama ditempati oleh Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil survei Indo Barometer Prabowo menempati posisi terkuat dengan angka 22,5 persen. Anies menempati posisi kedua dengan angka 14,3 persen. Dan Sandiaga Salahudin Uno menempati posisi ketiga.

Hasil yang tak jauh beda juga disampaikan oleh Media Survei Indonesia (Median). Prabowo masih menempati posisi pertama dengan meraup angka sebesar 18,8 persen, disusul Anies Baswedan dengan 15,8 persen, Sandiaga Uno ditempat ketiga dengan 9,6 persen. Sementara sosok muda lainnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 8,3 persen dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan meraup angka 5,7 persen.

Kendati menempati posisi terkuat, apakah Prabowo Subianto akan kembali memutuskan bertarung pada Pilpres 2024? Jawabannya belum pasti- bisa jadi iya, dan bisa jadi tidak.

Namun, jika mencerna apa yang disampaikan para petinggi Partai Gerindra melihat hasil survei tersebut tidak begitu antusias. Bahkan dengan nada diplomatis mereka mengatakan bahwa saat ini Partai Gerindra akan tetap fokus bekerja untuk melayani rakyat, baik yang berada di eksekutif dan di legislatif. Dan mereka mengatakan terlalu dini sibuk membahas strategi untuk Pilpres 2024.

Jika nanti benar Probowo tidak kembali bertarung, tapi memutuskan hanya menjadi King Maker maka yang memiliki kans terbesar adalah sosok-sosok muda, seperti Anies, Sandi, AHY dan Ridwan Kamil. Dan dari nama-nama tersebut yang memiliki panggung besar untuk mempersiapkan diri berlaga di Pilpres mendatang adalah Anies dan Ridwan Kamil.

Saat ini kedua nama tersebut menjabat sebagai kepala daerah yang memiliki populasi penduduk yang sangat besar, yakni DKI Jakarta dan Jawa Berat. Berangkat dari posisinya tersebut, ini bisa menjadi modal sosial dan modal politik yang sangat luar biasa.

Jika mereka bisa memanfaatkan panggung yang saat ini mereka miliki, maka ini bisa menjadi modal untuk bertarung di Pilpres 2024. Namun, jika mereka tidak bisa memanfaatkan panggung tersebut melalui kinerja-kinerja nya maka ini bisa menjadi sasaran tembak untuk melumpuhkan langkahnya bertarung dalam kontestasi menuju kursi RI 1.

Antara Kritik dan Serangan Politik

Hal ini sudah dirasakan oleh Anies Baswedan. Sebagai calon terkuat pada Pilpres 2024 dia kerap mendapat serangan-serangan yang luar biasa. Serangan tersebut tentunya ingin menjadikan panggung yang sedang Anies mainkan sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak terlihat indah dan menarik lagi, dengan harapan seiring berjalannya waktu akan terus menggerus tingkat elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Para lawan politik ingin membangun narasi bahwa Anies tidak bekerja dengan baik dalam mengurus DKI Jakarta.

Serangan tersebut sudah dari awal dimainkan, dari mulai kasus lem aibon, proyek revitalisasi Monas sampai soal banjir DKI Jakarta. Dan serangan itu pun terlihat sangat kompak, sampai-sampai bukan warga Jakarta pun turut beramai-ramai menyudutkan Anies, dengan membangun narasi dia adalah sosok gubernur yang memiliki kinerja yang tidak baik.

Misalnya, soal banjir- narasi yang dibangun oleh lawan politik Anies menyudutkan bahwa dia gubernur yang tidak mampu mengatasi banjir di Jakarta. Padahal apabila melihat fakta banjir terjadi merata tidak hanya di Jakarta, di daerah lain juga mengalami kejadian yang serupa. Bahkan, banjir yang terparah terjadi di Provinsi Banten dan Bogor seolah luput dari perhatian mereka. Mereka justru secara massif terus menyerang Anies.

Bahkan yang lebih lucu lagi, gara-gara banjir ada segelintir kelompok meminta Anies untuk lengser dari jabatannya. Dari rangkaian ini tentunya bertujuan membangun narasi agar Anies terlihat tidak mampu mengatasi banjir.

Tidak hanya itu, serangan demi serangan kepada Anies juga dilakukan oleh partai politik oposisi. Dan yang paling keras melakukan serangan adalah PSI. Bahkan apa yang dilakukan tidak lagi terlihat kritik, tapi sudah jelas-jelas serangan politik. Dan serangan yang dilakukan oleh PSI terhadap Anies terlihat berdasarkan atas kebencian bukan kritik sebagai oposisi. Contoh, PSI melaporkan dugaan korupsi proyek revitalisasi Monas ke KPK. Dan alhasil aduan yang mereka ajukan ditolak oleh lembaga antirasuah itu.

Dan penulis menduga serangan-serangan yang lain akan terus gencar dilakukan oleh lawan politik Anies. Serangan tersebut tujuan terakhirnya adalah membangun narasi besar bahwa sosok Anies tidak beres mengurus Jakarta- dan inilah yang menjadi dasar mereka mengatakan Anies tidak layak untuk memimpin Indonesia.

Menuju Pilpres 2024

Kontestasi Pilpres 2024 masih lama, sekitar 4 tahun lagi. Dan ini tentunya menjadi jalan panjang bagi Anies Baswedan. Tentunya jalan tersebut tidak mulus dan mudah, akan banyak tantangan, batu, krikil yang menghadang.

Dan hasil survei yang dikeluarkan oleh Indo Barometer dan Median juga masih terlalu dini. Bisa jadi seiring berjalannnya waktu tingkat elektabilitas Anies bisa semakin bertambah atau bisa jadi semakin tergerus. Dan yang menjadi perhatian penting bagi Anies apakah dia akan berpeluang kembali maju bertarung pada Pilkada DKI Jakarta?. Sebab, sama-sama kita tahu Anies tidak memiliki mesin politik yang jelas-sebab, dia bukanlah kader partai.

Jika seandainya Anies tidak kembali maju pada Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada 2022 mendatang- tentunya Anies tidak kembali memiliki panggung yang megah seperti saat ini. Dan bisa jadi nama dia seiring berjalannya waktu akan kian redup.

Sebab, dalam pesta demokrasi langsung seperti ini, momentum menjadi hal yang sangat penting- dan memiliki daya dorong yang sangat luar biasa. Belajar dari Jokowi- dia memiliki momentum yang besar saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan momentum tersebut dia olah sangat luar biasa dan terbukti dia mampu menang dalam pertarungan Pilpres 2014 silam. Dan pada saat itu lawan yang dia hadapi bukan tokoh sembarangan, yakni seorang jenderal, pengusaha dan sekaligus memiliki mesin politik yang kuat, tapi berhasil Jokowi kalahkan. Bahkan sekarang dia menjabat presiden dua periode.

Jalan panjang masih harus dilalui Anies, apakah dia mampu bertahan dan memiliki energi yang kuat hingga pada waktunya, yakni kontestasi Pilpres 2024. Kita tunggu jawabannya- sambil menikmati dinamika politik bangsa ini yang semakin seru dan layak untuk didiskusikan. [*]

*) Penulis merupakan pemerhati sosial dan aktivis Pemuda Muhammadiyah

MANA NASI GORENG FAVORITMU?

DIKSI ‘nasi goreng’ kembali menyeruak di publik. Hal tersebut dikarenakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memasak nasi goreng di lantai III gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020) sore. Sebelumnya diksi ‘nasi goreng’ terkoneksi dengan peristiwa nasi goreng Megawati Soekarnoputri ataupun nasi goreng yang diidamkan Barack Obama. Tentu ‘nasi goreng’ tak berdiri sendiri dalam konteks ini. Ini bukan tentang nasi goreng yang biasa kau santap ataupun nasi goreng yang kau inginkan di saat hujan. Terdapat narasi politik, sosial, hukum, budaya, dari ‘nasi goreng’ Barack Obama, Megawati Soekarnoputri, Firli Bahuri.

Firli yang merupakan eks kepala Polda Sumatra Selatan mengutarakan bahwa dirinya memang senang memasak sejak dahulu. “Saya senang memasak. Dulu di Sumatra, di Palembang, juga terkenal dengan nasi goreng kapolda,” ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri seperti dilansir harian Republika.

Firli mengajak pimpinan KPK lainnya, para dewan pengawas, dan pegawai KPK untuk mencicipi nasi gorengnya. Menurut dia, acara masak Ketua KPK ini digagas sebagai salah satu sarana menjalin komunikasi antarindividu di bawah lembaga antirasuah.

Tentu tanggapan dari mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto yang cukup menohok menjadi perhatian publik.

“Ketua KPK seharusnya mengolah dan memasak ramuan antikorupsi yang ditunjukkan melalui apa program strategis KPK dan ketegasan KPK menghadapi brandalisme koruptor and their gangs untuk hadapi masivitas korupsi di era reformasi yang kian nyata dan tak terbantahkan,” kata Bambang Widjajanto.

“Selamat datang, kekonyolan. Percayalah, korupsi takkan bisa kau habisi dengan ribuan piring dari nasi gorenganmu karena yang perlu kau goreng hingga gosong, hangus, dan kering kerontang adalah para koruptor, bukan nasi,” ucap Bambang.

Demikianlah sekelumit narasi dan tanggapan dari nasi goreng Ketua KPK Firli Bahuri. Sejenak mengenang nasi goreng Megawati, hal tersebut diantaranya ditafsirkan dengan ajakan bergabung ke koalisi pemerintahan, teringat juga publik tentang Mega-Prabowo yang menjadi capres-cawapres 2009. Untuk kemudian setelah peristiwa nasi goreng tersebut, kita bisa lihat kini komposisi kabinet serta makna oposisi di era kini.

Sedangkan nasi goreng Barack Obama, ah jangan-jangan menunjukkan inferioritas kita. Betapa kita begitu senang ketika nasi goreng diucapkan oleh orang asing dan berkuasa (kala itu).

Diantara 3 diksi nasi goreng tersebut, mana yang jadi momen favoritmu? Atau ketiganya menunjukkan bahwa lebih enak kita mengonsumsi nasi goreng kesukaan kita, yang terlepas dari lapisan makna politik.

DEMOKRASI DAN REFORMASI AKANKAH SEJALAN?

DEMOKRASI sempat dilabeli sebagai akhir dari sejarah. Sebuah narasi ideal yang dituju bagi yang belum, serta sebuah tata yang memungkinkan check and balances antara unsur-unsur kekuasaan. Tapi lihatlah kini, di sejumlah negara, demokrasi dipertanyakan, demokrasi dienyahkan. Jika Samuel Huntington dulu dengan gagahnya menunjukkan riset semakin membludaknya negara yang menganut demokrasi, maka era sekarang ini negara penganut demokrasi maupun demokrasi substansial perlu dikaji.

Pemimpin-pemimpin “bertangan besi” dengan wajah populis menjadi kejadian di beberapa negara. Fenomena post-truth juga mengukuhkan bahwa denyut demokrasi substansial sedang tidak baik-baik saja. Simaklah percakapan di ranah online, bagaimana “politik bumi hangus” dibenarkan oleh warga negara. Bagaimana rival politik bak bandit yang jahat dan pantas dihukum. Bagaimana tokoh pujaan yang selalu benar. Logika dan penjelasan dari ahli, pakar pun kadang dikesampingkan dari nalar publik. Ah iya jangan lupakan bagaimana pengamat, kalangan akademisi, pihak media, penggiat survei, bisa jadi menambah keruh sengkarut ini dengan analisa yang partisan.

Maka kata reformasi dan demokrasi bisa jadi tidak sejalan di negeri ini. Pasca tumbangnya Orde Baru yang dikenal dengan masa reformasi, segala cita-cita demokrasi, upaya mencapai demokrasi, bisa jadi mengalami arus balik. Jangan lupa Orde Baru pernah melabeli dirinya sebagai Demokrasi Pancasila. Akan tetapi lihatlah substansinya di masa Orde Baru tersebut, di mana pada berbagai segi demokrasi substansial tidak terjadi. Jangan-jangan hal tersebut terjadi lagi. Negeri ini sekadar menjalani demokrasi prosedural. Segala lembaga tinggi negara ada, pemilu ada, tapi para pelaku politik, warganya tidak menerapkan jiwa demokrasi.

Demokrasi memang tidak menjanjikan kesejahteraan. Tapi memberikan kesempatan bagi saya dan Anda untuk bicara dan berbeda. Demokrasi memang bisa menjemukan, dengan mufakat yang seakan tak temu juga, tapi bergembiralah ada perbedaan pendapat dan pemikiran. Nafas demokrasi bisa henti bukan sekadar atas restu penguasa, tapi juga dengan anggukan warga negaranya yang enggan melakoni demokrasi substansial.

PROBLEMATIKA BANGSA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN

Inas Majidah Lailul Arifah*

BERBICARA mengenai problema bangsa dalam pendidikan maka hal pertama yang dikonseptualkan adalah terkait dengan persoalan krisis pendidikan yang terjadi di tengah-tengah negara Indonesia. Hal yang perlu kita ketahui bahwasaanya pendidikan di Indonesia tak bisa dipungkiri lagi dalam hal fasilitas pembangunan. Meskipun fasilitas pembangunan di Indonesia begitu banyak, tapi dalam konteks pemerataan pembangunan pendidikan kurang kondusif di negara Indonesia itu sendiri.

Banyak masyarakat di Indonesia dari desa sampai kota masih dikatakan terlalu miskin dalam pengelolan pembanguan pendidikan. Pengelolaan yang dimaksud di sini adalah fasilitas pembangunan dalam mendukung pendidikan di setiap desa kurang merata dan pengelolaan sumber daya manusia dalam memenuhi konsep ilmu pengetahuan masih terlalu minim dan miskin. Hal ini di sebabkan karena kurang adanya perhatian pemerintah dalam menghadapi problem pendidikan saat ini. Sebab kalau di lihat dari konflik sosial program pemerintahan saat ini adalah lebih mementingakan pembanguan infrastruktur ekonomi dan industri.

Perlu diketahui lagi bahwasanya maju atau mundurnya sebuah bangsa adalah kekuatan dasar dari pada pendidikan, sebab pendidikan merupakan dasar dari pada sebuah tubuh bangsa itu sendiri. Namun di sisi inilah pemerintah sangat lemah memahami soal problem yang terjadi pada pendidikan, pemerintah saat ini memandang pendidkan hanya sebagai sebuah formalitas yang hanya dibangun untuk melahirkan generasi yang berijazah bukan generasi yang berintelektual.

Problem pendidikan yang sangat fatal saat ini di dunia perkampusan adalah di mana pendidikan telah menjadi ruang produksi yang melahirkan hukum yang membungkam suara para mahsiswa yang mau menyuarakan keadilan yang terjadi di dalam lembaga pendidikan yang terkait dengan tidak kondusifnya nilai pendidikan yang diterapkan melalui aturan yang berlaku di dunia kampus itu sendiri.

Maka dari itu mengenai persoalan problema pendidikan yang terjadi saat ini perlu adanya pembenahan dari pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan pendidikan agar lebih mengutamakan pendidikan dari pada pembangunan infrastruktur yang kadang kalah merugikan masyarakat Indonesia.

Pendidikan saat ini lebih diarahkan pada pola pendidikan yang lebih moderen, di mana anak tidak perlu lagi belajar di ruangan, mereka bisa belajar di mana saja mereka mau, si Anak tidak perlu lagi membawa buku-buku yang memberatkan, mereka cukup membawa smartphone, karena buku sudah dalam bentuk e-book; dan yang lebih menarik lagi si Anak tidak perlu lagi membayar sekolah yang sangat mahal, sehingga uang pendidikan mereka bisa dialihkan pada pengeluaran lain yang lebih bermanfaat.

Anak-anak pelajar ini akan sangat dimanjakan oleh teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Maka, suka atau tidak suka, pemerintah dan aparaturnya harus mendukung hal tersebut.

Selain pemerintah, sekolah-sekolah yang masih bertahan juga harus mendukung hal tersebut. Namun dalam sisi lain pendidikan berbasis teknologi ini juga berpengaruh pada efektifitas belajar anak yang mana menimbulkan dampak negatif yang terjadi pada karakter anak tersebut. Akan lebih berdampak buruk jika anak-anak diteruskan melakukan pembelajaran melalui teknologi, sebab kontekstual nilai pada karakter anak itu sendiri perlahan-lahan dibunuh oleh teknologi itu sendiri. Dari situlah perlu adanya revolusi mental pada anak agar selalu belajar yang lebih efektif dalam menggunakan teknologi yang saat ini telah membias di masyarakat. [**]

*) Penulis adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dzaki Alfajri*

PENDIDIKAN adalah pembelajaran pengetahuan,keterampilan,dan kebiasaan yang diajarkan oleh subjek (guru) kepada suatu objek (peserta didik) yang didalamnya terdapat suatu nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan.Fungsi dari pendidikan ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan kepribadian, agar murid/peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat.

Dalam sebuah hadist Rasullah menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban seorang muslim. Maka itu diwajibkan setiap orang Islam untuk menuntut ilmu baik orang dewasa ataupun anak anak.

Maret 2020 Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Akibat dari virus yang awalnya dari Wuhan ini kegiatan pendidikan paling terdampak. Sekolah dan kampus ditutup tidak ada pembelajaran tatap muka.

Kebijakan penutupan sekolah atau kampus ini banyak sekali perubahan aktifitas pendidikan, dari kita belajar yang awalnya tatap muka menjadi sistem belajar jarak jauh (DARING). Kondisi seperti inilah yang kita rasakan dapat menimbulkan tantangan-tantangan baru yang kita hadapi.

Dalam kaitan pandemi ini Kemendikbud mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan tertanggal 9 Maret 2020 dan SE 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 tertanggal 24 maret 2020 yang isinya,di antaranya; (1) Ujian Nasional, (2) Proses Belajar dari rumah, (3) Ujian sekolah, (4)Kenaikan kelas, (5) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (6) Dana Bantuan Opersional Pendidikan.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas maka pembelajaran DARING menjadi solusinya. Disamping itu mengingat kesediaan internet dan hardware yang terbatas, maka efektivitas pembelajaran jarak jauh ini belum bisa kondusif.

Selama belum ditemukannya vaksin Covid-19, maka kegiatan belajar dan mengajar tidak akan berjalan seperti sedia kala dengan cara melalui tatap muka, namun telah berubah dengan melakukan perkuliahan atau pembelajaran jarak jauh secara online.

Sebelumnya penulis telah melakukan wawancara kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Seperti disampaikan Mahasiswa PTIQ Jakarta bahwa pendidikan di masa pandemi memiliki banyak hambatan dan tantangan antara lain seperti penyediaan kuota terbatas, pemahaman dan sistem pembelajaran secara daring ini membuat kepahaman berkurang, baik dari penjelasan maupun dari koneksi atau gangguan internet di daerah tersebut. Tetapi ada beberapa keunggulan dari sistem pembelajaran seperti ini yaitu, orang tua dapat melihat keahlian dan kemampuan belajar si anak.

Sementara itu, seorang guru mengatakan bahwa pembelajaran secara DARING ini kurang maksimal karena semua penjelasan yang disampaikan kurang baik, kemudian banyak anak yang tidak memiliki kuota untuk belajar. Pendapat keduanya tentang tantangan pendidikan pada masa pandemi ini tidak jauh berbeda,mereka sama sama mengeluhkan atau meresahkan dengan kondisi seperti ini.

Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah seharusnya menyediakan kuota internet gratis kepada seluruh pelajar di Indonesia, sebab keterbatasan kuota internet dapat menghambat aktifitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian pihak sekolah untuk merumuskan/ menyusun kembali metode pembelajaran yang menyenangkan yang disesuaikan dengan kondisi situasi daerah tersebut.

Selain itu, Kemendikbud juga perlu mendekorasi/ mendesain modul sebagai ganti buku tema yang selama ini kita gunakan agar lebih ringkas sehingga lebih mudah di pahami dan diperlukan juga guru memberi sebuah video-video pembelajaran yang dapat dimengerti oleh murid atau siswa.

Kondisi pembelajaran seperti sekarang ini pasti juga memiliki kelebihan antara lain siswa bisa mempelajari teknologi informasi yang berkembang di era modern, siswa bisa langsung belajar dari rumah tidak perlu datang ke sekolah dan mendapat pengawasan langsung dari orang tua siswa; waktu yang fleksibel, dan siswa bisa mempelajari pelajaran internet itu kemudian diaplikasikan pada kehidupan nyata.

Dengan demikian dapat disimpulkan, tantangan dan peluang pendidikan pada masa pandemi memiliki banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Maka itu kita harus bekerja sama dalam mensukseskan masa perubahan pendidikan ini supaya murid dan guru bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka. [**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI

Miftachul Nadila*

PENDIDIKAN merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan terbagi menjadi 3 jalur yaitu formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan formal merupakan sebuah pendidikan umum yang diselenggarakan di sekolah umum contohnya sekolah. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan di luar pendidikan formal contohnya club sepak bola. sedangkan pendidikan informal merupakan sebuah pendidikan belajar secara mandiri yang dilakukan dengan sadar dan tanggung jawab contohnya ibu yang mengajari anaknya tentang akhlak dan menjaga etika terhadap orang lain.

Dapat diketahui pendidikan pada umumnya terdapat beberapa jenjang seperti Pendidikan Paud, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi atau Universitas.

Saat ini, dengan adanya virus Corona atau Covid-19 yang menyebar sangat cepat di beberapa negara menjadikan masa pembelajaran terganggu. Salah satunya di negara Indonesia. Virus ini pertama kali muncul di salah satu pasar yang berada di negara Cina.

Virus Corona menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, infeksi paru-paru, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Karena masa inklubasi virus berlangsung selama kurun waktu 10 hingga 14 hari. Dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan beberapa peraturan seperti pysical distancing atau jaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, dll.

Sistem pembelajaran di Indonesia sebelum adanya Covid-19 dilakukan secara luring atau tatap muka. Tetapi, semenjak adanya Covid-19 pembelajaran dilakukan secara daring melalui alat digital yaitu handphone atau laptop.

Dengan dibantunya alat digital untuk melakukan pembelajaran secara daring, maka para pelajar atau mahasiswa harus mempunyai salah satu diantara handphone maupun laptop. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara agar bisa mengikuti pembelajaran secara daring atau online.

Jika menggunakan handphone atau laptop, maka juga diperlukan sebuah jaringan internet atau bisa juga menggunakan WiFi.

Akan tetapi, sinyal atau jaringan internet juga memicu permasalahan dalam pembelajaran daring. Khususnya di daerah terpencil. Peristiwa tersebut merupakan salah satu hambatan bagi pelajar atau mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara online atau daring.

Penulis melakukan beberapa wawancara terhadap pelajar atau orang tua anak yang sedang melakukan pembelajaran secara daring. “Hp saya tidak cukup untuk memasang aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Jadi saya kalau kelas daring itu biasanya pakai HP/laptop Ustadz yang ada di pondok. Kalau mau dipakai ustadz saya ya saya mengalah. Ya mau gimana lagi keadaannya seperti ini,” ucap Nur Maylatul C.

“Pembelajaran daring membuat saya tidak paham pelajaran yang diberikan oleh guru mbak, Apalagi sekarang musim hujan sinyalnya jadi bermasalah” ucap Achmad Waliyuddin

“Sinyal saya kadang susah mbak dan saya ya kadang kurang paham” ucap Rizki Dwi Amanda

“Sebenarnya pembelajaran daring itu ada enaknya mbak, kita dituntut untuk lebih sadar diri agar bisa belajar dengan sendirinya meskipun terkadang dosennya tidak menerangkan Cuma dikasih tugas aja. Karena saya itu tipe orang otodidak” ucap Siti Nuzulul Rochmah

“Aduh mbak yang sekolah anak saya tetapi saya sebagai orang tua harus bisa mengikuti pembelajaran daring karena anak saya masih sd jadi saya dan suami harus bisa pintar-pintar mengatur waktu soalnya kami berdua juga kerja” ucap ibu Ibnu

Jadi dilihat dari pendapat yang penulis peroleh bahwa pembelajaran daring itu memiliki beberapa hambatan diantaranya tidak adanya alat digital, kurangnya kepahaman yang diterima pelajar atau mahasiswa, sinyal yang kurang mendukung, belajar tanpa penjelasan dari dosen atau guru karena tidak semua pelajar atau mahasiswa bisa paham tanpa adanya penjelasan seorang guru atau dosen, dan yang terakhir meskipun anaknya yang sekolah orang tua dituntut untuk bisa mengikuti pembelajaran daring juga.

Hingga akhirnya pemerintah memberikan subsidi kuota internet secara gratis untuk para pelajar atau mahasiswa. Dengan diberikannya kuota internet secara gratis, maka beban orang tua sedikit berkurang. Karena ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, pemakaian kuota internet bisa mencapai kapasitas 2 GB bahkan bisa lebih dari kapasitas tersebut.

Hambatan pelajar tidak hanya pada kuota internet saja melainkan pada sinyal atau jaringan, khususnya di daerah terpencil. Sehingga kita harus mencari jaringan yang bagus untuk melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring yang dilakukan melalui aplikasi via WhatsApp, Youtube, Zoom, Google Meet, dll. Jika jaringan kurang mendukung secara otomatis pembelajarannya terganggu.

Di sisi lain ada sebuah pendapat positif tentang pembelajaran secara daring salah satunya yaitu

“Semenjak anakku melakukan pembelajaran daring saya sebagai orang tua tau cara menggunakan sebuah HP meskipun tidak terlalu paham” Ibu Wawa

“Saya memang generasi Milineal tetapi saya tidak begitu paham tentang masalah HP gitu mbak, tapi semenjak saya dibelikan HP untuk pembelajaran daring maka saya gunakan HP tersebut untuk pembelajaran dan saya sekarang jadi tau cara penggunaannya itu gimana” ucap Beni

Dalam pembelajaran secara daring di masa pandemi Covid-19 penulis mengatakan bahwa tidak hanya tantangan yang dialami para pelajar atau mahasiswa. Melainkan juga adanya sisi positif. Seperti pendapat yang diperoleh penulis bahwa para pelajar atau mahasiawa maupun orang tua dituntut untuk bisa menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop. Sehingga tidak ketinggalan zaman dan tahu bagaimana cara penggunaan teknologi yang setiap waktu akan berubah semakin canggih.

Jadi pembelajaran secara daring atau online pada masa pandemi Covid-19 ini memiliki sisi positif dan negatif. Meskipun sistem pembelajarannya tidak seefektif luring atau tatap muka. Pembelajaran tersebut menuntut kita untuk berpikir secara terbuka, agar bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik serta paham dengan apa yang disampaikan oleh guru maupun dosen. [**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Citra Kusuma Dewi*

TAHUN 2020 bisa diibaratkan tahun penuh kepanikan, kecemasan, dan ketakutan bagi seluruh penduduk dunia. Bagaimana tidak, hampir di seluruh belahan di dunia terkena dampak dari munculnya virus baru yang dikenal dengan virus corona. Virus yang pertama ditemukan di kota Wuhan, China.

Virus itulah yang membuat kita harus berdiam diri di rumah, membatasi segala aktivitas, mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, dan selalu memperhatikan kebersihan diri dan sekitar. Salah satu program negara yang terhalang oleh pandemi Covid-19 ini adalah pendidikan. Proses pembelajaran di sekolah dan kampus menjadi terhambat karena adanya pandemi ini.

Semua kegiatan harus dibatasi. Metode pembelajaran kini tak sama lagi. Biasanya bertemu dan berkumpul untuk berdiskusi, sekarang hanya bisa adu mulut dengan diri sendiri. Tatap muka apalagi, sekali pun ada, kita tetap harus berhati-hati. Semua persiapan dan rundown acara yang sudah tertata rapi, akhirnya dibatalkan karena adanya pendemi.

Peristiwa ini menjadi tantangan besar bagi negara untuk mencari jalan keluar agar program pendidikan Indonesia tetap berjalan dengan baik. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar jarak jauh yaitu via daring (dalam jaringan).

Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Sejak diterbitkan surat tersebut, ribuan sekolah ditutup demi mempersempit penyebaran virus corona.

Di balik hiruk pikuk globalisasi di kota-kota besar yang menyuguhkan kemajuan teknologi dan kemudahan dalam mengakses internet, ternyata pemerintah juga harus memikirkan nasib para peserta didik yang berada di pelosok negeri. Pasalnya tak semua peserta didik memiliki media dan jaringan internet yang memadai.

Mereka ada yang harus mencari pinjaman terlebih dahulu media perantara yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti laptop/pc atau gadget dan mencari jaringan internet yang bagus agar bisa mengikuti pembelajaran. Bahkan ada yang menumpang di rumah tetangga, hingga ada pula yang harus memanjat pohon dulu agar bisa mendapatkan sinyal. Belum lagi harus membeli kuota internet yang harga nya cukup menguras dompet, karena yang penulis amati penyebaran subsidi kuota pendidikan belum merata seluruhnya.

Mengenai pembelajaran daring ini, penulis pun juga merasakan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Mulai dari menjaga agar jaringan internet tetap stabil, mengontrol perangkat yang digunakan agar tetap terhubung dengan internet, belum lagi jika perangkat yang digunakan tiba-tiba mati dan ada pemadaman listrik yang mendadak. Penulis menilai proses pembelajaran daring ini tidaklah efektif. Sebab mau bagaimanapun juga tatap muka secara langsung adalah cara paling nyaman untuk menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru/dosen.

Sisi baik dari pandemi Covid-19 dalam konteks pendidikan memberikan peluang kepada setiap individu khususnya peserta didik dan pengajar untuk bisa memahami kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 ini. Mau tidak mau semua orang dituntut agar bisa menggunakan dan mengetahui cara mengakses setiap bahan materi yang akan digunakan.

Seperti yang kita tahu, kemajuan berbagai macam teknologi ini sangat memudahkan kita dalam menjangkau segala aktivitas sosial. Sebagai contoh, kita tak perlu repot mondar-mandir kesana kemari untuk mencari tahu keberadaan sesorang, cukup dengan mengirim pesan pribadi melalui aplikasi jejaring sosial dan menunggu jawaban darinya, kita sudah bisa mendapatkan informasi tanpa harus menguras tenaga.

Begitu juga dengan pembelajaran daring ini, kita tidak perlu terburu-buru datang ke sekolah atau kampus agar tidak terlambat masuk kelas. Cukup dengan bersiap diri dan duduk manis di depan layar, login di virtual class, lalu memperhatikan penjelasan materi yang diberikan.

Hal ini memberi peluang bagi siswa/mahasiswa bahkan juga guru/dosen yang ingin mengembangkan potensi diri sembari mengisi waktu selama pandemi. Seperti bisnis online contohnya, yang bisa disambi setelah proses pembelajaran daring selesai. Dengan catatan tidak sampai terlena dengan kewajiban menuntut dan mengajar karena sibuk dengan bisnis online yang dijalani.

Kemudahan mengakses dan kemajuan teknologi juga membuka peluang bisnis bagi bimbingan belajar di luar sekolah atau kampus. Bagaimana tidak, di masa-masa seperti ini menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk meraup keuntungan lebih. Hanya membutuhkan kekreatifan untuk mengolah dan menciptakan cara atau trik cepat memahami suatu materi pelajaran akan menarik minat peserta didik untuk berlangganan dengan bimbel online tersebut.

Selain itu, pembelajaran daring ini telah berkontribusi kepada negara dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk membantu pemerintah menghambat penyebaran virus corona yang merebak ke seluruh wilayah Indonesia. Terlebih lagi bagi orang tua yang over protective terhadap anak-anaknya, khawatir jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mengingat sangat berbahaya dan mematikannya virus corona ini. [**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

KURIKULUM DARURAT DAN KUOTA INTERNET SAAT PJJ

Diah Purwitasari*

PANDEMI Covid-19 yang melanda belahan dunia menyebabkan perubahan dalam dunia Pendidikan. Beragamnya kondisi peserta didik baik dari segi sosial, ekonomi, akses teknologi dan kondisi wilayah sebaran pandemi membuat proses belajar dan kompetensi peserta didik menjadi bervariasi. pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilaksanakan selama ini dapat berakibat ketidaktercapaian belajar, kemampuan peserta didik dalam bidang akademik menurun serta ketimpangan pengetahuan yang semakin lebar antara wilayah yang aksesnya memadai dengan akses yang tidak memadai.

Sebagai ikhtiar untuk mengoptimalkan pembelajaran saat pandemi, terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Dalam pedoman ini, setiap satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik selama pandemi ini.

Kurikulum kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaannya dapat ; 1). Tetap mengacu pada kurikulum nasional , 2). Menggunakan kurikulum darurat atau 3). Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Namun, sebelum sekolah menetapkan kurikulum yang akan dipakai selama kondisi khusus ini, pendidik sebaiknya melaksanakan asesmen diagnostik kepada para siswanya. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efek pandemi terhadap siswa dalam mengikuti pelajaran. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi non kognitif dan kognitif peserta didik sebagai dampak dari pembelajaran jarak jauh. Pada asesmen non kognitif, pendidik dapat menggali kesejahteraan psikologi dan emosi peserta didik, aktifitas selama belajar di rumah, dan kondisi keluarga peserta didik.

Pendidik bisa meminta peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya melalui bercerita, menulis ataupun menggambar. Setelah itu pendidik dapat mengidentifikasi siswa yang mempunyai ekspresi negatif selama mereka melakukan pembelajaran jarak jauh untuk dilakukan treatment selanjutnya. Pendekatan secara personal kepada peserta didik ataupun orang tua sangat perlu agar ekspresi negatif ini hilang atau berkurang.

Pada asesmen kognitif, pendidik dapat mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata serta memberi kelas remedial atau pelajaran tambahan bagi peserta didik di bawah rata-rata. Pendidik terlebih dahulu mempersiapkan materi dan soal yang sesuai dengan tingkatan pembelajaran peserta didik lalu dilakukan asesmen.

Opsi Kurikulum

Kurikulum darurat saat pandemi yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga pendidik dan peserta didik dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Untuk modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip "Bermain adalah Belajar". Proses pembelajaran pada tingkat PAUD dilaksanakan saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari.

Sementara itu, untuk tingkat SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah diilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. Mendikbud juga menambahkan bahwa modul modul yang ada tersebut diharapkan akan mempermudah pendidik untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah.

Kuota Internet

Sejak pembelajaran jarak jauh dimulai, kuota internet merupakan hal ini yang paling dikeluhkan peserta didik. Berdasarkan survei KPAI, 43 % responden dari 1700 peserta didik yang mengikuti survei daring, mengeluhkan soal kuota internet. Selain itu keluhan yang sama juga dialami oleh para pendidik. Pendidik honorer adalah yang paling terkena dampak beban biaya kuota. Jika seorang pendidik honorer mempunyai dua atau tiga anak yang juga melakukan PJJ, maka biaya kuota yang harus ia keluarkan setiap bulannya pasti sangatlah besar.

Kemdikbud mengalokasikan Rp7,2 Triliun untuk bantuan kuota internet dari September hingga Desember 2020. Ada empat kelompok yang menerima bantuan tersebut : 1). Peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3). Pendidik PAUD dan jenjang Pendidikan dasar dan menengah, serta 4). Mahasiswa dan dosen.

Pemberian bantuan kuota data untuk keempat jenis kelompok ini masing-masing berbeda, yakni ; 1). Peserta didik PAUD) diberikan 20 GB, 2). Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai grup terbesar diberikan 35 GB, 3). Pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan 42 GB, 4). Mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB.

Adanya kurikulum darurat dan bantuan kuota internet diharapkan dapat mengurangi kendala pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, pendidik dapat terus meningkatkan kapasitas dalam melakukan pembelajaran interaktif dan sekolah dapat menfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.

Semoga kerjasama yang baik dari semua pihak dapat memajukan pendidikan di Indonesia yang masih dilanda pandemi. Inovasi dan kreatifitas dalam bidang pendidikan yang telah ada dalam situasi seperti ini hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Keinginan berbagai pihak agar pendidikan di Indonesia bisa menjadi yang terdepan bukanlah sebuah mimpi. Dengan usaha, kerja keras serta doa Insha Allah semua akan terwujud. [**]

*) Penulis merupakan Praktisi Pendidikan dan Alumni Pasca Sarjana UHAMKA Jakarta.

PROTOKOL KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

Dr. Su'id Saidi, M.Pd*

SURAT Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Mendikbud, Menkes, Menag dan Mendagri tentang panduan belajar tahun pelajaran 2020/21 dan tahun Akademik 2020/21 No: 01/KB. Thn 2020/21 merupakan upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan bangsa Indonesia. Dalam kondisi perkembangan pandemi Covid-19 yang tidak kunjung melandai, langkah pemerintah seperti ini akan efektif jika ada pemahaman dan kesadaran pribadi tiap-tiap warga dalam mematuhi apa yang telah menjadi keputusan bersama.

Jika masih ada pribadi/kelompok yang tidak mentaati protokol kesehatan dengan berbagai alasan, ditambah pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas maka upaya pemerintah dalam mengatasi Covid-19 tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Tidak adanya kesadaran inilah menjadi pemicu Covid-19 semakin meluas di Indonesia. Dan ini berakibat sangat fatal yakni menurunnya semua sektor, khususnya pada sektor ekonomi. Dan yang lebih memprihatikan adalah semakin banyak korban jiwa yang berguguran.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan apakah ini tanda bahwa kualitas berfikir masyarakat Indonesia rendah? Jika pertanyaan ini dilontarkan pasti banyak yang tersinggung. Maka dari sekarang mulai lah berubah. Jadilah pribadi yang memiliki kepedulian terhadap sesama.

Pendidikan menjadi salah satu jalannya. Pemerintah memperbolehkan sekolah yang berada di wilayah zona kuning melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka, dan tentunya harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam kegiatan belajar mengajar. Pada kesempatan inilah guru sebagai pendidik dapat memainkan perannya sebagai garda terdepan dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yakni mencetak genarasi yang peduli terhadap lingkungan. Langkah yang harus dilakukan guru menjadi sosok suritauladan kepada muridnya yakni disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Di lorong-lorong tempat lalu lalang orang, harus disiapkan tempat cuci tangan dan sanitizer untuk guru dan siswa, guru harus diperiksa kesehatannya/ memeriksakan diri kepada petugas kesehatan.

Ketika kita bicara tentang kesehatan guru, tentunya bicara tentang kesehatan rohani dan jasmani. Guru jangan merasa terancam batinnya dengan informasi perkembangan Covid-19, dan di saat melaksanakan tugas sebagai guru, guru dilengkapi alat pengeras suara pada saat mengajar dan tidak perlu mendatangi siswa dan tetap menjaga jarak, siswa tidak perlu bersalaman cukup dengan doa dan menjelaskan siswa terkait bersalaman dan menjaga jarak.

Masalah pendidikan merupakan unsur penting dalam kehidupan, sebab dengan pendidikan hidup kita akan lebih mudah serta dapat membedakan mana hak dan mana yang kewajiban. Dengan pendidikan kita mampu membentuk ahlaqul karimah yang baik dengan dengan pendidikan kita dapat mengembangkan karakter/jati diri sehingga tak mudah dijadikan media oleh bangsa lain untuk memenuhi keinginan mereka.

Kita mengenal pendidikan sejak terbentuknya janin dalam kandungan ibu dan dipertegas dengan sebuah ayat iqra' bismirabikal ladzi kholaq dan seterusnya. Pendidikan kita telah dipertegas oleh pemerintah melalui undang-undang dasar Republik Indonesia Pasal 31 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya," hal ini wujud tanggung jawab pemerinah terhadap proses berjalannya pendidikan.

Kita yakin dan menyadari bahwa pendidikan sangat penting bagi seluruh warga negara. Tetapi jauh lebih penting adalah kesehatan peserta didik. Maka itu berlangsungnya pendidikan pada zona kuning harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan jangan

sampai peserta didik lengah sedetikpun. Karena virus corona setiap detik mengancam kehidupan kita.

Tenaga Kependidikan

Dalam lembaga pendidikan tidak hanya mengenal sistem, tetapi juga sistem dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing guru. Ada siswa dan ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan hal penting dalam memperlancar tujuan pendidikan, oleh karena itu wajib dijaga dan dipertimbangkan kesehatannya dan memperhatikan protokol seperti menjalani rapid test dalam kurun waktu tertentu, berolahraga, dan menjaga imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi.

Pemerintah melarang belajar dengan tatap muka langsung pada zona merah, langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia khususnya pada lembaga pendidikan namun demikian karena pendidikan bagian dari kehidupan manusia yang tidak boleh berhenti sekalipun perkembangan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini namun pemerintah melalui peraturan Kemendikbud RI tetap mendorong pendidikan untuk berjalan terus baik dalam jenjang PAUD, SD, sampai Perguruan Tinggi.

Pola pendidikan yang digunakan adalah pendidikan Jarak jauh (PJJ) serta payung hukumnya jelas Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti secara tatap muka atau reguler, tentu saja pendidikan jarak jauh (PJJ) ddengan tujuan untuk memperluas akses serta mempermudah memberikan layanan pendidikan dan pelajaran khususnya dalam suasana perkembangan seperti pamdemi Covid-19 saat ini.

Pemerintah cukup adaktif dalam memberikan kesempatan pada pemerintah daerah menyusun kurikulum darurat sepanjang tetap merujukn pada kurikulum nasional. Penulis berharap pada pembaca agar dibalik musibah penyebaran pandemik ini dapat mengambil hikmah seperti menuntut kita untuk berubah pada hal-hal yang positif, contohnys guru mengajar yang biasanya dengan cara manual disuasana seperti ini berubah menjadi menggunakan sistem Dalam Jaringan (DARING), hal ini sesuai dengan Era Revolusi Industri 4.0 dan era disrubsi. Hikmah yang lain dengan penyebaran Covid-19 secara aspek sikologis orang tua siswa lebih menghargai pada tenaga pendidik, ternyata mengajar, mendidik dan melatih tidak semua orang mampu. Dalam kesempatan ini penulis berharap juga untuk mari kurangi budaya menyalahkan pemimpin mari kita pacu pola berpikir kita lebih positif, kreatif, inovatif, aktif dan mampu mengembangkan karakter dan dapat membentuk ahlaqul karimah. [**]

*) Penulis merupakan Dekan FKIP Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta)

SOLUSI PEMBELAJARAN PAUD SAAT PANDEMI

Elly Rianingsih*

WABAH Covid-19 telah lebih dari enam bulan melanda Indonesia. Hampir semua sektor kehidupan manusia terdampak langsung oleh wabah pandemi Covid-19, tak terkecuali bidang Pendidikan. Padahal tugas mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun dengan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan dan warga masyarakat.

Untuk itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, berbagai masukan dari para ahli dan organisasi serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB Empat Menteri, yakni Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkes, dan Kemenag, tentang panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan penyesuaian. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

Karena pada masa pandemi ini belum memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran secara normal, ratusan ribu sekolah terpaksa ditutup. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus korona. Ada sekitar 68 juta siswa melakukan kegiatan belajar dari rumah dan sekitar empat juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh. Semua itu agar proses belajar mengajar tetap bisa berjalan.

Dalam taklimatnya Mendikbud mengatakan, “Selama masa pandemi Covid-19 ini Kemendikbud juga menyusun Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR), dengan maksud untuk memastikan hak anak untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan; mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan Pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua wali”, ungkap Nadiem (Republika, 7/8).

Sebagai solusi pembelajaran jarak jauh bagi satuan PAUD, Kemdikbud telah menyiapkan sumber belajar bagi satuan pendidikan yang memiliki infrastruktur IT yang memadai dan bisa diakses oleh guru, orang tua dan peserta didik yaitu melalui Anggun PAUD, Sahabat Keluarga dan Rumah Belajar. Bagi yang tidak mempunyai akses daring, bisa melalui TVRI atau Radio Edukasi Balai Pengembangan Radio Pendidikan di Yogyakarta. Dan jika tidak ada akses keduanya maka satuan PAUD bisa melaksanakan pembelajaran melalui kunjungan rumah dengan catatan bahwa daerah tersebut tidak terkena penularan virus Covid-19 dan harus memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat.

Sesungguhnya pembelajaran jarak jauh ini merupakan tantangan bagi pendidik PAUD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Dalam hal rencana kegiatan pembelajaran, harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan peserta didik serta berisi dengan kegiatan yang menyenangkan. Karena pada dasarnya anak belajar melalui bermain.

Kegiatan Belajar Dari Rumah juga diharapkan mampu memberikan pelajaran yang bermakna bagi siswa, dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, dan aktivitas dapat bervariasi sesuai minat dan kondisi masing-masing tanpa membebani peserta didik dan orang tua. Hasil dari aktivitas belajar perlu diberi umpan balik dari pendidik yang bersifat kualitatif yang bisa bermanfaat bagi pendidik sendiri dalam melakukan evaluasi.

Ada banyak kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Belajar Dari Rumah antara lain kesulitan guru dalam mengelola Pembelajaran Jarak Jauh dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu di PAUD khususnya, beberapa kendala yang dihadapi oleh orang tua diantaranya adalah orangtua/Ibu yang bekerja, di mana pendidikan dalam keluarga belum maksimal, apalagi di era sekarang sebagian ibu yang memiliki anak usia dini adalah wanita bekerja.

Selain itu kendala yang lain meliputi keterbatasan fasilitas, ketidakmampuan penguasaan teknologi, orang tua tidak didesain menjadi guru dan kendala komunikasi dengan sekolah atau guru.

Untuk mengatasi kendala tersebut tentu saja pihak lembaga PAUD dan orang tua harus ada kesepakatan untuk bekerja sama yang meliputi ; Merencanakan program kegiatan BDR yang inovatif, dimana saat ini lembaga yang tidak mau mengikuti perubahan sama dengan mati, artinya lembaga tersebut akan kekurangan murid bahkan bisa dikatakan tidak mendapatkan murid. Kemudian memperbaiki komunikasi dengan orang tua murid, bisa dilakukan melalui parenting, webinar, bisa juga dilakukan melalui pesan singkat, pesan suara, video call, dan sebagainya.

Untuk mendukung adanya kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh selama pandemi Covid-19 di satuan PAUD, pemerintah memberikan honor bagi pendidik PAUD, subsidi untuk pembelian paket quota internet bagi guru melalui dana BOP PAUD dan bagi orang tua peserta didik, dengan catatan nomor aktif dan sudah terdaftar di dapodik. Sehingga diharapkan membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh.

Itulah beberapa solusi yang diberikan pemerintah agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Tentu kita semua berharap wabah pandemi Covid-19 segera berlalu. Sehingga proses belajar mengajar di PAUD dapat berjalan normal kembali. Sehingga guru dan siswa dapat bertemu di kelas/sekolah kembali. Semoga. [**]

*) Penulis merupakan Ketua HIMPAUDI Klaten

ANAK, PANDEMI DAN KREATIVITAS SEKOLAH

Arif Yudistira*

"DUH, Pak, tolong maklumi Ihsan Pak, baru lima menit belajar daring, anaknya sudah bermain sama temannya". Itulah tadi sekilas keluhan orangtua saat menghadapi pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 ini. Tidak dipungkiri, belajar daring memang amat berbeda dengan belajar secara tatap muka. Namun belajar daring adalah salah satu strategi yang terpaksa ditempuh untuk menyelamatkan nasib mereka.

Nyawa anak-anak kita menjadi jauh lebih penting ketimbang memaksakan diri untuk belajar dengan tatap muka (luring). Menurut data terbaru resmi dari IDAI pada anak 0-17 tahun hingga 15 juni tercatat 3064 anak terkonfirmasi Covid-19, dan 28 orang diantaranya telah meninggal dunia.

Sampai saat ini kebijakan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuka kembali tahun ajaran baru dengan penerapan pembelajaran sistem daring, luring maupun elaborasi dari keduanya dengan mempertimbangkan zona hijau, kuning, maupun merah. Kebijakan itu ditempuh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penularan Covid-19 lebih masif. Kebijakan pendidikan di masa daring ini memang cenderung tidak tersistem, terstruktur dan rapi. Banyak kritikan ditujukan kepada Kemendikbud mengenai alternatif pembelajaran daring.

Pembelajaran daring memang merupakan kebiasaan baru di era pandemi ini. Sayangnya, kebijakan daring ini masih belum beres dari sisi tuntutan efektifitas pembelajaran dengan sarana pembelajaran. Guru dan sekolah dituntut untuk efektif menyampaikan materi belajar dan juga memiliki metode semenarik mungkin di mata siswa.

Namun sayang, sekolah dan fasilitas yang dimiliki belum efektif untuk mendukung pola pembelajaran daring. Di daerah Indonesia Timur saja seperti Maluku, Papua, maupun Kalimantan belum sepenuhnya memiliki jaringan listrik terlebih internet. Mereka dituntut untuk belajar dengan metode daring, namun fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan untuk menopang pembelajaran daring belum sepenuhnya lengkap, bahkan belum ada.

Anak di masa pandemi memang menjadi korban yang rentan secara psikis maupun secara fisik. Mereka dihadang oleh bahaya covid yang setiap saat bisa menyerang. Mereka juga dihantam betapa menjemukan dan menjenuhkan belajar secara daring. Di hadapan ponsel pintar mata mereka dipaksa untuk berjam-jam menyimak pembelajaran melalui ruang digital.

Tubuh yang tak bergerak, mata yang pedas, banyaknya tugas yang dibebankan kepada mereka kadang membuat anak-anak menjadi rentan stress dan terkena gangguan secara psikis. Anak-anak pada akhirnya memilih bermain dengan teman mereka. Bermain gobak sodor, petak umpet, sepedaan, layangan dan aneka permainan tradisional mereka. Ada satu sisi kebanggan yang kita rasakan selaku orangtua saat mereka seperti menemukan dunia mereka kembali setelah lama mereka tidak memeluknya.

Pandemi seperti sekarang ini justru seperti mengembalikan jiwa mereka yang natural. Jiwa yang merdeka, tertawa lepas tanpa memikirkan beban belajar di masa pandemi. Di siang hari, mereka harus menyimak materi melalui telepon pintar mereka dari bapak atau ibu guru. Sementara di malam harinya, mereka harus mengerjakan tugas yang ditinggalkan oleh bapak atau ibu guru mereka. Inilah realitas anak-anak kita di kala pandemi. Mereka nampak terbebani dengan tugas dan juga model pembelajaran yang tidak akrab dan bukan merupakan bagian keseharian mereka sebelumnya. Bukan pembelajaran yang menubuh di badan dan pikiran mereka. Namun hal ini tetap dipaksakan karena situasi pandemi yang kian parah korbannya.

Dari sisi kebijakan pendidikan, pemerintah baru saja mengeluarkan kurikulum darurat yang memberikan sedikit angin segar bagi guru dan sekolah. Salah satu angin segar itu adalah pengurangan beban materi ke anak didik kita, serta keluwesan dalam penilaian belajar di kala pandemi. Kurikulum ini harus disikapi secara arif, pada satu sisi kita memang tidak boleh terlalu menuntut kemampuan akademik siswa, di sisi lain, kita juga memberikan bekal kepada mereka anak didik kita agar memiliki kecakapan umum seperti matematis, logis maupun bahasa.

Salah satu komponen penting dalam pembelajaran yang mungkin agak terlewat di masa pandemi ini adalah bagaimana mengontrol dan mendidik siswa dalam pendidikan karakter. Sebelum pandemi, anak didik kita bisa lebih mudah dan efektif menerima materi yang disampaikan guru berkaitan dengan pendidikan karakter. Melalui ragawi dan secara pikiran penuh konsentrasi mereka lebih kondusif. Sedangkan saat mereka di rumah, mereka kurang konsentrasi dan lebih tergoda untuk bermain tanpa kontrol. Pada aspek yang lain, orangtua bisa sibuk dengan pekerjaan rumah mereka, atau bekerja di kantor bagi orangtua yang berprofesi kantoran. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap intensitas penyerapan materi yang disampaikan guru berkaitan dengan pendidikan karakter.

Idealnya pendidikan karakter bisa didampingi lebih maksimal saat orangtua anak mendampingi mereka belajar dari rumah. Akan tetapi, pada kenyataannya, hampir 85% orangtua adalah pekerja. Ini memungkinkan anak lebih rentan dalam pengawasan dalam pembelajaran. Ada beberapa orangtua yang mensiasati situasi ini dengan membagi peran antara ayah dan ibu mereka. Namun, bagi yang orangtua yang

terpaksa harus bekerja untuk menopang perekonomian keluarga, pendampingan belajar kemudian menjadi sedikit terhambat. Orangtua mereka harus merelakan dirinya untuk menunda istirahat mereka di malam hari untuk belajar bersama anak mereka dengan menyimak ponsel pintar dan memantau materi dari sekolah.

Kreativitas Sekolah

Situasi pandemi ini mau tidak mau menuntut sekolah untuk cepat beradaptasi atau sebaliknya tertinggal dari perubahan yang cukup cepat dalam dunia pendidikan. Sekolah yang cepat beradaptasi, mereka tidak terlalu memikirkan kendala ekonomi sekolah, kendala prasarana, hingga hambatan belajar di masa pandemi. Sebab mereka memiliki studio dan aneka kelengkapan lain yang menopang pembelajaran daring mereka. Anak-anak bisa lekas beradaptasi karena terbiasa memakai telepon pintar.

Bagi sekolah yang tidak bisa mengikuti perubahan dalam situasi pendidikan seperti sekarang ini, mereka benar-benar harus menerima pukulan telak. Banyak sekolah terpaksa tutup karena murid dan sekolah tidak mampu beradaptasi. Inilah tantangan dari situasi pandemi saat ini. Para orangtua, murid maupun guru selaku elemen penting dalam dunia pendidikan, dipaksa harus menambah energi mereka untuk tertantang lebih inovatif, kreatif dan terus menjaga etos mereka. [*]

*) Penulis merupakan Kepala Sekolah SDIT Pelita Umat dan Penulis Buku Mendidik Anak-anak Berbahaya (2020)

MEMBURU SEKOLAH BERMUTU

Nafik Muthohirin*

SETIAP Juni-Juli adalah bulan pendaftaran peserta didik baru. Para orang tua mulai memburu sekolah-sekolah favorit. Tak hanya datang ke sekolah secara langsung, mereka sebelumnya juga banyak menggali informasi melalui internet. Bahkan, di era yang semakin terkoneksi dengan dunia maya ini, orang tua dan calon peserta didik juga bisa mendaftar ke sekolah pilihannya secara daring (dalam jaringan).

Kesibukan memasuki tahun ajaran baru dirasakan para orang tua dan calon peserta didik. Hal ini karena mereka mempunyai pilihan atau tujuan sekolah sendiri. Pilihan sekolah tersebut sangat besar dipengaruhi oleh teman, dorongan keluarga, atau juga kemauan anak yang sudah tak nyaman lagi bersekolah di sekolah sebelumnya. Keinginan anak-anak untuk mencari sekolah baru meliputi berbagai pertimbangannya sendiri.

Menentukan sekolah bermutu tidak semudah memilih SMA atau lembaga pendidikan sederajat lainnya. Sebelumnya, pihak orang tua perlu membekali dirinya dengan pengetahuan awal mengenai sekolah yang akan dipercaya mendidik anak-anak mereka. Pada tahap ini, memilih sekolah merupakan keputusan yang gampang-gampang susah, apalagi untuk masuk ke jenjang SD. Setiap sekolah di level ini menawarkan beragam fasilitas dan capaian prestasi luar biasa, meski kadang diiringi dengan biaya yang super mahal.

Anak-anak yang baru mau masuk sekolah, entah mau naik ke tingkat SD, SMP atau SMA, orang tua perlu mempersiapkan keuangan yang tidak sedikit. Ada banyak persiapan yang perlu dianggarkan, mulai dari kebutuhan memiki sepatu, tas, buku dan seragam yang baru, hingga siap-siap membayar uang masuk sekolah. Sayangnya, kebutuhan tersebut terkadang tidak diiringi dengan kekuatan anggaran dana keluarga.

Akibatnya, seringkali kita mendengar perbincangan para orang tua yang kerap menyoal mahalnya biaya masuk sekolah favorit. Mereka harus benar-benar irit mengatur keuangan keluarganya. Namun, apapun akan dilakukan para orang tua supaya anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan yang layak, terutama masuk di sekolah-sekolah bermutu.

Sehingga, pelbagai persiapan diatur, mulai dari menyiapkan keuangan yang cukup hingga belajar yang tekun agar bisa lolos ujian masuk. Sebab akan menjadi kemewahan tersendiri bagi mereka yang nantinya lolos tes seleksi masuk sekolah unggulan.

Musim perburuan sekolah bermutu seharusnya tidak dibarengi dengan tindakan sebagian pihak yang menjadikan kesempatan ini sebagai lahan bisnis. Dengan menawarkan jaminan diterima dan memberikan sejumlah uang tertentu seakan menjadi 'obat' keraguan dari ketidaklulusan seleksi. Apalagi dengan gaya "memaksa" sebagian pihak memanfaatkan label sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) untuk meninggikan biaya sekolah. Padahal sebenarnya kualitasnya tak sebanding dengan biaya yang dijejalkan.

Kesempatan tersebut semakin marak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bahkan parahnya, ada sekolah yang secara sistematis hanya mengedepankan pelabelan atau simbolisasi bertaraf internasional guna dilirik para orang tua, sementara peserta didik tidak pernah ditekankan pemakaian bilingual.

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas tidak harus meninggikan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas sekolah dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pencapaian prestasi.

Sekolah Bermutu

Siapa yang tidak ingin merasakan pendidikan di sekolah bermutu. Selain fasilitas sekolah yang lengkap, sudah barang tentu kualitas pendidiknya pun tak diragukan. Biasanya, sekolah bermutu hanya ditempati peserta didik yang mempunyai intelegensi lebih tinggi dari anak-anak biasa atau paling tidak sekolah ini ditempati oleh kalangan yang mempunyai modal lebih. Sementara, tidak banyak anak yang berasal dari kalangan miskin yang bisa ikut merasakannya.

Sepintas, jika dilihat secara fisik semata, semua itu merupakan kelebihan yang mungkin saja dipilih para calon orang tua peserta didik. Tetapi benarkah semua hal tersebut merupakan indikasi bahwa sekolah yang bersangkutan bermutu baik. Masih adakah sekolah yang lebih mementingkan substansi daripada keelokan fisik saja.

Edward Sallis (2006) mengidentifikasi beberapa ciri sekolah bermutu di antaranya yaitu: Pertama, sekolah tersebut memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk

mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang; Kedua, sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya; Ketiga, sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.

Para orang tua hendaknya berfikir lebih jeli dan berupaya menegenali lebih dahulu sekolah yang ingin dipercayakan mendidik putra-putrinya. Jangan sampai tertipu dengan penampilan fisik sekolah yang tampak megah dan berlabel internasional, sementara aspek kualitas pengajaran dan orientasi perkembangan anak didik diabaikan.

*) Dosen Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

MENJAGA KETAHANAN DALAM NORMAL BARU

Nafik Muthohirin*

DALAM sebuah perbincangan di grup WhatsApp dosen yang saya ikuti, sejumlah pendidik yang umumnya berbasis di perguruan tinggi swasta (PTS) mengeluh tentang pengetatan anggaran yang dilakukan pengelola kampus mereka. Sebagian khawatir gaji mereka tidak akan terbayarkan sebagaimana mestinya, sementara sebagian yang lain berpikiran akan terjadi pemutusan kerja jika penularan Covid-19 tidak segera berakhir hingga beberapa bulan ke depan.

Bagi sejumlah kampus besar yang memiliki kapital cukup, persoalan keuangan ini bisa disiasati, misalnya, dengan pengetatan anggaran. Tetapi beda nasib dengan ratusan PTS –jumlah mahasiswa maksimal 2.500 orang- yang tidak memiliki tabungan (saving), dan benar-benar hanya mengandalkan SPP mahasiswa. PTS-PTS ini akan tercekik bila pemerintah tidak segera memberikan jalan keluar.

Jika pada awal kemunculan Covid-19, beberapa perguruan tinggi gagap menghadapinya, maka di masa kenormalan baru ini, hendaknya para stakeholder pendidikan di dalamnya bisa lebih beradaptasi. Era normal baru perlu disikapi positif dengan berinovasi di segala aspek pendidikan. Inovasi ini tak hanya bertujuan menjaga ketahanan sektor keuangan, tapi juga mencoba bangkit dari kekacuan implementasi pembelajaran dalam jaringan (daring) yang berjalan sebelumnya.

Siasat bertahan di era kenormalan baru ini, menurut hemat penulis ada dua, yaitu; Pertama, yang paling kontekstual untuk dilakukan sekarang adalah berinovasi dalam hal perekrutan calon mahasiswa baru. Musim pendaftaran mahasiswa baru saat ini "beriklim" beda karena bertabrakan dengan serangan pagebluk yang merajalela.

Karena hal tersebut, tak sedikit pengelola perguruan tinggi yang khawatir akan terjadinya penurunan perolehan mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru merasa sulit membayar uang kuliah yang selangit, ditambah lagi pendapatan orangtua yang mengalami ketidakpastian, sehingga menunda daftar kuliah adalah pilihan yang mungkin diambil.

Pada tahap ini, PTN dan PTS akan semakin bersaing ketat dalam menarik calon mahasiswa baru. Karena itu, inovasi perekrutan calon mahasiswa baru dapat dilakukan sekreatif mungkin, melalui media-media alternatif dan relevan dengan kebutuhan generasi milenial, serta memberikan beberapa skema akses beasiswa yang mungkin bisa mereka ambil di kemudian hari.

Kedua, inovasi dalam implementasi pembelajaran daring adalah kemutlakan saat ini. Tanpa berinovasi pada sisi ini, alih-alih menerapkan pembelajaran berbasis jaringan, yang terjadi justru membebani mahasiswa dengan tugas berlipat. Sangat mungkin perguruan tinggi telah mengharuskan dosen mengajar on line, tapi apakah mereka tidak kesulitan menjalankannya. Apalagi, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan mahasiswa mengalami kejenuhan.

Inovasi pembelajaran daring tersebut penting agar tidak terbesit dalam pikiran mahasiswa untuk mengambil cuti semester akibat beban tugas kuliah yang berlipat, komunikasi on line yang menjenuhkan, dan pola pengajaran yang tidak didapati aspek pembentukan sikap, di samping karena faktor utama mereka tengah mengalami kesulitan membayar SPP.

Era normal baru ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi dengan menjanjikan keberlangsungan proses pembelajaran on line dan off line secara kreatif dan terukur. Melalui pembelajaran jarak jauh, model dan instrumen pembelajaran hendaknya dilakukan dengan berbagai metode blended learning dengan memperhatikan keaktifan mahasiswa. Sementara jika di masa normal baru ini nantinya pembelajaran melalui tatap muka sudah bisa diberlakukan, maka perguruan tinggi perlu memprioritaskan pentingnya keamanan dan protokol kesehatan ketat di ruang kelas dan lingkungan kampus lainnya.

Jaminan keamanan dan perlindungan kesehatan dari ancaman pandemi merupakan siasat menjaga keberlangusngan proses belajar-mengajar di tingkat perguruan tinggi agar mahasiswa tidak berfikir untuk mengambil cuti semester, sehingga mereka dapat belajar kembali di kampus dengan kenormalan yang baru.

Beberapa skema antisipasi di masa normal baru yang bisa dilakukan perguruan tinggi supaya proses pengajaran dan pembelajaran tetap berlangsung, di antaranya dengan memberlakukan sistem shift sesuai jumlah kelas, mengurangi kapasitas jumlah mahasiswa di dalam kelas, menata kursi kelas dan tempat-tempat umum sesuai protokol kesehatan, serta membagi kelas perkuliahan yang seimbang antara pembelajaran on

line dan off line sehingga bisa mengurangi intensitas mahasiswa ke kampus dan berkerumun dengan teman-temannya. Sementara, untuk berbagai kegiatan lain yang melibatkan massa dalam jumlah besar seperti seminar dan pelatihan tetap bisa dilangsungkan melalui komunikasi virtual (webinar).

Berbagai siasat di tengah kenormalan baru tersebut semata-mata menjaga ketahanan sektor pendidikan tinggi nasional agar tidak semakin terbengkalai akibat Covid-19. Apalagi, hingga sekarang, belum ada satu negara pun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Sebab itu, jika tidak ada inovasi dan menyikapi positif terhadap kenormalan sosial yang baru ini, sangat mungkin dunia pendidikan akan mengalami masa keterpurukan yang panjang.

*) Dosen Pendidikan Agama Islam | Universitas Muhammadiyah Malang

PPDB, SEKOLAH DAN UJIAN PEDAGOGI HUMANIS

Nazhori Author*

PARA orang tua mulai risau, apakah di tahun ajaran baru ini dapat menyekolahkan dan menguliahkan anak-anaknya dalam situasi yang tak pasti. Bagi keluarga yang mampu juga tak seutuhnya ingin menyekolahkan anaknya dengan penuh risiko. Apalagi dengan keluarga yang terpuruk secara ekonomi, yang kali ini diimpit persoalan pendidikan.

Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai kejadian luar biasa, pendidikan termasuk salah satu aspek kehidupan yang merasakan dampak besarnya. Kegiatan belajar-mengajar tak lagi tatap muka, semuanya dialihkan dengan metode online. Aktivitas pedagogis dilakukan di rumah (study from home). Tugas, ujian, pengumuman dan penerimaan siswa baru dilakukan secara online.

Memasuki perkembangan berikutnya, kebijakan protokol kesehatan yang dikemas dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan secara ketat pada gilirannya mengalami perubahan dalam bentuk relaksasi dengan pendekatan new normal. Diharapkan dengan pendekatan tersebut meski rentan terjadinya risiko, ada aktivitas masyarakat yang dapat dilakukan untuk menggerakan kembali roda ekonomi dan aktivitas lainnya dengan standar kesehatan.

Kendati tujuannya untuk menghidupkan kembali elan vital yang selama ini meredup, namun kelenturan seperti itu menyisakan kerisauan khususnya dalam dunia pendidikan. Apakah orang tua siap melepaskan anak-anaknya ke sekolah dalam situasi yang berisiko ini. Di satu sisi Negara berkewajiban melaksanakan amanah undang-undang pendidikan, di sisi lain berkewajiban melindungi warga negaranya.

Pembukaan Sekolah

Bercermin pada kondisi itu, pada 20 Mei 2020, melalui siaran persnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, berupaya mencari jalan keluar dengan skenario yang ada. Pembukaan kegiatan belajar-mengajar beserta metodenya disesuaikan dengan dengan pertimbangan gugus tugas. Nadiem Makarim menekankan bahwa berdasarkan pertimbangan, keputusan tersebut telah dikoordinasikan dengan gguus tugas percepatan penanganan virus, bukan sepihak Kemendikbud dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Jelas bahwa keterangan Kemendikbud untu menjawab rumor yang beredar di tengah masyarakat berkenaan dengan kabar Kemendikbud akan membuka sekolah di tahun ajaran baru di bulan Juli. Yang menarik dalam siaran pers-nya, “Kemendikbud menilai saat ini tidak diperlukan adanya perubahan tahun ajaran maupun tahun akademik. Tetapi metode belajarnya apakah belajar dari rumah atau sekolah akan berdasarkan pertimbangan gugus tugas,” jelas Mendikbud.

Berpijak dari skenario Kemendikbud di atas, sekurangnya ada dua hal yang dapat dibicarakan. Pertama, sikap kritis perlu didedahkan sekaligus menjawab rumor bahwa kembali ke sekolah bermakna pendekatan belajar-mengajar yang penting dipikirkan agar guru dan peserta didik tetap nyaman dan aman berinteraksi baik di rumah atau di sekolah dengan catatan pertimbangan gugus tugas. Dengan demikian keprihatinan bersama ini melekat dalam aspek pedagogis. Namun, yang perlu mendapat catatan penting adalah tidak semua peserta didik jika dilakukan dengan metode online di rumah dapat mengakses kegiatan belajar-mengajar secara online mengingat faktor ekonomi dan geografis yang berbeda-beda.

Kedua, jika dilakukan kebijakan kembali ke sekolah dengan metode tertentu, atas pertimbangan kesehatan, maka pemerintah harus menyelamatkan kepentingan manusia di atas kepentingan lainnya dengan tetap menggerakkan spirit pedagogis agar penolakan-penolakan yang datang dari suara masyarakat dapat dijawab dan dipertanggungjawabkan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Karena itu dari dua hal ini, masyarakat mendapat informasi yang jelas termasuk di dalamnya informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilaksanakan di setiap daerah dengan senantiasa mempertimbangkan otoritas pemerintah daerah dalam bidang pendidikan sehingga ada regulasi yang memudahkan ikhtiar tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan nilai-nilai pedagogis di tengah wabah pandemi.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2019, bahwa PPDB dilakukan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Keterbukaan terhadap informasi ini juga senafas dengan prinsip pendidikan untuk semua (education for all) yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia yang telah dijamin dalam konstitusi negara sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945.

Ujian Pedagogi Humanis

Kebijakan pedagogis yang dikeluarkan pemerintah tak akan bermakna jika persoalan pendidikan dan kemanusiaan tak tersentuh. Dalam situasi pandemi, terlihat dengan jelas bahwa persoalan kemiskinan tak dapat diabaikan sebagai ujian pedagogi humanis. Hilangnya sumber-sumber pendapatan ekonomi suatu keluarga imbas dari Covid-19 berdampak dengan seberapa mampu para orang tua menyekolahkan anak-anaknya.

Mereka yang dari keluarga tidak beruntung, tetap sebagai gambaran kaum terpinggirkan yang sulit mengakses hak-hak pendidikan. Kemurahan hati untuk membebaskan mereka yang terpinggirkan dari bencana ini tentu bukan semata-mata tugas pemerintah, tapi tugas setiap insan yang tidak menyangkal bahwa dirinya sebagai makhluk pedagogis yang membutuhkan ruang dialogis untuk saling mendengar dan memahami tentang sikap dan pengharapan sebagai manusia yang realitasnya bukan makhluk yang telah selesai.

Untuk itu, menghayati kembali pedagogi humanis adalah jalan menuju terbukanya kesadaran kolektif menumbuhkan rasa saling percaya, cinta-kasih dan kepedulian terhadap sesama. Bila kesadaran kolektif ini dapat tersajikan, kodifikasi informasi dengan sendirinya dapat disebarluaskan meski dalam situasi yang penuh risiko agar literasi pedagogis masyarakat tumbuh dan mampu menjawab dampak virus corona yang membatasi kreativitas manusia. [*]

*)Penulis merupakan Dosen AIK di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHAMKA

PPDB DAN PENCEGAHAN COVID-19

Mustofa*

MEMASUKI tahun ajaran baru 2020/2021, semua sekolah telah mulai melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tata cara penerimaan siswa baru tahun ini berbeda dengan tahun ajaran baru sebelumnya, yakni secara daring, langsung atau gabungan keduanya. Hal ini akibat pandemi Covid 19, sehingga jika pendaftaran secara langsung harus sesuai dengan protokol kesehatan; jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan menghindari kerumunan.

Pemerintah Daerah dan sekolah mesti merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dalam pelaksanaan PPDB harus ada petunjuk yang benar-benar jelas, dan mudah dipahami dalam tata cara pendaftaran. Tujuannya agar orangtua dan siswa tidak mengalami kesulitan saat mengikuti proses pendaftaran.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan aturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru saat terjadinya wabah Covid 19 dan mengharapkan dilaksanakan secara daring/online. Untuk itu ada berbagai syarat baru masuk sekolah, mulai PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019.

Pada tahun ajaran 2020/2021, ada empat jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB), yakni: pertama jalur zonasi, penerimaan calon siswa yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dari sekolah. Kuotanya minimal 50% dari daya tampung sekolah. Pada jalur zonasi, sekolah juga wajib menerima siswa yang tidak mampu dan penyandang disabilitas.

"Zonasi sangat penting untuk mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik. Selain itu, menitikberatkan peran dan komposisi guru di suatu daerah," kata Mendikbud Nadiem Makarim, (20/5) di Jakarta.

Kedua, jalur afirmasi yang ditujukan bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Pada jalur ini tidak lagi pakai syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tapi cukup melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kuota penerimaan siswa melalui jalur afirmasi minimal 15% dari kapasitas sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan jumlah kuota yang disediakan maksimal 5% dari kapasitas sekolah. Ini khusus siswa yang harus pindah tempat tinggal karena orangtua atau walinya dipindah tugas ke daerah lain.

Keempat, jalur prestasi. Siswa berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri favorit, dapat menggunakan jalur prestasi. Syaratnya melampirkan hasil UN atau USBN, penghargaan di bidang akademik dan non-akademik, baik tingkat nasional maupun internasional. Kuota penerimaan siswa di jalur ini maksimal 30%. Semua aturan tersebut, disusun guna mempermudah para orang tua siswa untuk mencari sekolah yang diinginkan.

Kewenangan Pemerintah Daerah

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, suku, kepercayaan, agama, bahasa, kuliner, kesenian, dan sebagianya. Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, maka diberlakukan Otonomi Daerah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Isinya antara lain tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan bidang Pendidikan.

Pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah Propinsi. Namun, dalam realitasnya, antara satu daerah dengan lainnya berbeda, yang disebabkan oleh beberapa beberapa faktor ; 1). Letak daerah seperti kota dan desa, 2). Kondisi masing-masing daerah kepulauan, 3). Perbedaan kondisi alam, 4). Sarana transportasi dan komunikasi, 5). Infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas sekolah, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota harus menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan zona, kuota serta tata cara PPDB jika dilaksanakan secara daring maupun langsung sesuai protokol kesehatan. Sebab, Pemerintah Daerah lebih tahu mana wilayahnya yang masuk zona merah, kuning atau hijau. Sehingga keselamatan pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama.

Kebijakan PPDB setiap daerah sangat mungkin untuk berbeda, tetapu acuanya haruslah sama, yakni Permendikbud. Sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara nasional.

Dalam pelaksanaannya harus tetap mengakomodir semua lapisan, tidak diskriminatif, ramah, serta memberi pelayanan terbaik bagi orang tua dan siswa untuk mengakses informasi secara lengkap.

Hal ini agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan tetap menjaga keselamatan seluruh stakeholder pendidikan. Wallahualam. [*]

*) Pendidik pada SMP Muhammadiyah 02 Comal Pemalang, Jawa Tengah.

MERDEKA BELAJAR DENGAN MENCINTAI BUKU

SETIAP 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Momen bersejarah itu bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Namun, sejumlah data menunjukkan masih perlu diperbaikinya dari segi literasi bagi warga bangsa Indonesia. Menurut data Most Littered Nation In the World yang dikeluarkan UNESCO tahun 2016, minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara.

Seperti diketahui salah satu indikator yang menjadi acuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah Programme for International Student Assessment (PISA). PISA sebagai metode penilaian internasional merupakan indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, peringkat nilai PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 adalah: Membaca (peringkat 72 dari 77 negara), Matematika (Peringkat 72 dari 78 negara), dan Sains (peringkat 70 dari 78 negara). Nilai PISA Indonesia juga cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penggantian Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum, yang nantinya akan berfokus pada literasi, numerasi, pendidikan karakter.

"Mungkinkah ini kesempatan untuk mengejar konsep-konsep mendasar yang tadinya tertinggal. Daripada kejar tayang semua topik. Mungkin ini kesempatan emas untuk menguatkan konsep-konsep fundamental yang mendasari kemampuan murid-murid untuk bisa sukses di mata pelajaran apa pun. Contohnya seperti literasi, numerasi, pendidikan karakter," ungkap Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Beranjangsana ke generasi zaman pergerakan tempo dulu. Ibarat makanan, buku adalah kebutuhan. Lewat asupan literatur, pemikiran mereka menghasilkan ide untuk berjuang dan merdeka. Beberapa tokoh bahkan dikenal sebagai bibliofil alias pecinta buku. Seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, Natsir sebagai contoh teladan baik.

Mari teladani praktik baik para bapak bangsa yang merupakan para bibliofil dan raihlah Merdeka Belajar dalam keseharian.

PEDULI KITA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

MAKNA kemerdekaan Indonesia sudah selayaknya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat nusantara. Pun begitu di ranah pendidikan. Terlebih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memperkenalkan istilah Merdeka Belajar. Tentu kita berharap hal tersebut tak sekadar jargon, melainkan mewujud dalam kenyataan.

Merdeka Belajar pun sudah selaiknya dinikmati oleh para penyandang disabilitas. Mereka dapat menempuh jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) ataupun sekolah inklusi – jika merujuk Wajib Belajar 12 tahun. Tak berhenti sampai di situ, Perguruan Tinggi tentunya diharapkan dapat mereka rasakan juga, bagi mereka yang memilih untuk menempuh jalur ini.

UU Sisdiknas, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; sesungguhnya merupakan payung hukum yang cukup kuat bagi terwujudnya education for all – termasuk bagi para penyandang disabilitas.

Tentu untuk "bertenaga"-nya aneka peraturan perundangan tersebut membutuhkan political will secara penganggaran, serta masyarakat yang peduli. Jika tidak, peraturan perundangan tersebut hanya teronggok, tanpa realisasi. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, dalam hal ini para penyandang disabilitas pun berhak untuk mandiri, serta mengaktualisasikan potensinya.

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN TINGGI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (REFLEKSI HARI PENDIDIKAN)

Dr. Nurhidayat*

ADA dua persoalan mendasar yang dihadapi perguruan tinggi dalam situasi pandemi wabah covid-19 ini. Pertama covid-19 berdampak kepada persoalan ekonomi dan yang kedua persoalan pembelajaran.

Persoalan pertama begitu terasa bagi perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta. Data dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyebutkan 50 persen mahasiswanya tidak sanggup membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Perguruan tinggi swasta (PTS) yang merasakan langsung adalah perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa kurang dari 2.500 orang. PTS kategori ini jumlahnya sangat signifikan sekitar 75% dari jumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Mahasiswa yang kuliah pada PTS kategori ini mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu sehingga mereka tidak mampu membayar SPP, Padahal sumber pendapatan utama PTS tersebut berasal dari mahasiswa. Akibat mahasiswa tidak mampu membayar SPP ini tentu berdampak kepada biaya operasional PTS. Sehingga dengan kondisi ini banyak dosen PTS yang belum menerima gaji.

Persoalan ekonomi tersebut juga berdampak kepada persoalan kualitas proses pembelajaran. Dampak pemberlakukan social distancing atau physical distancing dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengharuskan dosen mengganti proses pembelajaran online (daring). Proses pembelajaran ini dibutuhkan biaya sementara kemampuan mahasiswa memiliki ketidakmampuan untuk membeli paket atau kuota pulsa. Sehingga pembelajaran daring bagi mahasiswa menjadi kendala bagi mereka.

Masalah lainya adalah bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi mereka mengalami kesulitan untuk melakukan riset lapangan dan kesulitan melakukan bimbingan. Sehingga mereka terhambat untuk lulus tepat waktu. Sehingga kondisi ini juga bisa menambah jumlah mahasiswa yang dropout.

Respon Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat beberapa regulasi yang mengatur persoalan di atas, antara lain Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar di Era Pandemi dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Program Pendidikan di Perguruan Tinggi harus mengedepankan prinsip memudahkan atau tidak mempersulit pembelajaran selama darurat Covid-19.

Surat edaran ini juga menyarankan kepada perguruan tinggi untuk memberikan subsidi pemberian kuota pulsa untuk mendukung pembelajaran daring. Beberapa perguruan tinggi sudah melakukan itu walaupun pelaksanaannya berbeda-beda dalam memberikan subsidi tersebut.

Selain itu, Kemendikbud dalam surat edaran ini meminta agar Perguruan Tinggi dapat melakukan upaya kreatif dalam rangka membantu meringankan beban mahasiswa dalam keterbatasan ekonomi. Misalnya subsidi pulsa, logistik, mobilisasi alumni menolong adik-adiknya, atau gotong royong dimana yang mampu menolong yang tidak mampu. Dengan demikian ciri khas masyarakat Indonesia, yakni semangat gotong-royong justru semakin kuat saat menghadapi pandemi ini.

Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar di Era Pandemi juga dijelaskan bahwa karya tulis akhir (skripsi) tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing. Dalam edaran ini juga menuntut Perguruan Tinggi untuk mengatur kembali jadwal dan metode ujian termasuk ujian skripsi dengan memerhatikan situasi dan kondisi di kampus.

Dalam Peraturan Pemerintan Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi pasal 15 dijelaskan bahwa ujian dapat diselenggarakan melalui dua mekanisme pertama ujian akhir program studi, dan kedua ujian skripsi. Dalam bidang bidang tertentu untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa melalui mekanisme ujian skripsi.

Jika menggunakan aturan ini jelas bahwa ujian skripsi itu bisa diganti dengan ujian lainya, peraturan ini berlaku dalam kondisi dan situasi normal. Sehingga dapat disimpulkan dalam situasi dan kondisi normal saja ujian skripsi itu bisa digantikan dengan ujian lain. Tentu hal ini sangat diperbolehkan dalam situasi dan kondisi saat ini. Hal ini juga diperkuat Kemendikbud memperbolehkan ujian akhir di tingkat perguruan tinggi seperti skripsi, tanpa riset ke lapangan. Kebijakan ini diambil, guna memudahkan mahasiswa di tengah ancaman wabah virus corona (Covid-19). Penyelesaian tugas akhir (Skripsi), mahasiswa bisa menggantinya dengan memperbanyak literatur atau metode lain.

Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan. Poin 1 edaran tersebut dimaksudkan bahwa Kemendikbud memberikan perlindungan bagi mahasiswa yang terancam drop out (DO) akibat terjadinya situasi darurat Covid-19 dengan pemberian kebijakan perpanjangan masa studi selama satu semester.

Bagi mahasiswa yang pada akhir semester (genap) ini terancam drop out (DO), diberikan kebijakan perpanjangan (masa studi) satu semester. Seperti mahasiswa S-1 angkatan 2013/2014 yg berakhir masa studinya di semester ini. Tetapi bukan berarti serta merta semua mahasiswa diperpanjang satu semester. Ini untuk melindungi yang akan DO, diberikan kesempatan perpanjangan satu semester.

Solusi Jangka Pendek

Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi antara lain, mengatur kembali jadwal (rescheduling) dan merubah metode berbagai ujian termasuk ujian skripsi, tentu dengan memerhatikan situasi dan kondisi di kampus masing-masing. Ujian bisa diganti misalnya dengan memberikan tugas. Merubah metode penulisan skripsi dari kuantitatif menjadi kualitatif atau kajian pustaka.

Perubahan metode dan rescheduling pada prinsipnya

sesuai dengan target capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadwal praktik bisa dilakukan secara online, ujian tengah semester dan ujian akhir semester bisa sesuaikan dengan kondisi dan situasi, begitu juga kalender akademik bisa disesuaikan. Tentu yang tidak boleh ditoleransi adalah mempertahankan kualitas pembelajarannya.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) bisa dengan KKN ekuivalensi yakni penilaian yang diberikan kepada mahasiswa dengan cara mengkonversi berbagai jenis kegiatan mahasiswa yang memiliki nilai yang sama dengan KKN. Kebijakan ini tidak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional.

Bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk ujian skripsi, perguruan tinggi bisa melakukan ujian skripsi dengan menggunakan ujian online menggunakan berbagai media yang dimiliki. Dengan otonomi yang dimilikinya, perguruan tinggi dapat memberikan fleksibilitas dalam menjaga kualitas lulusan dengan berbagai keterbatasan masing-masing perguruan tinggi.

Semua solusi jangka pendek yang tersebut bisa jadi alternatif pilihan bagi perguruan tinggi dalam rangka menjaga kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, sakaligus sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Selamat hari pendidikan. [*]

*) Penulis merupakan Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dai Ambasador Dompet Dhuafa, Sekretaris DPW IAEI DKI Jakarta dan Sekretaris DPW ADPISI Jabodetabek.

DANA BOS DAN COVID-19

Diah Purwitasari*

WABAH Covid-19 sudah memberi perubahan baru dalam sistem pengajaran pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang biasa digunakan kini beralih pada pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan belajar di rumah. Ujian Nasional yang rencananya akan dihapus tahun depan, akhirnya dihilangkan mulai tahun ini. Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penularan wabah Covid-19.

Perubahan sistem pembelajaran ini membawa tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Siswa harus mulai terbiasa menggunakan berbagai aplikasi online untuk menunjang kegiatan belajar. Bagi siswa yang masih berusia dini, peran serta orang tua dibutuhkan untuk membimbing dalam melakukan pembelajaran online di rumah. Guru juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran. Hal ini diperlukan agar siswa tidak bosan dan lebih bersemangat menggali potensi dalam belajar.

Namun masih ada berbagai kendala yang harus dihadapi dalam proses pembelajaran ini. “Pembelajaran jarak jauh di daerah tidak bisa maksimal karena keterbatasan sarana, tidak semua siswa mempunyai telepon selular berbasis android,” ujar Rahmat, Kepala Sekolah SMPN 1 Padaherang Pangandaran.

Kendala juga dirasakan oleh para guru. Pelaksanaan pembelajaran online yang dilakukan setiap hari memerlukan kuota internet yang memadai. Hal ini tentu saja membuat pengeluaran para guru menjadi bertambah banyak.

Fleksibilitas dana BOS

Untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. “Kami sudah memberikan arahan fleksibilitas kepada kepala sekolah, tetapi masih ada sejumlah kepala sekolah tidak percaya diri menerapkan. Makanya, kami cantumkan diperaturan yang artinya secara eksplisit diperbolehkan,“kata Nadiem Anwar Makarim, dalam telekonferensi daring, Rabu (15/4).

Dalam Permendikbud disebutkan bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana untuk pembiayaan langganan daya dan jasa. Yakni untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Hal ini tentu saja membantu para guru dan siswa yang membutuhkan data internet dalam proses pembelajaran jarak jauh. Selain itu, untuk menangkal wabah Covid-19, juga dapat digunakan untuk pembelian cairan pencuci tangan, desinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya. Pengadaan barang dan penunjang kebersihan ini sangat membantu dalam mengantisipasi penyebaran pandemi di sekolah dan sekitarnya.

Permendikbud Nomer19 Tahun 2020 juga memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah dalam menggunakan dana BOS regular untuk membayar honor guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Presentasenya juga tidak lagi maksimal 50 persen, tetapi bisa lebih. Syarat guru honorer yang mendapatkan dana BOS tersebut juga tidak harus guru yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Namun guru honorer tersebut harus tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa pandemi. Ketentuan ini berlaku mulai bulan April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kewenangan Kepala Sekolah dalam mengelola dana BOS perlu dilaksanakan dengan hati-hati. Harus cermat dalam menentukan skala prioritas penggunaan dana. Setiap sekolah tentu saja mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Namun penggunaan dana tetap harus berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fleksibilitas penggunaan dana BOS bertujuan untuk memberikan kenyamanan guru dan siswa di masa pandemi. Adanya bantuan ini dapat membantu kondisi ekonomi para guru honorer. Apabila kondisi ekonomi mereka stabil maka para guru dapat mengajar dengan tenang. Ketenangan tersebut dapat mendorong guru untuk lebih kreatif menggali ide dan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswanya. Jika siswa senang dalam menerima pelajaran maka diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal.

Apalagi dengan didukung oleh pembelian pulsa untuk data internet yang dapat semakin menunjang kelancaran proses pembelajaran. Selain itu bantuan sarana yang diberikan juga akan membuat sekolah menjadi lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi siswa, guru serta masyarakat sekitarnya.

Semoga fleksibilitas penggunaa dana BOS yang diberikan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga guru dan siswa bisa optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan terhindar dari wabah Covid-19. [*]

*) Penulis merupakan Praktisi Pendidikan dan Alumni Pascasarjana UHAMKA Jakarta

SEKOLAH PENGGERAK

BENTUK SISWA DAN PENDIDIK UNGGUL

CARA PANDANG
Inspirasi Terkini!

Program sekolah penggerak (SP) diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna mewujudkan pelajar berkarakter Pancasila dan tenaga pendidik unggul. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi hingga seluruh sekolah di Indonesia termasuk dalam upaya

INTERVENSI PROGRAM SP

PROGRAM SP 2021/2000

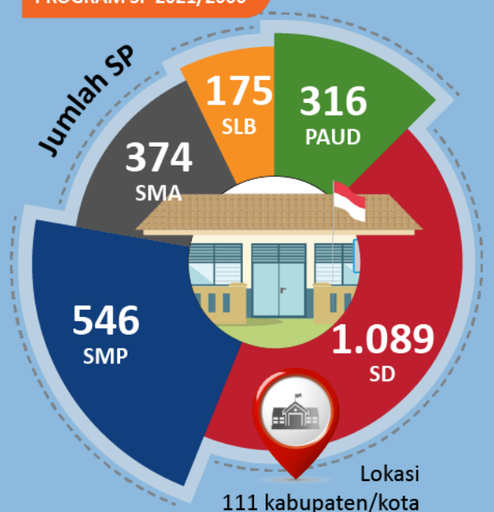

MANFAAT SP

BAGI SEKOLAH

- Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam waktu 3 tahun ajaran.
- Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.
- Percepatan digitalisasi sekolah.
- Percepatan mencapai profil pelajar Pancasila.
- Mendapat pendampingan intensif
- Memperoleh tambahan anggaran pembehan bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

BAGI PEMERINTAH DAERAH

- Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam waktu 3 tahun ajaran.
- Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru.
- Percepatan digitalisasi sekolah.
- Percepatan mencapai profil pelajar Pancasila.
- Mendapat pendampingan intensif
- Memperoleh tambahan anggaran pembehan bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

TARGET PELAKSANAAN SP

Jumlah kabupaten/kota	Tahun	
111	2021 -2022	2.500
250	2023 - 2024	10.000
514	2022 - 2023	20.000
514	2024 - 2025	40.000

> Sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang terdiri dari dua hal yakni sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dan diawali dengan SDM yang unggul terutama kepala sekolah dan guru.

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DATA: KEMENDIKBUD, ANTARA | RISET: TIM | GRAFIS: HENGKI | ILUSTRASI: SOKI

PROGRAM 'BELAJAR DARI RUMAH' MENJANGKAU SISWA LEBIH LUAS

PROGRAM 'Belajar dari Rumah' yang mulai tayang di TVRI sejak Senin (13/4/2020) hingga minimal tiga bulan ke depan, sedikit banyak memantik ingatan generasi 90-an terhadap Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di awal kelahirannya. Televisi memang memiliki daya jangkau begitu luas. Pun begitu melalui medium televisi, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diupayakan dengan lebih masif.

Pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kebudayaan) telah melakukan sejumlah langkah, diantaranya menggandeng pihak swasta dalam pembelajaran jarak jauh. Jika merujuk penjelasan Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri Faqih ternyata cakupan area pembelajaran daring itu hanya 80 persen wilayah Indonesia saja dan yang bisa mengakses ke platform daring itu hanya 35 persen.

"Jadi sekitar 65 persen sekolah belum bisa dilayani platform pembelajaran daring itu. Sekali lagi ini pun gratis ya, bukan berbayar. Nah, kemudian DPR mengusulkan kepada Kemendikbud untuk menggandeng TVRI. Alhamdulillah mulai tanggal 13 April ini sudah dimulai," jelas Fikri seperti dilansir Antara.

"Program Belajar dari Rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat Covid-19, khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis," disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dalam telekonferensi Peluncuran Program Belajar dari Rumah di Jakarta, pada Kamis (9/4/2020).

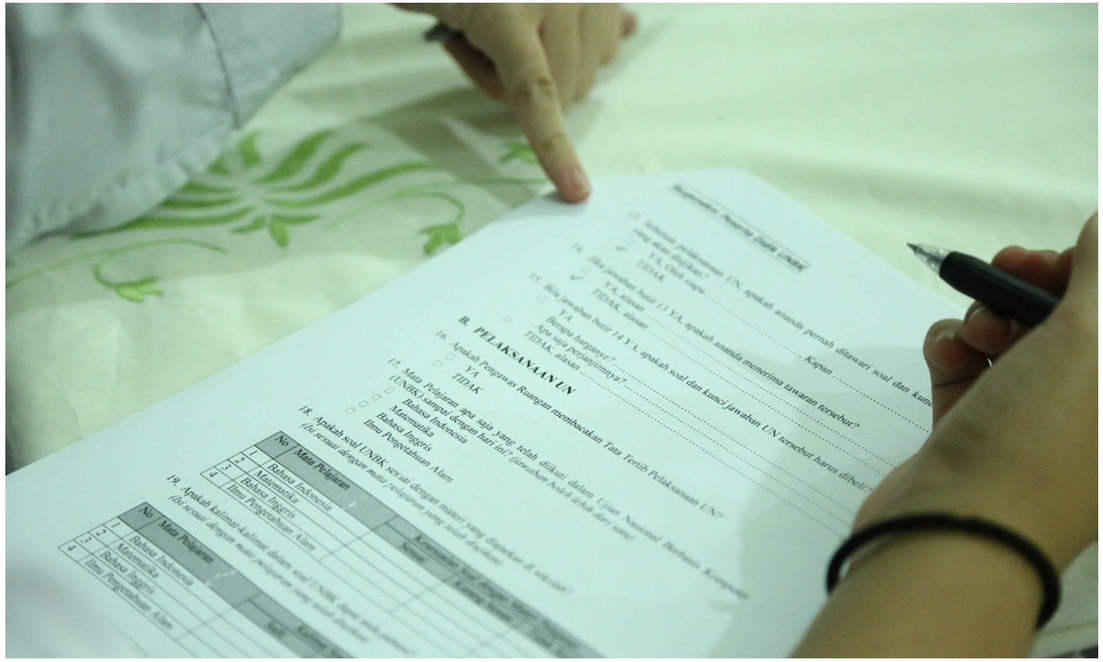

BEKERJA DARI RUMAH DAN BELAJAR DARI RUMAH

DALAM sebuah kartun Majalah Tempo dengan kocak dan bernas menjelaskan keadaan pekerja yang menjalani bekerja dari rumah/ work from home (wfh). Terlihat sang ayah sedang membantu memasak, sambil berkata siap terhadap pekerjaan yang diminta oleh bos. Terlihat juga dalam kartun tersebut salah seorang anak sedang belajar di dapur.

Perkara bekerja di rumah dan belajar di rumah memang menghadirkan kerumitan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan beberapa variabel, di antaranya guru yang belum siap dengan pembelajaran jarak jauh. Muaranya dapat mengakibatkan tugas bertumpuk bagi siswa. Orang tua pun kelimpungan dikarenakan membantu pekerjaan rumah (PR) siswa, sembari di sisi lain dikejar deadline pekerjaan. Bahkan orang tua yang secara umur lebih senior dan memiliki pengalaman lebih banyak, bisa mengernyit melihat deretan pertanyaan dalam tugas-tugas sekolah tersebut.

Kemendikbud untuk kemudian memang memberikan arahan selama masa pagebluk ini, agar para guru memberikan pembelajaran bermakna. Namun, akankah imbauan itu tersosialisasi serta dapat dilakukan dengan baik?

Jika dipandang dari sisi positifnya, semoga setelah segala hiruk pikuk pandemi ini, para orang tua dapat lebih empati terhadap guru dan lebih peduli terhadap pendidikan anaknya. Bukankah tri pusat pendidikan (sekolah-keluarga-masyarakat) berperan dalam menentukan kecerdasan dan karakter anak?

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DI TENGAH PANDEMI

PANDEMI Covid-19 menimbulkan dampak sistemik. Salah satu lini yang terimbas adalah pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut. Dalam hal informasi dan edukasi diluncurkan 'Bersama Hadapi Korona'. Di sana terdapat sejumlah kebijakan Kemendikbud serta sejumlah materi interaktif guna bersiap menghadapi pagebluk Covid-19.

Untuk urusan kegiatan belajar mengajar, setelah sejumlah pemerintah daerah mengharuskan siswa tak masuk sekolah, maka proses belajar dari rumah menjadi titik fokus. Kemendikbud menggandeng sejumlah mitra swasta untuk memberikan layanan belajar daring secara gratis. Kemendikbud melalui lini Rumah Belajar juga melakukan pembelajaran jarak jauh.

Lalu ada juga peluncuran laman 'Guru Berbagi'. Di sana para guru dapat berbagi praktik baik pembelajaran. Di antaranya terkait Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Usulan dari Komisi X DPR agar Kemendikbud memperluas gaung pembelajaran jarak jauh pun diwujudkan. Parlemen meminta Kemendikbud menggandeng TVRI untuk memberikan materi pembelajaran jarak jauh. Mulai Senin (13/4/2020) hingga setidaknya tiga bulan ke depan, program 'Belajar dari Rumah' yang dapat disimak di TVRI berlangsung.

Aneka kebijakan ini semoga membuat narasi mencerdaskan kehidupan bangsa tetap dapat berjalan di tengah pandemi Covid-19 ini.

KEMENKOP UKM 2021

FOKUS DONGKRAK USAHA MIKRO DAN KOPERASI

Pengembangan Usaha Mikro kecil dan koperasi menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2021. Kementerian Koperasi dan UKM juga berencana memberi Banpres Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) pada 2021 sebagai bantuan menghadapi dampak pandemi COVID-19.

ANGGARAN KEMENKOP DAN UKM 2021

Rp890,06 miliar

(Setelah penghematan)

BPUM 2021

- Usulan anggaran: Rp28,80 triliun
- Target penerima: 12 juta usaha mikro
- Besaran per penerima: Rp.2,4 juta

Prioritas

Pemerataan antar daerah dan pengusaha mikro yang belum menerima BPUM.

> Nantinya, penyaluran BPUM akan memprioritaskan dari aspek pemerataan daerah, sehingga yang belum menerima Banpres atau BPUM akan mendapatkannya.

Teten Masduki
Menteri Koperasi

PROGRAM 2021

1 Mewujudkan Koperasi Modern

- Pengembangan model bisnis dan SDM.
- Penerapan Good Corporate Governance koperasi.
- Digitalisasi koperasi.
- Pengembangan sistem permodalan untuk pembiayaan dan penjaminan koperasi.

2 Mewujudkan Usaha Mikro Naik Kelas

- Fasilitasi penguatan permodalan.
- Kemudahan izin dan perlindungan di area infrastruktur publik.
- Standarisasi dan skema jaringan pemasaran.
- Transformasi informal menuju formal.

3 Mendorong UMK Masuk ke Pasar Ekspor

- Pengembangan skema/sistem pembiayaan dan potensi investasi.
- Kemitraan dan perluasan akses pasar melalui scalling up produk UKM.
- Fasilitasi pelatihan dan pendampingan.
- Pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM berbasis tematik kewilayahan, dan ekspor.

4 Meningkatkan Rasio Kewirausahaan (saat ini 3,47%)

- Konsultasi bisnis dan layanan pendampingan usaha.
- pengembangan ekosistem bisnis wirausaha melalui dengan dunia usaha, dunia industri dan perguruan tinggi
- Fasilitasi Pengembangan teknologi informasi dan inkubasi usaha.
- Pembiayaan wirausaha melalui perluasan akses pembiayaan dan fasilitasi permodalan.

5 Memperkuat penyaluran dana bergulir koperasi 5 melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM

Diarahkan ke sektor dil: pertanian, Perhutanan Sosial, peternakan, perikanan, perkebunan dan UKM strategis.

6 Meningkatkan layanan pemasaran

- Peningkatan kapasitas SMESCO melayani pemasaran dan perdagangan lokal hingga internasional.
- Pengembangan SMESCO HUB untuk Indonesia bagian timur.
- Pelatihan dan pengembangan program Sparc.

DATA: KEMENKOP UKM | RISET: TIM | GRAFIS: HENGKI | FOTO: FREEPIK

SETIAP RUMAH MENJADI SEKOLAH?

"SAATNYA kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," pesan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).

Pembatasan Sosial yang dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19, bukan berarti libur dan tidak melakukan pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh serta belajar daring dapat dilakukan.

Tri Pusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran keluarga diantaranya seperti diungkap oleh R.A. Kartini melalui pernyataannya, "Sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih-lebih dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal."

Hal senada dapat dimaknai dari pernyataan Ki Hadjar Dewantara yakni "Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah." Bagaimana peran dari orang tua untuk turut mencerdaskan serta membentuk ekosistem pendidikan di rumah.

Seperti dilansir Majalah Tempo edisi 30 Maret-5 April 2020, pendidikan di Indonesia tercatat menempati peringkat 13 termahal di dunia. Namun apakah hal tersebut sejalan dengan kualitas pendidikan di negeri ini? Bisa ya dan bisa tidak. Dikarenakan disparitas, kesenjangan pendidikan itu begitu terasa. Simak saja 25,5% yang buta huruf di Indonesia adalah orang Papua. Memang dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak tinggal diam. Terdapat sejumlah kebijakan afirmasi. Di antaranya Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), yang memungkinkan peserta didik dari Papua dapat mengenyam pendidikan di Pulau Jawa.

Pendidikan yang mahal, kesenjangan akses pendidikan; bisa jadi menemui momentum hulunya manakala perihal edukasi kurang kontribusi dari pihak keluarga. Ranah keluarga sekadar "melepas", menitipkan anak untuk menimba ilmu di sekolah. Sedangkan ketika berada di rumah, ekosistem pendidikan tidak terbentuk. Contohnya Gerakan Literasi, apakah di rumah telah mendukung pula kebijakan ini? Sudahkah tersedia buku-buku sesuai genre umur anak? Sudahkah tersedia alokasi khusus untuk membeli/investasi buku? Atau jangan-jangan buku dipandang sesuatu yang tidak penting-penting amat. Maka minat baca peserta didik bisa jadi tak kuncup karena di rumah tidak tersedia buku-buku yang berkorelasi dengan alam pikiran anak. Lalu mereka bertumpuk dengan buku-buku pelajaran (yang bisa jadi membosankan), PR, dan sebagainya.

Maka momentum pembatasan sosial ini seyogianya menjadi refleksi. Telahkah "Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah?"

MEMBANGUN BANGSA BERPENDIDIKAN

Iqbal Djawad, Ph.D*

SEMENJAK Nadiem Makarim menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Mendikbud), dunia pendidikan nasional kita seolah dilanda "tsunami". Tatanan yang sudah cenderung mapan selama ini, seperti dijungkir balik olehnya. Sang Menteri seolah mengemban misi besar untuk merevolusi sistem pendidikan kita yang mungkin sudah dianggap usang dan tak sesuai lagi dengan perubahan zaman.

Lantas, apa yang salah? Tidak. Mungkin kita hanya merasa "shock" saja karena tidak pernah membayangkan akan mengalami benturan. Akan tetapi, karena perubahan itu adalah suatu yang niscaya, maka penulis mencoba melihat dan berusaha memahami sisi Menteri Nadiem sebagai sosok yang mereprensentasi generasi milenial Indonesia, yang tumbuh dan dibesarkan oleh teknologi digital.

Beberapa tahun silam, kita sebenarnya telah menyadari kalau teknologi digital yang mulai berkembang pada saat itu, akan mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Sebagaimana yang terjadi pada hampir semua bidang industri, teknologi itu juga akan merevolusi sistem pendidikan di Indonesia. Suka tidak suka, kita harus meresponnya sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman.

Sebab, apa? Di tengah situasi pengetahuan yang berubah begitu cepat, memang sudah tidak rasional lagi bagi seorang mahasiswa menghabiskan banyak uang untuk membeli buku teks yang hanya digunakan beberapa kali pertemuan di kelas. Mengapa? Ketika teknologi merambah dunia pendidikan, maka seorang mahasiswa akan jauh lebih mudah dan cepat mengakses beragam informasi dan pengetahuan yang diperlukan melalui komputer mereka masing-masing.

Pada konteks itu, kita bisa memahami perubahan paradigma pendidikan yang berkembang dalam pemikiran Menteri Nadiem, ketika meluncurkan konsep "Merdeka Belajar". Menurutnya, semua pemangku kepentingan dunia pendidikan, harus berpikir tentang mandiri belajar. Sebab, sistem pendidikan yang masih cenderung mengedepankan aspek administrasi pendidikan, sudah tidak kompatibel lagi dengan spirit zaman. Sehingga, paradigma merdeka belajar mesti dipahami sebagai suatu upaya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

Menteri Nadiem mungkin tidak salah. Hanya saja, untuk membangun bangsa berpendidikan merdeka, konsep merdeka belajar itu masih perlu dirumuskan secara lebih konkrit, karena berpotensi untuk ditafsirkan secara sendiri-sendiri oleh para pihak, sesuai kebutuhannya masing-masing. Jika sampai itu terjadi, maka, akan timbul kekacauan dalam dunia pendidikan kita.

Sebab, coba bayangkan, kira-kira apa yang terjadi kalau seorang mahasiswa kedokteran - atas nama merdeka belajar - lebih banyak belajar Ilmu Ekonomi melalui internet dari pada Ilmu Kedokteran? Yakin, mahasiswa bersangkutan, tidak akan pernah lulus dan menjadi Sarjana Kedokteran.

Merdeka belajar dapat pula diinterpretasi sebagai gagasan yang membebaskan peserta didik untuk mengakses ragam informasi ilmu pengetahuan. Memang tidak salah. Tetapi, tetap saja akan menimbulkan masalah, jika yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan memilih dan memilah informasi yang benar. Sementara informasi yang berseliweran di dunia maya saat ini, sangat berbeda dengan ensiklopedia yang telah berpuluh tahun menjadi sumber ilmu pengetahuan, di mana, konten dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi, kita pun mesti berhati-hati menerapkan konsep itu. Jangan sampai kita hanya melahirkan generasi yang individualistik. Di dunia sekarang ini, peserta didik tidak cukup hanya menguasai informasi. Tetapi juga harus belajar memimipin dan bekerja sama. Sebab kondisi mutakhir menunjukkan bahwa keterampilan ini menjadi kunci sukses di dalam meniti karier. Di sinilah letak pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek sosio-emosional menjadi sangat penting.

Sampai di sini, muncul pertanyaan, apa yang

diperlukan untuk menciptakan dan membangun bangsa berpendidikan? Political will. Untuk mereformasi sistem pendidikan kita, memang memerlukan kehendak politik yang besar dan kuat, termasuk menghadapi berbagai hambatan di dalam upaya "memodernisasi" sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh negeri.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai inovasi sistem pendidikan telah terjadi dan terus berkembang di beberapa sekolah dan institusi perguruan tinggi. Ketika seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan, bersedia membuka diri dan mau bergerak bersama merespon perubahan dengan melakukan inovasi secara terus-menerus, yakin, Indonesia akan lahir sebagai sebuah bangsa berpendidikan. Pada era itu, pendidikan akan menjadi ujung tombak bagi pengembangan kebudayaan dan teknologi.

Hanya perlu disadari bahwa prasyarat mutlak untuk membangun sebuah bangsa berpendidikan, adalah mengubah perspektif kita tentang sekolah itu sendiri. Secara subtantif, pertama-tama, sekolah harus dipahami sebagai proses menuntut ilmu. Setelah itu, adminstrasi pendidikan diperlukan untuk menata tertibkan seluruh rangkaian proses itu, termasuk memanfaatkan berbagai peluang yang mungkin diberikan oleh kemajuan teknologi hari ini.

Sekarang, apakah bersekolah itu untuk menuntut ilmu atau hanya mencari selembar ijazah? Tidak perlu lagi dipersoalkan. Dua-duanya penting. Pada intinya, kita tidak mau pendidikan kita seperti yang ditulis John Dewey (1989) di dalam "Waste in Education : The School and Society", "Sampah terbesar yang dihasilkan oleh sekolah berasal dari ketidakmampuannya membuat seorang anak mampu memanfaatkan pengalamannya di luar sekolah. Sebaliknya, apa yang dipelajarinya di sekolah, tak mampu ia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari."

Jika konsep merdeka belajar yang dimaksud Menteri Nadiem mencakup itu semua, bukan mustahil kalau konsep itu dapat menjadikan Indonesia sebagai bangsa berpendidikan. Yang pasti, kita membutuhkan lompatan dan terobosan untuk mengejar ketertinggalan. [*]

*) Penulis, mantan Atase Pendidikan Indonesia di Jepang, Direktur Kemitraan Internasional Universitas Hasanuddin.

Tulisan ini juga pernah diterbitkan di situs Genial.id

MITIGASI COVID-19:
PENTINGNYA KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Apridhon Rusadi*

DUNIA sedang berduka dan Indonesia sedang dirundung bencana, itulah kata-kata yang cocok untuk menyikapi kondisi saat ini. Negara mesti hadir bersama bangsa saat ini, jangan sampai terjadi "Stupid Syndrome" terhadap keganasan Virus yang terkenal dengan sebutan Corona. Nama yang sangat elok untuk sebuah nama penyakit yang menghantui dunia saat ini termasuk Indonesia.

Kondisi saat ini sudah begitu memprihatinkan memang, Ahmad Yurianto, jurubicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona, dalam conference pers yang ditayangkan di Chanel Yuotube, Selasa (24/3) menyampaikan bahwa total komulasi temuan telah mencapai 686 kasus positif. Kondisi ini memang butuh kerjasama semua pihak untuk mengurangi dampak penyebarannya.

Pemerintah mesti terus melakukan tindakakan mitigasi bencana, tanggap darurat harus terus dilakukan, salah satunya menghentikan segala aktivitas berkumpul dan berkerumun yang memakan waktu lama.

Siapa yang menginginkan bencana datang?, Tidak ada satu mahkluk di muka bumipun yang menginginkannya. Pemerintah perlu kita dukung untuk terus melakukan percepatan terhadap tindakan mitigasi bencana. Kebijakan yang dimulai dengan himbauan untuk berdiam diri di rumah, batasi interaksi sosial, hingga kebijakan untuk mentiadakan Ujian Nasional (UN) yang menjadi bagian dari mitigasi penyebaran Virus Covid-19 (corona) memang harus dimaklumi bersama dan perlu didukung bersama.

Kegiatan pendidikan harus disadari adalah kegiatan interaksi panjang antar siswa, dan antar guru dan siswa, sehingga kita mesti medukung untuk mengurangi interaksi tesebut yang salah satunya tidak mengadakan Ujian Nasional (UN) yang baru-baru ini diumumkan pemerintah melalui surat edaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) No. 0003/PR/BSNP/III/2020 terkait rencana peniadakan Ujian Nasional (UN) tahun 2020.

Pemerintah dalam melaksanaan kebijakannya, dalam surat edarannya menyampaikan bahwa untuk tahun ini, Ujian Nasional tidak akan ditetapkan menjadi standar kelulusan siswa akan tetapi dapat menggunakan akumulasi nilai lima sementer terakhir untuk menentukan kelulusann siswa. Pemerintah juga menetapkan metode belajar jarak jauh, dan juga tidak membebani siswa terhadap seluruh capaian kurikulum untuk naik kelas maupun kelulusan.

Pendidikan memang selayaknya tidak hanya mempertimbangkan hasil dari kemampuan siswa yang diujikan diantaranya melalui UN, akan tetapi memang semestinya menerapkan akumulasi kemampuan akademik secara keseluruhan siswa. Sehingga aktivitas pembelajaran semestinya harus bevariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi lain-lain, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dirumah.

Pendidikan harus menghargai kemampuan akademik dan non akademik seseorang, sehingga diharapkan kebijakan menghilangkan standar Ujian Nasional menjadi standar pokok kelulusan bukan hanya sebatas kebijakan mitigasi bencana akan tetapi bisa menjadi kebijakan jangka panjang.

Dengan menghilangkan standar ujian nasional sebagai standar pokok, berharap ke depan guru-guru akan lebih kretatif dalam memberikan pembelajaran yang menggugah pengalaman dan pengetahuan siswa, sehingga minat belajar siswa akan semakin tinggi, karena pendidikan bukan lagi sebuah kemampuan yang mesti dinilai dengan Ujian Akhir atau Ujian Nasional akan tetapi dinilai dengan proses yang berjalan sehingga prestasi siswa akan terlihat mengikuti minat dan bakatnya.

Pendidikan harus menekankan apresiasi belajar bagi siswa, mulai mendalami kemampuan dan skiil siswa serta guru dituntut mampu memberikan motivasi siswa untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan ide-ide baru. Menciptakan sekolah merdeka adalah keniscayaan, sekolah mulai saat ini sudah harus berperan menjadi lembaga penggerak, menggerakkan seluruh potensi siswa agar pendidikan bukan sesuatu yang menakutkan akan tetapi kegiatan yang menyenangkan. *

*) Penulis merupakan Peneliti Sindikasi Indonesia Maju

KAMPUS MERDEKA DAN INOVASI PERGURUAN TINGGI

Apridhon Rusadi*

MEWUJUDKAN Kampus Merdeka sejatinya adalah sebuah kebijakan yang memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk secara leluasa menjalankan konsep pembelajaran yang merdeka. Karena perguruan tinggi yang telah terakreditasi akan tetap terakreditasi selama lima tahun dan akan diperbaharuai secara otomatis. Akan tetapi evaluasi akan dilakukan terus menerus oleh BAN-PT sehingga jika ditemukan penurunan kualitas perguruan tinggi dengan menurunnya jumlah mahasiswa yang mendaftar ke prodi tersebut.

Tujuan Kampus Merdeka ini memang diharapkan untuk mepercepat inovasi di perguruan tinggi, karena pendidikan diharapkan bisa mendukung kebutuhan inovasi industri, dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia.

Memang tidak bisa disangkal kebutuhan era industri 4.0 telah lama mengubah paradigma dalam segala bidang. paradigma pendidikan yang selama ini, hanya berkutat pada kegiatan belajar diruang kelas pada saat ini proses pembelajaran dituntut untuk terus melakukan inovasi wacana pembelajaran dan memperkuat kemapuan artificial intellegence, Sehingga dampak dari perubahan tersebut, nilai dari kemampuan belajar tidak lagi menjadi konsen utama akan tetapi skill, kompetensi, karakter dan kepribadian akan juga menjadi fokus sasarannya. Sehingga metode pembelajaran di perguruan tinggi diharapkan lebih kretatif dan inovatif serta mampu melakukan kolaboratif terhadap media-media pendukung lainnya.

Sepakat dengan pendapat Richard W. Rilley (U.S.Secretary Of Education) terkait perlunya inovasi dan kolaborasi pendidikan saat ini "Hari ini kita menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta, dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan, untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diketahui".

Sehingga perguruan tinggi, semestinya menjadikan kebijakan Kampus Merdeka sebagai sebuah kelanjutan dari Kebijakan Merdeka Belajar menjadi motivasi untuk menawarkan program-program pembelajaran yang inovatif. Perguruan Tinggi juga semestinya mempersiapkan dosen-dosen yang bukan hanya memiliki kemampuan teoritif akan tetapi juga mampu melakukan inovasi-inovasi kolabarosi media pembelajaran.

Kreatifitas perguruan tinggi diuji dalam metodologi pengajarannya, karena pasca diterbitkannya kebijakan Kampus Merdeka, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela untuk mengambil atau tidak mengambil SKS sebanyak 2 semester di luar kampusnya setara dengan 40 SKS.

Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lainnya di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus di tempuh. Akan tetapi ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan,

terkait linearitas keahlian. Sehingga pertukaran belajar dan prakterk kerja adalah pengalaman kolaborasi pembelajaran yang didapatkan mahasiswa di perguruaan tinggi dan menjadi bagian dari SKS perencanaan pembelajaran sehingga tidak alasan study di luar kelas menjadi alasan menunda kelulusan mahasiswa.

Metode pembelajaran lintas study inilah yang menuntut peran penting dari perguruan tinggi untuk mempersiapkan dosen yang mampu melakukan bimbingan kolaborasi kemampuan antara teori lintas prodi dan praktek lapangan di luar kampus. Karena setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus tetap mendapatkan bimbingan dari dosen yang ditentukan kampusnya. Programnya pun harus inovatif, karena daftar kegiatan yang diwarkan dan dapat diambil mahasiswa harus menyesuikan dengan program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang juga disetujui pimpinan perguruan tingi.

Banyak yang diharapkan dari inovasi belajar tersebut, sehingga pembelajaran di perguruan tinggi tidak memberikan belenggu agar kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa lebih berdaya saing, baik secara intelektual maupun inovasi prodi pembelajaran. Semoga lebih bisa menyentuh aspek kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan inovatif. [*]

*) Penulis merupakan peneliti di Sindikasi Indonesia Maju

MENATAP MASA DEPAN ANAK-ANAK INDONESIA

Amir Fiqi*

Perhatian pemerintah terhadap nasib anak-anak bangsa harus benar-benar tulus. Sebab, masa depan Indonesia tergantung dari kualitas anak-anak pada saat ini. Mereka lah penerus pembangunan bangsa.

BERBICARA masa depan anak Indonesia terlihat masih kelam. Pasalnya, berdasarkan data yang publikasikan oleh WHO-UNICEF dalam jurnal The Lancet menyebutkan bahwa kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia masih jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain.

Berdasarkan peringkat yang dirilis WHO-UNICEF, indeks perkembangan anak yang menunjukan kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia ada di peringkat 117 dari 180 negara yang diteliti. Indeks ini mengukur kesehatan dan kesejahteraan anak berdasarkan sejumlah faktor yang meliputi pertumbuhan anak, tingkat kelangsungan hidup anak, tahun sekolah, tingkat kelahiran remaja, kematian ibu, prevalensi kekerasan, serta pertumbuhan dan gizi.

Dan yang paling memprihatinkan, Indonesia berada jauh tertinggal dibanding negara- negara anggota ASEAN lainnya. Misalnya Singapura menduduki posisi 12 terbaik dunia, Malaysia berada di peringkat 44 dunia, Vietnam 58 dunia, dan Thailand 64 dunia.

Dibanding dengan Filipina dan Kamboja kita pun masih kalah. Filipina menempati peringkat 110 dunia, sementara Kamboja berada pada posisi 114 dunia.

Negara terbaik untuk indeks perkembangan anak adalah Norwegia, Korea Selatan, Belanda, Prancis, dan Irlandia yang menempati posisi 1-5 di dunia. Denmark, Jepang, Belgia, Islandia, dan Inggris bertengger di posisi 6-10 dunia.

Tamparan Bagi Pemerintah

Berangkat dari data tersebut ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Masa, di usia kemerdekaan yang sudah masuk ke-74 tahun, soal kesejahteraan dan kesehatan anak masih jauh tertinggal dengan negara-negara anggota ASEAN yang kemerdekaan jauh sebelum Indonesia. Misalnya Singapura menikmati kemerdekaan pada tahun 1965, dan Malaysia pada tahun 1957.

Padahal tujuan dari kemerdekaan bangsa ini menghadirkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika fokus pada tujuan ini, seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari mereka.

Namun apa yang terjadi, kita kalah jauh dengan negara kecil seperti Singapura. Kita masih jauh tertinggal baik dalam hal pendidikan dan kesejahteraan dan kesehatan. Mereka menjadi negara maju dan memiliki pengaruh yang kuat.

Indonesia akan menyentuh umur 100 tahun pada 2045 mendatang. Dan Indonesia Emas 2045 menjadi impian besar untuk membentuk Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Untuk menyambut itu, di periode pemerintahannya Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki komitmen yang kuat lebih mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah benar pembangunan inilah yang akan mendapatkan porsi yang besar? Penulis merasa ini belum terlihat. Dan pemerintah juga terlihat kurang serius. Pasalnya, jika dilihat anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan SDM masih terbilang sedikit. Bahkan, yang sama-sama kita rasakan bersama pemerintah lebih mengedepankan pembangunan-pembangunan berupa infrastruk- apalagi pemindahan Ibu Kota Negara akan segera dijalankan, bisa jadi energi dan anggaran akan terkuras untuk mewujudkan rencana pemerintah yang terlihat terburu-buru ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Belum lagi untuk menyambut Indonesia Emas 2045, kita masih terkendala dan terjebak dari masalah-masalah mendasar yang ada di tanah air. Misalnya korupsi dan kemiskinan. Jika ini belum teratasi mana mungkin pembangunan SDM yang berkualitas akan terwujud. Sedangkankan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 berada pada kualitas SDM. Bisa jadi impian yang hanya sekadar mimpi.

Fokus Pembangunan SDM

Seperti yang disampaikan di atas Indonesia Emas 2045 akan terwujud jika sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Jika bercermin dari data yang dirilis WHO-UNICEF pemerintah harus benar-benar serius dan bekerja keras. Jika hanya sekadar omongan tanpa ada niat yang tulus dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan dan kesehatan anak, maka bisa jadi Indonesia akan semakin jauh tertinggal.

Apabila jujur, sebenarnya pemerintah juga sudah merasakan hal yang sama, bahwa bahwa saat ini Indonesia menghadapi persoalan kondisi kesehatan anak. Misalnya masalah stunting, seperti yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pemerintah memiliki target yang sangat emosial ingin menurunkan

angka stunting hingga 14 persen pada tahun 20204.

Wapres mengatakan untuk menurunkan angka stunting sesuai target tersebut tidak perkara mudah. Maka itu pemerintah pusat hingga desa harus bekerjasama. Dan melalui dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu jalan untuk mencapai target tersebut.

Tidak hanya stunting, masalah pendidikan juga masih menjadi persoalan penting bangsa ini. Pemerataan kualitas pendidikan juga belum merata dari Sabang sampai Marauke. Masih banyak anak-anak Indonesia yang berada di pelosok-pelosok negeri, bahkan di dekat pusat pemerintahan belum bisa menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas. Terlebih angka putus sekolah juga masih ada. Ini terjadi karena mereka dihadapkan dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak beruntung.

Fokus pembangunan sumber daya manusia tidak hanya masalah pendidikan saja. Namun harus menghadirkan generasi bangsa yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan kuat baik secara fisik maupun mental.

Untuk mencetak generasi seperti itu maka pemenuhan makanan yang sehat dan bergizi harus dilakukan. Jika keluarga masih miskin bagaimana mungkin mampu memberikan asupan gizi yang baik untuk anak- anak mereka. Belum lagi, dengan kondisi ekonomi yang masih jauh dari kata sejahtera bagaimana bisa menghadirkan lingkungan keluarga yang nyaman, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ketenangan saat bersama keluarga.

Jika ini masih dialami anak-anak Indonesia, maka sangat sulit menyambut usia kemerdekaan yang ke-100 tahun kondisi anak-anak Indonesia akan jauh lebih baik dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Jangan sampai upaya pembangunan sumber daya manusia hanya sekadar omongan tanpa tindakan nyata yang dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang akan mengarah pada tujuan tersebut.

Korupsi Musuh Yang Mematikan

Tertinggal nya bangsa Indonesia dibanding dengan bangsa-bangsa lain, menurut penulis karena karena faktor korupsi. Jika korupsi masih tumbuh subur di bangsa ini, bahkan terlihat dan terasa mendapatkan perlindungan ini sangat mengerikan.

Sebab korupsi sesungguhnya musuh yang akan mematikan bangsa ini. Mengapa demikian? Karena uang negara yang seharusnya untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak bangsa justru dinikmati oleh segelintir orang. Dan kemiskinan yang masih menjadi persoalan penting bangsa ini masih tumbuh subur karena ulah para koruptor.

Jika saja uang-uang yang mereka korupsi yang angkanya sangat fantastik hingga puluhan triliun rupiah ini digunakan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 maka tidak ada lagi cerita anak Indonesia kurang gizi, anak Indonesia putus sekolah dan tidak ada ceritanya angka kemiskinan yang semakin tinggi.

Berdasarkan rilis Bank Dunia yang bertajuk "Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class" (30/1) lalu menyatakan bahwa sebanyak 115 juta penduduk Indonesia rentan miskin. Ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah saat ini. Maka itu harus segera menyiapkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro terhadap rakyat kecil.

Meskipun korupsi sudah jelas menjadi musuh yang mematikan bangsa ini, namun terlihat pemerintah kurang berani untuk memberantas nya Dan justru yang terlihat pemerintah semakin berdamai dengan para koruptor- seperti yang kita rasakan sekarang dari revisi UU KPK sampai terpilihnya ketua KPK saat ini, keseriusan pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan.

Kasus-kasus terbaru yang publik bisa rasakan- seperti Harun Masiku dan Nurhadi yang buron hingga saat ini belum tertangkap. Belum lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masih berada di tahap penyidikan. Ini menjadi tanda tanya besar rakyat Indonesia, apa benar pemerintah serius memberantas korupsi?.

Sebagai anak bangsa saya tetap optimis. Masa depan anak-anak Indonesia akan gemilang- dan bisa mengejar ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain. Tapi, tentunya rasa optimis tersebut akan pudar jika pemerintah tidak memiliki upaya serius untuk menghadirkan dan mencetak genarasi bangsa yang unggul. Tentunya ini akan selesai dengan membuat kebijakan yang bermuara pada tujuan bangsa Indonesia, bukan hanya berhenti dalam omongan dan rencana-rencana. [*]

*) Penulis merupakan pemerhati sosial dan aktivis Pemuda Muhammadiyah

MENGEMAS KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR ALA MAS MENTERI NADIEM

Sosok Nadiem Anwar Makarim menjadi magnet pemberitaan tersendiri di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut terlacak dari eks CEO Gojek tersebut kala dipanggil ke Istana. Ragam spekulasi pun dilayangkan bahwa Nadiem akan menjabat menteri yang memiliki latar belakang dengan kiprahnya di Gojek. Untuk kemudian sebelum pengumuman, telah beredar isu Nadiem akan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Isu tersebut akhirnya mewujud.

Di hari pelantikannya, Mas Menteri Nadiem pun menjadi buruan media. Link and match antara dunia industri dan pendidikan diungkap menteri milenial ini. Diksi 'teknologi' pun diutarakan untuk memberikan layanan pendidikan di sekolah Indonesia yang jumlahnya begitu banyak.

Skeptisme, pro-kontra pun bermunculan ketika sosok berumur 35 tahun ini dipercaya sebagai Mendikbud. Narasi kapitalisme di jantung pendidikan, perlunya pedagogi, pendidikan yang tak sekadar mencetak tenaga kerja, dan aneka narasi berkelindan serta bertebaran.

Terlepas dari pro-kontra itu, magnet Nadiem membuat pendidikan di Indonesia menjadi perbincangan di ranah publik. Berbagai isu pendidikan ramai diungkap, diperdebatkan. Alumnus Harvard ini pun menghadirkan kebijakan Merdeka Belajar. Tercatat hingga kini telah tiga episode Merdeka Belajar dirilis. Masing-masing episode menarik perhatian publik. Merdeka Belajar Episode Pertama dirilis pada 11 Desember 2019. Merdeka Belajar Episode Kedua dirilis pada 24 Januari 2020. Merdeka Belajar Episode Ketiga dirilis pada 10 Februari 2020.

Secara tampilan Kebijakan Merdeka Belajar dikemas bak seorang pebisnis yang menawarkan produk ke investor maupun publik. Mendikbud Nadiem merilisnya melalui power point yang mengurai penyebab kebijakan itu muncul, menjelaskan kebijakan baru, disusun secara ringkas. Di laman kemdikbud.go.id, sejauh ini dua episode kebijakan Merdeka Belajar dijelaskan melalui pengayaan tanya jawab.

Pengemasan kebijakan publik semacam ini tentu sesuatu yang positif. Dalam hal sosialisasi, insan pendidikan, masyarakat luas dapat melihatnya secara terbuka. Tentu diperlukan sosialisasi yang lebih detail lagi bagi para pelaku dunia pendidikan, namun paling tidak hal tersebut membuka dialektika, perbincangan publik. Perkara Ujian Nasional, mahasiswa yang bisa belajar tiga semester di luar program studinya, dana BOS untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, menjadi puncak-puncak dialektika, perbincangan publik dari kebijakan Merdeka Belajar yang telah dirilis.

Terlepas apakah kebijakan Merdeka Belajar telah tepat dan solutif, namun pengemasan kebijakan publik dengan cara yang simpel, terbuka dilihat, merupakan hal yang patut diapresiasi dari kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Makarim.

MENGURAI DISINFORMASI COVID-19 DI SINTANG JELANG PILKADA

Yensiana*

BARU-BARU ini, Sintang digemparkan dengan isu terkait Covid-19 dengan kenaikan yang sangat signifikan. Isu tersebut diproduksi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan beredar di jagat maya akibat dari reses yang dilakukan oleh Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus.

Dari beberapa akun Facebook yang getol memproduksi isu miring dan sengaja menakut-nakuti psikologi masyarakat tersebut, diantaranya akun FB Amak Rimak yang merupakan pendukung pasangan calon bupati nomor 2 di Sintang.

Disinformasi Covid-19 Menciptakan Ketakutan

Pandemi Covid-19 adalah masalah bersama. Setiap kita tidak menginginkan virus tersebut menggerogoti tubuh kita. Akan tetapi Covid-19 juga tidak bisa melumpuhkan nalar pikir kita sebagai manusia yang terus berjuang dalam hidup. Kita harus mampu keluar dari ketakutan yang mungkin diakibatkan oleh informasi yang tidak valid.

Sebuah jajak pendapat pelacakan kesehatan Yayasan Kaiser Keluarga yang diambil pada akhir Maret menemukan bahwa 45% responden merasa bahwa kekhawatiran dan stres yang berkaitan dengan virus corona telah memiliki efek negatif pada kesehatan mental mereka. Serta 19% mengatakan memiliki dampak lebih besar.

Selain itu, mengutip New York Post, Jumat (24/04) psikiater dan staf pengajar Yale yang berbasis di New York, mengatakan ketakutan dan kecemasan sama menularnya dengan virus Covid-19. "Ketakutan dan kecemasan sama menularnya dengan virus. Pada setiap pasien, Anda harus menyelesaikannya trauma ini dan kemudian kita harus menemukan jalan keluarnya," kata psikiater Dr. Anna Yusim kepada Fox News.

Dari pernyataan Dr. Anna tersebut, masyarakat dunia harus mampu keluar dari ketakutan untuk menciptakan optimisme global agar mampu menghadapi pandemi Covid-19. Sama halnya masyarakat Sintang yang hari ini terpapar isu Covid-19 dengan kenaikan kasus yang membludak. Isu ini dihembus ke publik agar menggiring opini masyarakat ke arah ketakutan jelang laga Pilkada 2020.

Konteks isu Covid-19 di Sintang hari ini didominasi oleh disinformasi yang menebar ketakutan publik. Alih-alih ingin menjatuhkan lawan politik, isu yang dihembus tanpa disaring terlebih dahulu dan disebar secara massif di sosial media. Hal ini menciptakan ketakutan-masyarakat saling curiga dan saling tuduh. Kegaduhan akibat ketakutan dari Covid-19 ini harus dihentikan oleh seluruh elemen masyarakat Sintang.

Waspada Politisasi Isu Hoax Covid-19 Jelang Pilkada 2020

Baru-baru ini, lembaga kesehatan dunia atau WHO menegaskan kepada para pemimpin dunia untuk keluar dari ketakutan terhadap Covid-19 dan berjuang bersama-sama menuju peradaban yang baru. Dr David Nabarro dari WHO yang menyerukan para pemimpin dunia untuk berhenti menggunakan penguncian sebagai metode pengendalian utama negara dan ekonomi dari virus corona.

Dia mengklaim bahwa satu-satunya yang dicapai dari penguncian ini adalah kemiskinan --- tanpa menyebutkan potensi nyawa yang diselamatkan. "Penguncian hanya memiliki satu konsekuensi yang tidak boleh Anda remehkan, dan itu membuat orang miskin menjadi semakin miskin," kata Dr Nabarro seperti dikutip news.com.au, Senin (12/10).

Pernyataan Dr Nabarro merupakan jalan baru bagi kebangkitan ekonomi global. Kemunculan pandemi corona telah mengakibatkan ekonomi dunia lesuh, yang kemudian menciptakan kemiskinan baru dalam negara.

Begitu juga dengan Indonesia. Awal kemunculan pandemi ini membuat warga negara saling curiga hingga menghentikan segala aktivitas sosial bermasyarakat. Segala aktivitas sosial, ekonomi , politik dan budaya lumpuh total. Dampak yang paling terasa tahun ini adalah Gawai Dayak yang terpaksa ditiadakan. Kemudian jelang Pilkada 2020, isu Covid-19 menjadi komoditas politik. Percaturan politik menceraiberaikan akal sehat publik. Sumber data dan informasi yang akurat diabaikan, yang dipertontonkan adalah kebencian, ketakutan dan disinformasi.

Para tim sukses kehabisan akal untuk merawat demokrasi yang sehat. Kita kehilangan roh demokrasi dan cara berpolitik yang humanis. Politik harusnya mencapai cita-cita bersama untuk kebaikan bersama. Sebagaimana dikatakan Aristoteles, bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonum commune).

Tapi Pilkada Sintang kali ini tampak gelap. Para tim sukses tidak mampu mengedepankan persatuan dan kebersamaan. Saling serang, mencari kesalahan dan menyerang tanpa data. Tak hanya itu, ajang perang gagasan yang membangun Sintang ke arah yang lebih baik pun tampak suram, bahkan tidak tampak. Harusnya, Pilkada Sintang kali ini adalah ruang kolaborasi ide dan gagasan, memberi kritikan yang membangun, narasi-narasi pembangunan dan kekuatan intelektualitas yang harus menjadi senjata utama. Karena roh politik adalah roh pembangunan, membaca situasi batin masyarakat dengan tulus untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

Tapi lagi-lagi senjata bagi para relawan dan tim sukses adalah mencari kesalahan. Bukan memamerkan program pembangunan dan visi-misi yang brilian. Rakyat perlu diberi pendidikan politik, bukan membodohi masyarakat dengan cara-cara yang tidak mendidik. Seperti isu Covid-19 yang digiring oleh para pendukung paslon tertentu dengan menyerang secara membabi buta tanpa data yang akurat.

Membaca Fakta Kasus Covid-19 di Sintang

Isu Covid-19 saat ini di Sintang menjadi bukti bahwa kasus Covid-19 telah dipolitisasi secara berlebihan.

Beredar angka siluman kasus covid-19 di Sintang per tanggal 11 hingga 16 Oktober 2020 adalah sebanyak 62 kasus. Kasus ini menurut dugaan dari tim salah satu paslon di akun FB Amak Rimak adalah bersumber dari reses Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang digelar di Aula Wisata Rohani Bukit Kelam, Kecamatan Kelam Permai, pada 10 Oktober 2020.

Selanjutnya, Lasarus yang adalah putra daerah asli Dayak dituding sebagai penyebar Covid-19, yang dimana dalam link berita media online Independensi.com pada Jumat (17/10) menuding Lasarus sebagai orang yang menciptakan kejahatan kemanusiaan. Selain Independensi.com, beredar juga berita dengan isi yang sama dimuat oleh media Sindonews.com

Pernyataan tersebut diungkap oleh praktisi hukum Pontianak Tobias Ranggie. “Karena patut diduga hasil swab test Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, 11 – 16 Oktober 2020, paling tidak sudah ada 62 orang patut diduga positif Covid-19, setelah menghadiri reses Lasarus di Desa Merpak, Sabtu, 10 Oktober 2020,” kata Tobias Ranggie, Sabtu (17/10). Sementara merujuk pada data Dinkes Sintang, kasus Covid-19 di Sintang sudah ada sebelum reses yang digelar di Kelam.

Berikut data-datanya yang dilansir dari akun instagram @dinkes_sintang.

Tanggal 12 Oktober terkonfirmasi 137 penambahan 2 kasus dari sebelumnya per tanggal 10 Oktober terdapat 135 kasus. Tanggal 13 Oktober penambahan 11 kasus menjadi 148 kasus. Tanggal 14 Oktober penambahan 16 kasus menjadi 164 kasus. Tanggal 15 Oktober penambahan 6 kasus menjadi 170 kasus. Tanggal 16 penambahan 9 kasus menjadi 179 kasus dan tanggal 17 Oktober tidak ada penambahan kasus baru.

Dengan demikian, hitungan penambahan kasus Covid-19 dari tanggal 12 hingga 17 Oktober adalah 44 kasus. Selain itu, klaster kasus tidak disebutkan oleh Dinkes Sintang. Sedangkan Tobias Ranggie dan lawan politik Yohanes Rumpak –Syarifuddin menyebut angka kasus Covid-19 yang bersumber dari reses di Kelam adalah sebanyak 62 kasus per tanggal 11-16 sedangkan data dari Dinkes Sintang tidak menyebutkan adanya penambahan kasus di tanggal 11 Oktober.

Angka yang melonjak Signifikan (62 kasus) ini adalah merupakan angka siluman yang dibuat untuk menciptakan ketakutan, keributan,kecurigaan antar sesama warga jelang laga Pilkada Sintang. Tentu publik bisa menilai, mengapa fitnah dan hoax gencar difokuskan pada reses di Kelam. Jawabannya adalah tim sukses yang berbeda pandangan politik tidak mampu melahirkan kreatifitas dan gagasan baru untuk memenangkan hati rakyat. Alhasil fitnah dan hoax sebagai senjata untuk mengelabui persepsi publik.

Hal yang menggerogoti persepsi publik ini harus diputuskan, agar nurani dan batin masyarakat kembali bersatu, kembali melihat Sintang secara moral kolektif menuju masa depan Sintang yang cerah. Mari, sebagai sesama putra dan putri Sintang, kita tidak boleh terpecah hanya karena perbedaan pandangan politik. Jagalah perdamaian, eratkan persatuan dan kesatuan, pupuk persaudaraan. Saatnya membangun solidaritas karena solidaritas membawa kita kepada yang satu dan utuh. [**]

*) Penulis merupakan Tim Jaringan Milenial Nusantara

INVESTASI SAAT RESESI

Faizal Ridwan Zamzany*

Memasuki bulan oktober atau kuartal ketiga tahun 2020 Kementrian Keuangan memprediksi Indonesia akan mengalami resesi. Hal ini disebabkan pada kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus, angkanya berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1%. Dengan begitu, Indonesia mengalami resesi. Sebab, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun ini minus 5,32%. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut.

Namun demikian masyarakat tidak perlu panik menyikapi ekonomi Indonesia yang mengalami resesi. Hal ini dikarekan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami resesi, sudah banyak negara-negara lain yang lebih dahulu mengalami resesi. Hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah menyiapkan dana darurat jika dibutuhkan sewaktu-waktu dalam masa resesi ini.

Walau demikian kondisi resesi ini bukan berarti kita berdiam diri atau hanya menyimpan dana kita dalam bentuk cash di rumah atau bawah bantal saja. Kondisi resesi dan juga pandemi yang sedang kita alami sekarang juga tetap membuka peluang bagi kita untuk melakukan investasi. Investasi yang kita lakukan sebaiknya investasi yang likuid atau mudah dicairkan dalam bentuk uang dan memiliki tingkat risiko yang rendah.

Terdapat beberapa instrument investasi yang dapat dipilih oleh masyarakat disaat resesi dan pandemi seperti emas/logam mulia, deposito, sukuk ritel, reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap.

Emas atau logam mulia

Emas merupakan logam yang memiliki nilai tinggi, tahan korosi dan tidak reaktif sehingga tidak mudah teroksidasi. Emas merupakan pilihan investasi yang sangat baik dalam kondisi resesi dan juga pandemi seperti sekarang. Emas merupakan pilihan investasi yang nilainya stabil, walaupun dalam beberapa waktu belakangn ini nilainya relatif naik turun. Investasi pada emas merupakan investasi yang likuid sebab emas dapat diandalkan sebagai dana darurat yang dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Namun demikian, yang perlu diingat adalah investasi emas merupakan investasi jangka panjang, artinya keuntungan investasi pada emas ini akan dirasakan hasilnya dalam waktu panjang.

Deposito

Deposito merupakan investasi konvensional yang sudah diketahui oleh banyak pihak. Pada saat seperti sekarang ini deposito dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menginvestasikan dana nya selain likuid, deposito juga memiliki tingkat risiko yang rendah.

Namun demikian investasi pada deposito biasanya tidak memberikan imbal hasil yang tinggi, tetapi apabila kita cermat dan mau mencari terdapat beberapa bank yang memberikan imbal hasil yang lumayan baik seperti pada Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS). Walau demikian kita juga harus tetap mempelajari dan memantau secara berkala kondisi kesehatan bank agar dana yang diinvestasikan tetap aman. Selain itu yang perlu diingat investasi pada deposito dikenakan pajak sebesar 20%.

Sukuk ritel

Sukuk Ritel (SR) merupakan salah satu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SR ditawarkan khusus kepada individu atau perorangan sehingga disebut ritel. Sukuk ritel merupakan salah satu pilihan investasi bagi masyarakat yang menguntungkan dan nyaris tanpa risiko atau risiko rendah. Investasi sukuk ritel ini cocok bagi pemula atau investor perorangan sebab nilai investasi yang rendah dimulai dari satu juta rupiah dan maksimal 3 miliar rupiah.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diingat dalam investasi sukuk ritel ini. Pertama, investasi sukuk ritel dikenakan pajak sebesar 15%. Kedua, terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam investasi sukuk ritel seperti: risiko pasar (market risk), risiko gagal bayar (default risk) dan risiko likuiditas (liquidity risk).

Reksadana

Selain emas, deposito dan sukuk ritel, reksadana merupakan investasi yang menguntungkan. Reksadana merupakan kumpulan dana yang dikumpukan untuk selanjutnya dinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, sukuk dan instrument keuangan lainnya. Pengelolaan reksadana biasanya dilakukan oleh Manajemen Investasi atau Manajemen Asset.

Reksadana juga pilihan yang tepat bagi investor pemula dan memiliki modal terbatas. Investasi pada reksadana tidak memerlukan modal yang besar, beberapa bias dimulai dari seratus ribu rupiah. Beberapa reksadana memiliki tingkat risiko yang relative rendah seperti reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Selain memiliki risiko yang reatif rendah, reksadana juga tidak dikenai pajak.

Walau demikian tedapat beberapa risiko yang mungkin terjadi saat investasi di reksadana seperti, risiko gagal bayar, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai unit penyertaannya, dan risiko wanprestasi. [**]

*) Penulis merupakan Dosen FEB-UHAMKA & Ketua Dana Pensiun Pegawai UHAMKA

HAJI CORONA

Nurhidayat*

HAJI dalam ajaran Islam merupakan rukun Islam, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Islam dibangun di atas lima pondasi syahadat, shalat, zakat, haji dan puasa. Semua ulama hadis, mufasir dan fuqaha sepakat tentang hal ini.

Haji merupakan ibadah yang memerlukan kemampuan harta dan fisik yang kuat,sebab perjalanan menuju tanah suci memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan memerlukan fisik yang prima. Kata isthitoa dalam Alquran ini dimaknai mampu membiayai dan mampu sehat jasmani dan rohani.

Menurut data kementerian haji dan umrah Kerajaan Arab Saudi tahun ini jumlah jamaah haji dibatasi hanya 1000 jamaah 13 orang diantaranya adalah warga negara Indonesia. Pembatasan ini hal dikarenakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang melanda dunia.

Beberapa keunikan haji saat corona antara lain dari sisi jumlah jamaah yang biasanya sampai 2,5 juta setiap tahun saat ini hanya 1000 jamaah haji. Menggunakan atribut khusus yang dapat melindungi jamaah. Tidak ada ritual mencium hajar aswad. Batu untuk jumrah juga harus steril. Jamaah haji juga harus memperhatikan protokol kesehatan dan mereka yang sudah melaksanakan haji harus dikarantina terlebih dahulu.

Kelebihan haji saat corona antara lain jamaah haji walaupun satu sisi mengalami kekhawatiran akan penyebaran virus tetapi satu sisi mentum ini bisa menimbulkan ketenteraman dan kekhusyuan dalam beribadah haji, jumlah yang terbatas ini menjadi kesempatan untuk lebih memaknai hakikat ibadah haji.

Beberapa pelajaran penting dari haji saat corona ini diantaranya pertama haji saat corona pembuktian bahwa haji itu adalah sebuah panggilan kalimat talbiyah labbaik allahumma labaik ini menunjukan jamaah yang dipanggil merupakan pilihan.

Haji corona merupakan sebuah perjuangan seorang hamba dalam memenuhi panggilan Tuhan. Perjuangan terus dilakukan dalam kondisi apapun termasuk saat corona. Haji corona adalah kesempatan yang tidak semua meraihnya. Haji saat corona memberi pelajaran pentingnya sebuah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Semoga mereka yang melaksanakan haji saat corona menjadi haji mabrur dan maqbul. Amiin. [*]

*) Penulis merupakan Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf FAI UMJ, Dai Ambasador Dompet Dhuafa

BERTEMPUR DENGAN COVID-19, CARA BEKERJA DENGAN KELAZIMAN BARU

Naufal Mahfudz*

SUDAH sekitar tiga bulan bangsa ini bertempur dengan COVID-19. Seluruh energi dan daya upaya dikerahkan untuk memerangi wabah ini.

Korban terus berjatuhan dari berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali juga para tenaga medis. Vaksin untuk melawan virus corona jenis baru ini belum juga ditemukan.

Menurut World Health Organization (WHO), virus ini terus bermutasi dengan kecepatan rata-rata satu mutasi per bulan dan mempunyai jenis yang berbeda di setiap negara atau wilayah.

Tatkala pertempuran terus berkecamuk tiada henti dan pemerintah serta masyarakat sudah kehabisan energi, tidak ada jalan lain kecuali mengubah strategi.

Ketika amunisi juga sudah semakin menipis dan penemuan senjata pamungkas belum lagi tuntas, maka bisa jadi upaya gencatan senjata atau perdamaian menjadi alternatif yang dipilih.

Rakyat sudah begitu lelah dan virus corona juga tidak mau mengalah. Semua tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir.

Pilihan beradaptasi di masa pandemi atau berdamai dengan wabah menjadi alternatif terbaik untuk dapat terus bertahan melanjutkan kehidupan ini.

Kelaziman sehari-hari masyarakat dua bulan terakhir ini yang berpedoman terutama kepada protokol-protokol kesehatan harus terus dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian melihat perkembangan yang terjadi.

Kebiasaan-kebiasaan yang pada mulanya dilakukan dengan dipaksa dan kemudian terpaksa, kini harus menjadi bisa dilakukan dan dijadikan kebiasaan atau kelaziman, yang pada gilirannya akan menjadi budaya.

Masyarakat harus mengubah kebiasaan-kebiasaan selama ini yang tidak dibatasi oleh protokol-protokol kesehatan atau aturan-aturan lain yang bertujuan menghindari penyebaran virus lebih luas lagi.

Masyarakat harus bisa hidup dengan tatanan kehidupan baru atau kenormalan baru (new normal). Tatanan kehidupan baru yang harus dijalankan sebelum ditemukannya penangkal virus korona, bahkan mungkin jika sudah ditemukan vaksin virus ini sekalipun.

Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dunia kerja.

Beberapa model adaptasi atau kelaziman baru yang muncul dalam dunia kerja di tengah masih menyebarnya virus korona antara lain sebagai berikut:

Bekerja dari rumah

Istilah yang semakin populer di tengah masyarakat saat ini adalah bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Bekerja dari rumah menjadi alternatif jitu cara bekerja di tengah penyebaran virus korona yang belum juga mereda. Metode bekerja ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, baik dari sisi waktu apalagi lokasi.

Di sebagian perusahaan cara bekerja ini mungkin tidak asing lagi, dan sudah diimplementasikan dengan tujuan untuk mendukung program worklife balance (keseimbangan antara bekerja dan kehidupan sehari-hari) atau juga untuk efisiensi.

Walaupun diawali dengan situasi yang dipaksa dan terpaksa, kini WFH menjadi salah satu solusi untuk memenuhi protokol kesehatan stay at home atau di rumah saja.

Tetap di dalam rumah tetapi juga tetap produktif bekerja, serta memprioritaskan keselamatan pekerja dari risiko penularan virus korona.

Bekerja dari rumah tentu bukan hanya memindahkan pekerjaan untuk dilakukan di rumah. Perlu hal-hal khusus yang dilakukan secara lebih disiplin ketika bekerja di dalam rumah.

Persyaratan minimal yang harus dipenuhi antara lain ruang kerja dan peralatan kerja yang memadai, berpakaian rapi, disiplin terhadap waktu kerja dan waktu istirahat, dan tidak terganggu dengan suasana rumah.

Setelah menjadi kelaziman baru dalam bekerja dan dalam rangka merespon kedinamisan kondisi, WFH akan berkembang menjadi kelaziman yang lebih baru yaitu model bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA), ketika WFH ini berkolaborasi dengan model bekerja dari co-working space yang sebelum ini sudah mulai membudaya di kalangan para profesional.

Menjaga jarak fIsik

Menjaga jarak fisik juga merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. WHO mendefinisikan pengertian jarak fisik adalah pembatasan jarak antara manusia satu dengan lainnya secara fisik saja dan tidak memutuskan hubungan sosial.

Walaupun antara manusia menjaga jarak satu sama lain, namun hubungan kekeluargaan, kekerabatan, persahabatan, pekerjaan dan hubungan sosial lainnya tetap bisa dilakukan melalui media sosial.

Dengan jarak fisik manusia bukan terisolasi secara sosial dan menjauhi satu sama lain, namun tetap melakukan interaksi sosial seperti biasa yang tidak memerlukan kehadiran fisik secara langsung atau melakukan interaksi fisik secara dengan pembatasan jarak tertentu.

Sedangkan Center of Disease Control and Prevention (CDCP), USA, menyatakan bahwa implementasi jarak fisik adalah dengan berposisi kurang lebih berjarak 1,8 meter dari orang lain, tidak berkumpul dalam kelompok, dan menghindari kerumunan banyak orang atau tempat-tempat umum.

Kriteria untuk implementasi jarak fisik ini sangat baik untuk diterapkan di dunia kerja.

Walaupun metode bekerja WFH menjadi kebiasaan dalam tatanan baru, namun bekerja di kantor atau Work At Office (WAO) masih tetap dilakukan dengan berpedoman pada protokol-protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah atau perusahaan. Karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor.

Teller dan customer service di sebuah bank harus beradaptasi melakukan jarak fisik saat melayani nasabah, tanpa mengurangi kualitas pelayanannya.

Para pekerja secara internal dalam sebuah kantor atau pabrik juga harus mengubah tata letak (re-lay out) tempat kerja untuk memenuhi persyaratan jarak fisik.

Begitu juga ketika karyawan menemui pelanggan, pemasok, atau mitra kerja lainnya., kebiasaan berjabat tangan dengan hangat selama ini harus diubah dengan gesture lain yang tidak bersentuhan.

Cara bangsa Jepang dengan membungkukkan badan (ojigi) saat bertemu mungkin bisa menjadi pilihan kebiasaan baru. Atau cara bangsa Thailand (wai) dan India (namaste) ketika menyapa orang lain pertama kali dengan menyatukan kedua telapak tangan di dada seperti sikap berdo'a juga bisa menjadi alternatif.

Intinya adalah menghindari anggota badan terutama tangan untuk bersentuhan.

Video Conference

Rapat-rapat dan pertemuan formal lainnya dengan memanfaatkan video conference (konferensi video) atau yang saat ini populer dengan istilah vicon meeting sebenarnya merupakan akibat dari model bekerja WFH dan juga mematuhi protokol physical distancing dalam bekerja.

Model bekerja dengan vicon meeting ini akhirnya menjadi pilihan tepat sebagai salah satu alternatif mencegah penyebaran virus korona di tempat kerja.

Vicon meeting adalah sarana telekomunikasi yang efektif antara dua orang atau lebih dan dapat digunakan secara global atau jarak jauh. Dengan sarana ini seorang pekerja tidak hanya dapat berbicara satu sama lain tetapi dapat melihat video dari orang yang berinteraksi dengannya.

Ini adalah cara berkomunikasi dua arah yang efektif dari transmisi audio dan video dengan menggunakan media internet untuk transmisi data.

Banyak organisasi yang mengharuskan para pekerjanya untuk melakukan pertemuan dan rapat dengan mitra kerja terutama yang berjarak jauh dengan menggunakan sarana ini.

Dalam kondisi saat ini, video conference menjadi media komunikasi yang cukup efektif dan efisien, bukan hanya dalam rangka menghindari penyebaran virus korona, tetapi juga dalam mengefisienkan waktu dan anggaran organisasi.

Bukan hanya rapat atau pertemuan formal yang kemudian lazim menggunakan video conference, namun penyelenggaraan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja baik pelaksanaan in house training maupun public training dilakukan dengan cara webinar dan video conference memakai aplikasi-aplikasi yang tersedia.

Salah satu lembaga penelitian big data di Indonesia, Statqo Analytics, menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi konferensi video di Indonesia oleh pebisnis dan masyarakat lainnya dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini meningkat cukup tajam yaitu sebesar 183 persen.

Memakai APD

Para pekerja konstruksi atau manufaktur tertentu mungkin sudah sangat terbiasa dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, seperti menggunakan alat pelindung kepala (safety helmet), pelindung muka dan mata (face shield), pelindung telinga (hearing protection), pelindung pernafasan (masker respirator), sarung tangan (gloves), dan pelindung kaki (safety boots).

Namun, sekarang semua pekerja profesi apapun, mau tidak mau dan suka tidak suka, harus memakai alat pelindung diri untuk menghindari atau mencegah terpapar virus korona.

Para pekerja garis depan (frontliner) yang sering berhubungan dengan pihak eksternal seperti anggota satuan pengamanan (security) serta office boy dan petugas cleaning service wajib menggunakan face shield (pelindung muka).

Bahkan bukan hanya di tempat kerja, namun juga mulai berangkat dari rumah, dalam perjalanan menuju lokasi kerja, dan saat kembali dari tempat kerja menuju ke tempat tinggal, terlebih jika menggunakan fasilitas transportasi umum.

Para pekerja tidak hanya memakai alat pelindung diri, namun secara berkala juga harus diukur suhu tubuhnya dengan thermogun dan wajib kerap mencuci tangan dengan sabun sekitar 20 detik atau membasuh tangan dengan hand sanitizer.

Lokasi kerja, termasuk meja dan perlengkapan kerja juga secara periodik dilakukan penyemprotan disinfektan untuk memastikan kebersihan dan hilangnya virus, bakteri dan kuman.

Memakai masker menjadi kelaziman baru yang utama untuk pencegahan tertular virus corona di tempat kerja. Cara penggunaan masker yang tepat dapat membantu menangkal virus masuk ke dalam tubuh.

Virus corona menular melalui droplet atau cairan tubuh dari orang yang terinfeksi dan biasanya droplet akan keluar saat bicara, bersin dan batuk.

Para pekerja ketika memakai masker tidak hanya dalam kondisi sakit atau kurang sehat, namun juga dalam kondisi sehat.

Menggunakan masker sehari-hari bukan hanya untuk melindungi diri, namun juga melindungi orang lain dari terpapar virus.

Warga negara Ceko mengkampanyekan pemakaian masker ini dengan tagline: I protect you, you protect me, and we are both save (saya melindungi Anda, Anda melindungi saya, kita berdua selamat).

Menurut WHO pemakaian masker akan efektif jika dikombinasikan dengan rutinitas mencuci tangan yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun (hand rub) dan hand sanitizer yang mengandung alkohol.

Masih banyak cara bekerja dengan kelaziman baru yang akan muncul di masa pandemi ini sesuai kedinamisan situasi. Akhirnya, yang dapat bertahan hidup di tengah wabah ini adalah bukan yang paling kuat atau paling pintar, tetapi yang paling adaptif, sebagaimana ungkapan yang dikatakan oleh Herbert Spencer (1820-1903), seorang sosiolog berkebangsaan Inggris, yaitu survival of the fittest (kelangsungan hidup yang paling sesuai).

Spencer merespon hal yang dinyatakan oleh Charles Robert Darwin (1809-1882), seorang naturalis dan ahli geologi Inggris tentang seleksi alam (natural selection) dalam teori evolusi Darwin.

Seraya menunggu ditemukannya vaksin sebagai senjata utama melawan virus corona, tentu beradaptasi dengan kelaziman-kelaziman baru menjadi cara yang paling ampuh untuk terus melanjutkan kehidupan ini.

*) Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK, dan Steering Committee Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK)

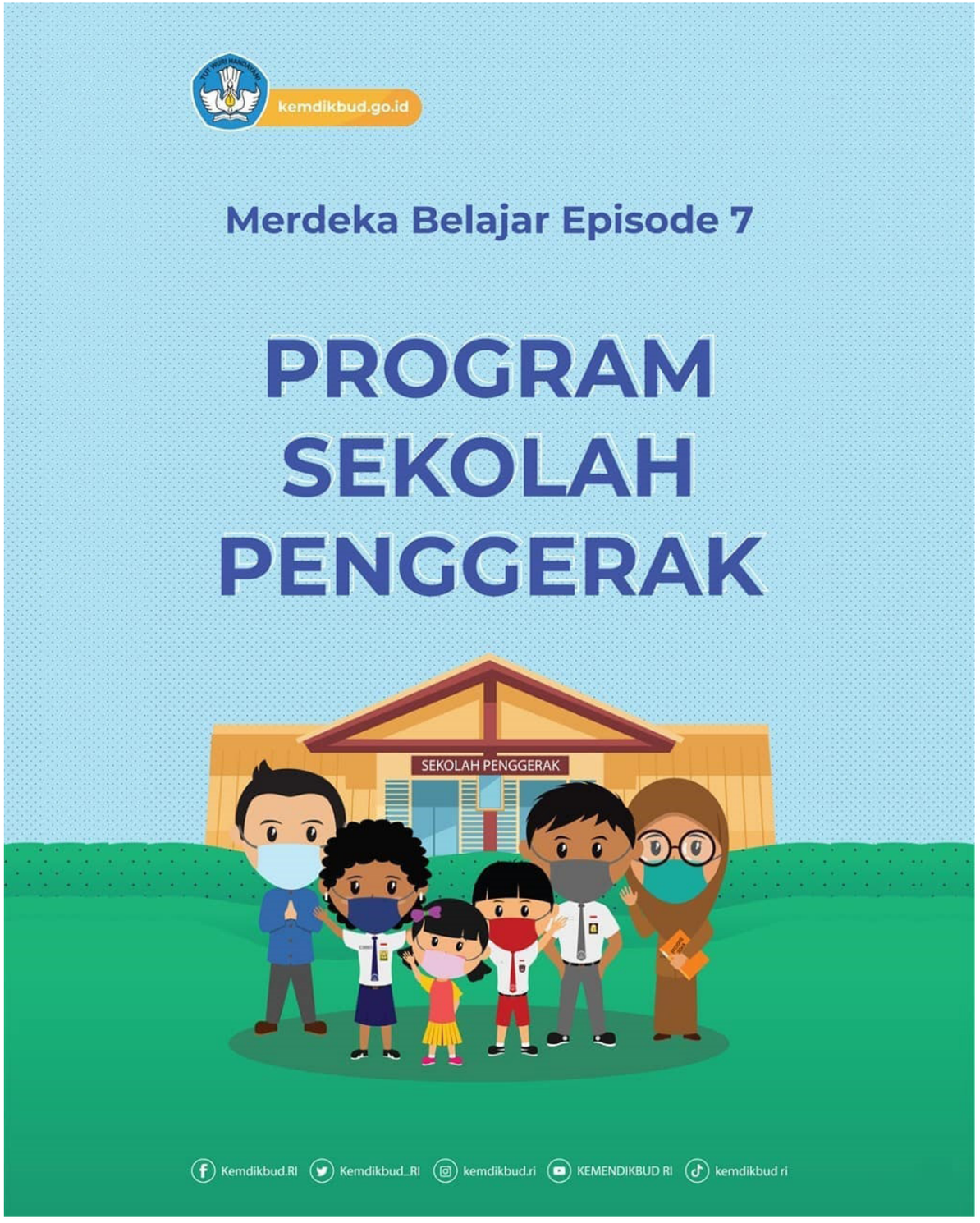

CORONAVIRUS Disease (Covid-19) masih terus mewarnai lalu lintas pemikiran dan berita hari-hari ini. Wajar saja, mengingat pandemi yang telah menyebar lintas benua tersebut berdampak sistemik. Berbagai segi roboh dan keropos gara-gara pagebluk ini. Ketidaknyamanan pun dialami oleh kita sebagai manusia yang disebabkan hulu Covid-19 ini.

Namun, sudahkah kita belajar dari Covid-19? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di antaranya memberikan seruan agar para guru memberikan pembelajaran yang bermakna di masa pandemi ini. Tugas sekolah pun dapat dikaitkan dengan Covid-19.

Sudahkah kita menjadi insan pembelajar? Yang belajar dari segala peristiwa. Termasuk dari hal buruk, tidak nyaman, tidak menyenangkan.

Covid-19 pada beberapa kajian memperlihatkan polusi udara yang menurun, bumi yang dapat "bernafas" lebih lapang, langit yang lebih biru (bukan cuma slogan), hewan yang memperlihatkan diri. Pengalaman nyata tersebut, yang dapat kita saksikan melalui mata kepala sendiri, melalui ponsel; telahkah berbekas menjadi pembelajaran yang bermakna?

Greta Thunberg, tokoh muda itu telah berulang kali menyerukan untuk bumi yang lebih baik. Dan kini dengan Covid-19, manusia-manusia terpaksa ataupun tidak, mencoba berlaku lebih bijak terhadap bumi. Akankah jika pagebluk ini berakhir, bumi akan tetap menjadi sahabat? Ataukah manusia akan mencoba mengejar ketertinggalan ekonominya dengan lebih mengeksploitasi? Ah, manusia.

Covid-19 juga menyentuh ke inti kesadaran. Bagaimana segala hegemoni dapat rapuh, tumbang, atas kuasa Allah SWT. Dari sesuatu yang "tidak diperhitungkan" memantik kesadaran. Covid-19 tentu tidak terlihat wujudnya secara mata telanjang. Ia bukanlah pasukan bersenjata yang canggih dengan alutsista keren. Ia bukanlah kekuatan ekonomi kerah putih yang melakukan aneksasi. Namun Covid-19 mampu mengerkah, menimbulkan dampak sistemik.

Masihkah manusia tamak, rakus, dengan segala obsesi tak berujungnya? Covid-19, dengan #DiRumahAja, mengembalikan kita pada hal esensial dan krusial: keluarga. Kita pun seolah diberikan waktu untuk kontemplasi: apa yang kau cari di bumi?

MELAWAN CORONA MELALUI PESANTREN MORAL

Nafik Muthohirin*

SEORANG teman bercerita kepada saya, "bagaimana nasib pemilik warung kopi di belakang kampus yang biasa kita jadikan tempat nongkrong di sana ya. Apakah masih buka? Kalaupun buka apakah ada mahasiswa yang ngopi, kampusnya juga libur, anak kos pada pulang kampung."

Aktifitas belajar-mengajar pun dilakukan melalui dalam jaringan (daring). Ironisnya lagi, dengan pertanyaan lebih lanjut, "bagaimana cara pemilik warung tersebut menutup cicilan kredit modal usahanya yang begitu besar."

Pemilik warung kopi di atas baru sepenggal cerita atas dampak Covid-19 di sektor ekonomi. Ada banyak cerita sama, yang justru lebih ironi daripada kasus pemilik kedai kopi di atas. Yang pasti, kita sepakat bahwa pandemi ini telah meluluhlantahkan perekonomian global.

Bagi umat Islam, wabah ini adalah ujian. Bukan musibah. Kita mesti menyikapinya dengan kesabaran. Tidak dengan mengungkapkan kemarahan dan kutukan.

Dalam hal ini, dimensi kesabaran juga tidak diartikan dengan kepasrahan dan kecerobohan. Cara bersabar umat Islam dalam menghadapi Covid-19 adalah memaknainya sebagai tindakan pencegahan, yaitu meneladani anjuran pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah.

Ramadhan adalah bulan suci umat Islam yang biasanya banyak orang meramaikannya dengan sholat tarawih berjamaah, tadurrus di masjid, dan berbagai aktivitas sosial keagamaan yang dilakukan bersama-sama. Namun, karena wabah ini semakin merajalela, mudah sekali menginfeksi orang-orang yang berkerumun, sehingga oleh pemerintah masyarakat dihimbau untuk berjamaah dan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang.

Himbauan ini hanya berlaku sementara waktu. Jika serangan Covid-19 ini sudah usai, tidak lagi menjadi ancaman, dan situasi kondusif kembali, maka umat Islam tentu tidak akan dilarang untuk beribadah di masjid dan melaksanakan kegiatan sosial keagamaan seperti biasanya.

Ramadhan tahun ini, bisa tetap kita rayakan dengan bentuk yang lain, misalnya tadarrus di rumah, tarawih dengan keluarga, bahkan i'tikaf di rumah saja. Dengan demikian, Ramadhan tahun ini akan tetap terasa menjadi berkah.

Pesantren Moral

Ramadhan kali ini bisa kita ambil spiritnya dengan menjadikannya sebagai pesantren moral. Secara umum, pesantren diartikan sebagai tempat tinggal yang dihuni oleh para santri untuk memperlajari ilmu-ilmu agama dengan segala unsurnya (M. Dawam: 2004). Namun, dalam perkembangannya, saat ini pesantren tidak melulu mengajarkan ilmu-ilmu agama melainkan juga ilmu-ilmu umum.

Nah, pesantren di sini bukan diartikan dalam kerangka yang klasik itu. Pesantren moral ini bermakna luas dengan mengorientasikan umat Islam supaya lebih sabar menghadapi ujian besar ini. Namun, kesabaran itu bukan berarti disikapi secara pasrah, menyerah dan berdiam diri di rumah tanpa mengerjakan sesuatupun. Bukan begitu, pesantren moral ini menuntut umat untuk tetap bekerja, beribadah dan berkarya.

Lazimnya, pesantren moral ini juga bermaksud membuat rancangan besar yang menjadikan masyarakat sebagai entitas terpenting di dalamnya. Praktisnya, pesantren ini diartikan sebagai jalan upaya membuka kesadaran masyarakat supaya peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya mereka yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.

Tujuan utamanya tidak lain untuk membentengi masyarakat dari kekhawatiran yang berlebihan atas dampak wabah ini. Sebab, sebagaimana sejumlah pengamat ekonomi kemukakan, jika wabah ini tak berhenti selama lebih dari tiga bulan, maka sangat mungkin dampak perekonomian dalam negeri akan terjun bebas. Krisis terjadi dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Pesantren moral adalah sebuah bingkai komunitas yang mempunyai karakter tegas sebagai cerminan masyarakat yang produktif. Ia mempunyai pandangan umum bahwa sebuah peradaban yang maju dapat diraih dengan kejujuran dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Namun, keberadaan pesantren moral ini berbeda dengan pesantren lain pada umumnya. Tidak harus terkungkung oleh atap-atap asrama yang membentengi, harus memakai peci setiap waktu, serta menerapkan banyak paraturan yang harus dituruti oleh santri. Tetapi, penerapannya lebih melibatkan masyarakat umum sebagai pengontrol setiap tindakan masyarakat itu sendiri supaya berprilaku terpuji dan menjadikannya sebagai tanggungjawab moral bersama.

Memang dalam perbincangan nilai-nilai moralitas, tidak ada ukuran pasti. Sebab nilai moral adalah persoalan yang bersifat subyektif, yang beraras pada pandangan masing-masing individu. Namun, dalam hidup bermasyarakat dan beragama tentu memerlukan pengakuan satu sama lain, sehingga segala prilakunya tidak membuat orang lain terganggu.

Maka, pada kedatangan bulan suci ini, diharapkan mampu menjadi spirit perjuangan bagi bangsa ini, khususnya umat Islam, untuk melawan Covid-19. Kita tidak ingin wabah ini terus meluas dan menjalar banyak orang. Himbauan pemerintah untuk tetap di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain hendaknya dipatuhi dengan baik agar virus ini segera pergi. Semoga Ramadhan tahun ini tetap menjadi rahmat bagi umat Islam dan umat manusia secara umum.

*) Dosen Fakultas Agama Islam, Sekretaris Pusat Studi Islam dan Filsafat Universitas Muhammadiyah Malang

DARI DATA MENUJU KEBIJAKAN PUBLIK YANG TEPAT SASARAN

SALAH satu hal yang menjadi sorotan selama pandemi Covid-19 terkait dengan data. Validkah data yang disiarkan oleh juru bicara Achmad Yurianto saban sore? Berbagai kalangan meragukan mengenai angka tersebut. Sidang pembaca dapat melihatnya dalam berbagai artikel di sejumlah pemberitaan.

Bicara mengenai data, di Indonesia pendataan memang kerap menjadi pertanyaan. Sebut saja silang angka antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Contoh lainnya terkait data kependudukan, kisruh pemilu 2019 salah satu akarnya yakni terkait pendataan warga negara Indonesia yang masih belum rapi jali.

Jika dilacak secara keilmuan, bisa jadi kebijakan publik yang diterapkan berhulu dari data angka yang salah. Padahal ibaratnya sebuah sistem, jika memasukkan angka yang salah sejak awal semula, maka output pun bisa meleset.

Permasalahan Covid-19 terkait pula dengan keakuratan data. Salah data bisa salah prediksi dan salah mengambil kebijakan publik. Pada rapat terbatas membahas laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Senin (13/4/2020), Presiden Joko Widodo meminta data korban virus corona dibuka kepada publik. Jokowi berharap publik bisa mengakses semua data, bukan hanya korban positif dan meninggal, melainkan juga orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Semoga apa yang diujarkan dan diharapkan Presiden Jokowi dapat bermuara pada data yang terbuka. Dari data yang terbuka itu berbagai kalangan dapat melihat secara jernih, transparan, serta memberikan solusi dari lininya masing-masing.

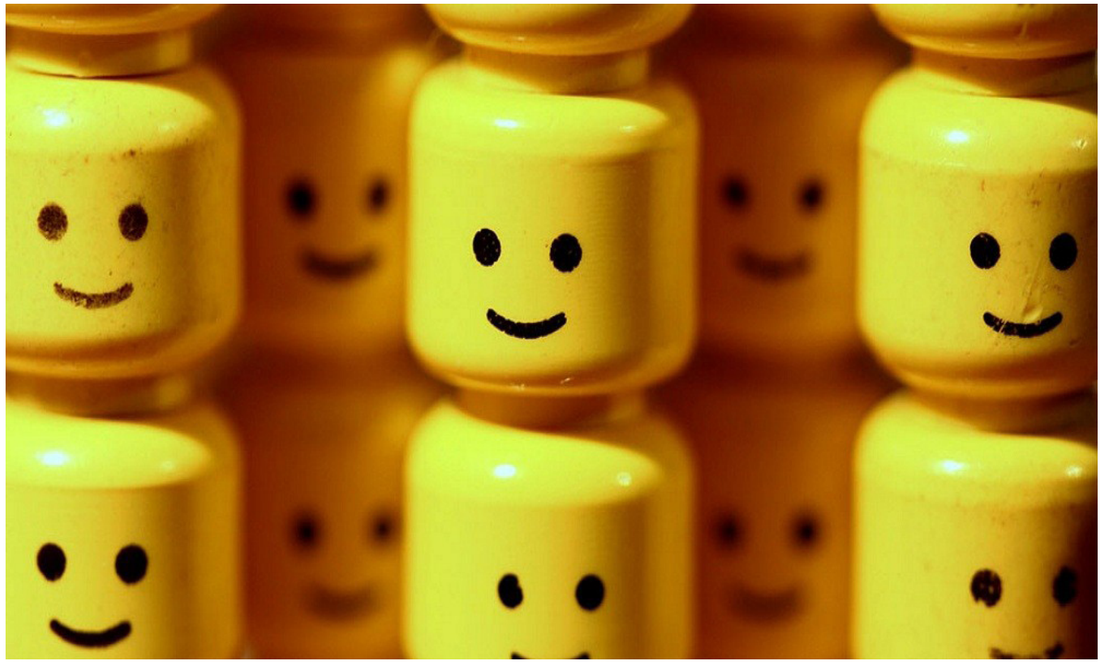

KEMAMPUAN BERADAPTASI ADALAH KUNCI

JURNALIS senior Najwa Shihab di akun YouTube-nya mengungkapkan pandangannya kala ditanya kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Di antara deretan penjelasannya, ia mengungkap kemampuan manusia untuk beradaptasi. Ya, hal itulah yang menjadikan manusia sebagai spesies unggul dan hingga kini dapat bertahan.

Kata ‘adaptasi’ memang harus diakrabkan dan dipahami. Pagebluk Covid-19 ini memang membuat sejumlah ketidaknyamanan dan membuat kita harus mengaktifkan kata adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembatasan sosial, physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) “memaksa” kita untuk melakukan sejumlah adaptasi. Imbauan dari Presiden Joko Widodo untuk bekerja, beribadah dari rumah; membuat kita melakukan adaptasi.

Sejumlah perlawanan, pembangkangan dilakukan, mungkin akarnya dari dicabutnya zona nyaman dan belum seimbangnya laku adaptasi. Maka dengan belum terang benarnya kapan pagebluk ini berujung, sejumlah adaptasi memang harus dilakukan sekarang dan disiapkan untuk dilakukan ke depan. Maka itu juga menjadi ujian kemanusiaan. Jika kondisi ini berlarut-larut maka siapkan diri dalam berbagai skenario. Mari gunakan insting yang sudah mengalir di diri kita: adaptasi. Mari ajak orang lain juga untuk beradaptasi. Mari galang gotong royong untuk beradaptasi bersama. Tak mudah memang, tapi rasa-rasanya gotong royong ini memang harus bermuara. Catatan sejarah juga yang nantinya akan kita lihat sejauh mana kita sebagai individu dan entitas untuk melakukan adaptasi. Semoga kita mampu beradaptasi dengan “badai” ini

JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH PANDEMI

BUKAN kali ini saja umat manusia menghadapi pandemi. Studi literatur sejarah menunjukkan manusia pernah menghadapi kolera, pes, Flu Spanyol. Dalam pandemi Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 tercatat 50 juta jiwa penduduk dunia meninggal dunia.

Terkait dengan pagebluk Covid-19 beberapa kalangan menarik pembelajaran dari Flu Spanyol. Di antaranya terkait karantina wilayah, pembatasan sosial. Bagaimana keberhasilan mitigasi risiko ternyata berkorelasi dengan langkah pembatasan sosial pada kasus Flu Spanyol. Sejauh ini dari radar pengamatan saya, dua metode yang ditengarai berhasil untuk meminimalisir dampak Covid-19 yakni dengan melakukan karantina wilayah atau melakukan tes massal secara cepat dan masif.

Praduga dan salah ambil rute kebijakan publik juga bukan monopoli masa kini saja. Tarikh sejarah menunjukkan hal tersebut terjadi di masa lampau. Maka beranjangsana ke literatur sejarah, bukan berarti terlena di masa lampau. Ada hal-hal universal yang tetap terjadi. Dan kita umat manusia kerap terperosok di lubang yang sama dikarenakan enggan belajar dari sejarah.

Penanganan Covid-19 di Indonesia dan sejumlah negara telah tercatat dalam lembar sejarah. Bagaimana pandemi ini begitu cepat menjungkirbalikkan sejumlah asumsi yang meremehkan dan teledor terhadap sains. Sejarah pun tak harus lampau-lampau amat untuk menjadi pembelajaran. Menilik rekam jejak kebijakan publik menghadapi Covid-19 sejak Januari 2020 hingga bulan April ini saja sudah terlihat bagaimana celah-celah kebijakan serta pembelajaran yang harusnya diambil. Jangan lagi terlena, tergagap, mengemas dengan narasi yang keliru; saatnya menunjukkan kebijakan publik yang mengutamakan sains serta kesehatan masyarakat. Saatnya menunjukkan gotong royong yang sesungguhnya, bukan sekadar jargon-jargon yang membuat kita terlelap dan skeptis.

STAFSUS MILENIAL DAN ALARM DANA PENANGGULANGAN COVID-19

PUBLIK dihantam dengan kegeraman begitu mendengar berita staf khusus milenial Andi Taufan diduga terlibat conflict of interest dalam jabatannya. Jika melacak hal ini dari awal semula pembentukan stafsus milenial, sebenarnya alarm peringatan sudah dibunyikan. Stafsus milenial semenjak awal mula hadir memang dikritisi. Mulai dari gajinya, perannya, serta kemungkinan konflik kepentingan. Para milenial tersebut tak diharuskan mundur dari jabatan yang dipegang di perusahaannya.

Dalam skema kebijakan publik, distorsi semacam ini bisa jadi terjadi. Bagaimana kebijakan publik disusupi oleh kepentingan tertentu. Hal itu dikarenakan “dapur kebijakannya” pun berisi oleh para pelaku yang berkepentingan. Maka penting kiranya dalam perumusan kebijakan publik untuk mendengarkan aspirasi berbagai kalangan. Masyarakat luas pun dapat mengetahui mengenai pro kontra dari sebuah kebijakan yang diterapkan. Maka menjadi penuh tanda tanya ketika produk hukum dapat selesai dalam waktu begitu kilat. Sebut saja dengan sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menggugat sejumlah konsensus politik di parlemen dan pemerintahan pada masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo yang pertama.

Mengapungnya dugaan konflik kepentingan Andi Taufan ini juga sudah selayaknya menjadi alarm peringatan bagi dana APBN ataupun APBD yang digunakan untuk menghadapi Covid-19. Untuk APBN tercatat Rp 405 triliun dialokasikan yang antara lain untuk pengadaan alat kesehatan, program kartu prakerja, program keluarga harapan. Sejumlah pihak sedari awal telah mewanti-wanti agar anggaran ini tepat guna dan tepat sasaran. Tentu kita tidak berharap ada penumpang gelap yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk bancakan keuntungannya.

MEMPERKUAT FUNGSI KELUARGA DI TENGAH ANCAMAN CORONA

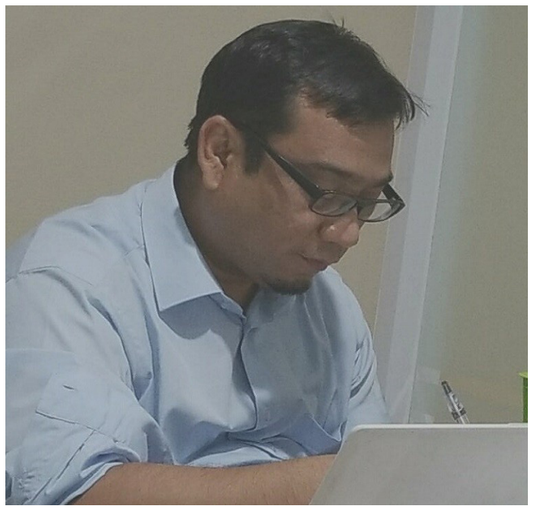

Nurhidayat *

COVID-19 sejak pertama kali ditemukan oleh Dr. Ai Fen di Wuhan, China pada bulan Desember 2019, kemudian menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia, sampai saat ini terdapat 3.842 pasien yang terkena virus tersebut. Untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 pemerintah memberlakukan social distancing atau physical distancing yakni tindakan pembatasan atau menjaga jarak fisik yang tujuanya mengurangi kontak langsung dengan penderita.

Berbagai kebijakan lain muncul antara lain pelarangan ibadah di masjid atau tempat ibadah lainnya. Pembelajaran jarak jauh, ditutupnya berbagai tempat rekreasi. Maka disaat lembaga pendidikan tidak lagi berfungsi, masjid atau tempat ibadah tidak difungsikan, kantor menerapkan work from home, tidak ada lagi berbagai tempat rekreasi bagi anak. Maka dalam kondisi dan situasi seperti itulah pentingnya memperkuat dan memperluas fungsi keluarga.

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bab VII Pasal 47 dijelskan bahwa pembangunan Keluarga dilaksanakan dengan cara: a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; f. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Dalam undang-undang tersebut betapa pentingnya fungsi keluarga dalam segala hal, pendidikan, agama, sosial dan ekonomi. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi saat mewabahnya Covid-19. Dalam situasi saat ini memperkuat fungsi keluarga merupakan salah satu solusi dalam memproteksi keluarga. Pertama memperkuat fungsi ubudiyah, keluarga menggantikan fungsi masjid sebagai tempat dilaksanakanya berbagai aktifitas ibadah. Apalagi jika merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Tengah Wabah Covid-19, surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/EDR/1.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19, kemudian Pemerintah melalui dan surat Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: SE, 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Ketiganya merupakan himbauan untuk melaksanakan shalat berjamaah dan aktivitas ibadah lainya termasuk kegiatan ramadhan dilaksanakan di rumah bersama keluarga.

Memfungsikan keluarga sebagai tempat kegiatan aktivitas ibadah selain bisa mengurangi mata rantai penyebaran Covid-19, dengan fungsi ini akan menambah keharmonisan dalam keluarga. Di dalam keluarga inilah seorang anak mengenal, menanamankan dan menumbuhkan kembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi manusia yang agamis, berakhlakul karimah dan memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Dalam alquran surat At-tahrim ayat 6 Allah berfirman "Wahai orang-orang yang beriman lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka,". Hal ini menunjukan betapa fungsi keluarga sangat penting dalam memproteksi keluarga. Keluarga harus hadir menggantikan fungsi masjid sebagai fungsi ubudiyah. Keluarga harus mampu meningkatkan ketakwaan dan menanamkan akidah bahwa wabah Covid-19 sebagai ujian keimanan dan kesabaran. Jadwal pengajian dan sholat berjamaah harus dimiliki keluarga. Suami sebagai pemimpin keluarga harus mampu menjadi imam shalat, sekaligus menjadi guru agama bagi keluarga.

Kedua memperkuat fungsi ekonomi, akibat yang ditimbulkan dampak ekonomi dari Covid-19 luar biasa, sehingga beberapa perusahaan mengambil kebijakan merumahkan karyawan sampai yang paling menyedihkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Di tengah situasi dan kondisi ini tentu berdampak kepada keuangan keluarga, keuangan keluarga mengalami defisit anggaran yang disebabkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Sementara itu semua kebutuhan keluarga harus tetap terpenuhi.

Oleh karena itu, keluarga harus mampu memberikan solusi ekonomi. Misalnya dengan menanamkan pentingnya hidup hemat, belajar menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang. Mencari sumber-sumber penghasilan lain misalnya mengembangkan bisnis online, atau membuka usaha dari rumah. Mengatur penggunaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan cara ini selain menyelamatkan ekonomi keluarga juga menyelamatkan keluarga dari bahaya penyebaran Covid-19.

Ketiga memperkuat fungsi tarbiyah. Kebijakan Kementerian Pendikan dan Kebudayaan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19, memberlakukan penerapan pembelajaran penerapan belajar di rumah. Kondisi ini mengharuskan orangtua dipaksa harus mampu menjadi guru bagi anak-anaknya, oleh karena itu orangtua harus memiliki kemampuan mendidik dengan media pembelajaran yang terbatas yang ada di rumah. Walaupun banyak anak yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut tetapi dengan situasi saat ini keluarga telah berfungsi menggantikan lembaga pendidikan yang tidak aman bagi anggota keluarga. Dengan fungsi tarbiyah ini keluarga telah mampu berkontribusi dalam memproteksi keluarga dari ancaman Covid-19.

Keempat memperkuat fungsi sosial di saat kebijakan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kedua kebijakan tersebut bisa menimbulkan beban psikologi bagi anak dan keluarga. Anak tidak lagi bisa bergaul dengan teman temanya yang biasa dilakukan di lingkungan. Maka ayah atau ibu harus menjadi orangtua sekaligus teman bagi anak. Berolahraga bersama menjadi media dalam mempertahankan pergaulan sosialis pada anak. Rumah menjadi tempat rekreasi bagi anggota keluarga sehingga kebahagiaan, kasih sayang, rasa aman, perhatian diantara anggota keluarga, dan membina pendewasaan. Selain mengakrabkan dan menambah harmonis, keluarga juga menyelamatkan negeri dari Covid-19.

Intinya dalam situasi dan kondisi saat ini, bagaimana memperkuat fungsi keluarga, Keluarga harus tetap produktif di saat Covid-19 ini. Di saat semua piranti untuk membentengi masyarakat dari bahaya Covid-19 ini tidak berfungsi maka benteng pertahanan terakhir yakni keluarga harus diperkuat. Di dalam keluarga inilah bisa dijadikan pusat peribadatan, sumber keuangan, tempat pendidikan sekaligus tempat sosialisasi dan rekreasi keluarga.

*Penulis merupakan Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Dai Ambasador Dompet Dhuafa.

KERJA DARI RUMAH DAN UNIT EKONOMI INDONESIA

KEBIJAKAN Work From Home (WFH)/bekerja dari rumah merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Ternyata dari terminologi Work From Home terbuka sejumlah fakta, kotak Pandora, data, terkait dengan dunia kerja di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi data pembanding dari data yang selama ini dipampang, dipromosikan, dipuji oleh pemerintah misalnya.

Nyatanya ada beberapa pekerjaan yang tidak/belum memungkinkan untuk Work From Home. Hal tersebut bisa jadi karena memang jenis pekerjaan tersebut mengharuskan pekerja hadir ataupun terkait dengan peralatan teknologi yang tidak bersifat mobile. Hal lainnya dikarenakan belum siapnya untuk melaksanakan segala hal terkait revolusi industri 4.0 ataupun perangkat kerja yang belum kompatibel untuk bekerja dari rumah.

Work From Home juga mengurai tentang para pekerja harian. Dimana mereka bergantung pada pendapatan dari kerja mereka sehari-hari. Tak kerja, tak keluar, bisa jadi tak makan. Hal itu tentu layak menjadi unit analisa di kemudian hari mengenai ketepatan data pekerja, kemiskinan di Indonesia.

Work From Home juga memperlihatkan bagaimana relasi di sejumlah perusahaan antara pemilik dan pekerja. Bagaimana sejumlah pemilik perusahaan yang sebenarnya bisa menerapkan Work From Home malahan tetap berkeras untuk menempatkan pekerjanya di kantor. Hal ini yang sayangnya belum bisa dielaborasi dengan mumpuni oleh Kementerian Ketenagakerjaan misalnya. Bagaimana pemerintah tak benar-benar powerful dan menerapkan imbauan saja. Dalam perkembangannya dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terkelompokkan jenis usaha mana saja yang masih dapat melangsungkan aktivitasnya di tempatnya, serta mana yang harus menerapkan Work From Home dan melakukan pembatasan sosial. Namun pantauan pagi ini di sejumlah akun Instagram seperti @jktinfo cukup mengernyitkan dahi. Bagaimana kepadatan tertentu di stasiun kereta api, di jalanan masih terjadi.

Tambahkan lagi unit analisa terkait ojek online. Bagaimanakah klasifikasi mereka dalam ranah tenaga kerja Indonesia? Apakah mereka sesungguhnya karyawan/mitra/pekerja harian? Bagaimana hak dan kewajiban mereka? Bagaimana dinamika tentang boleh tidaknya mengangkut penumpang di masa PSBB ini menunjukkan sisi yang mungkin selama ini teralihkan dari publik, di tengah puja-puji unicorn yang disematkan.

Seperti dilansir Majalah Tempo edisi 13-19 April 2020, hingga awal April 2020, lebih dari 74 ribu perusahaan merumahkan sekitar 1 juta pekerja. Maka pagebluk Covid-19 ini memang benar-benar berdampak sistemik serta mengurai unit ekonomi Indonesia.

TUGAS CENDEKIAWAN MUSLIM MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19

Nurhidayat *

DI tengah situasi yang masih tidak menentu ini masyarakat semakin mengalami kepanikan, terlebih umat Islam beberapa waktu ke depan akan menghadapi bulan Ramadhan. Sementara penyebaran Covid-19 semakin hari semakin menunjukan peningkatan data dari berbagai media saat ini berjumlah 3.293 orang positif corona, 280 meninggal dunia. Hari ini terdapat penambahan 219 kasus baru. Sehingga totalnya menjadi 3.512 kasus. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini. Terlebih kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti social distancing dan kebijakan lain seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperlukan sosialisasi dan dukungan semua pihak. Utamanya adalah para pemimpin umat yang saya sebut dalam tulisan ini cendekiawan muslim. Tulisan ini mencoba mengungkap bagaimana tugas cendekiawan muslim dalam kontribusinya meminimalisir penyebaran Covid-19.

Dalam masyarakat beragama seperti Indonesia, eksistensi cendekiawan muslim sangat penting. Seorang cendekiawan muslim menurut Ali Syariati sebagai problem solver dari berbagai persoalan yang dihadapi umat saat ini yaitu bahaya penyebaran Covid-19 yang mengancam keselamatan umat. Cendekiawan muslim adalah para pemimpin umat yang bersentuhan langsung kepada umat mereka adalah guru agama, dosen, ustaz, kyai, tuan guru, ajengan, dan sebutan lainya yang mereka dijadikan panutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Ali Syariati tugas pertama seorang cendekiawan adalah memberikan informasi yang mencerahkan, menenangkan dan memberikan sikap optimisme kepada umat. Jika informasi yang diterima masyarakat data-data yang menakutkan ini akan menimbulkan kepanikan dan ketakutan di tengah masyarakat. Kalau ini dibiarkan masyarakat mengalami stress yang diakibatkan mereka lama tinggal di rumah ditambah informasi yang tidak menyenangkan. Maka tugas cendekiawan muslim memberikan pemahaman dengan metode bil hikmah, mauidzah hasanah dan wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan metode ini pemahaman umat akan pentingnya social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengurangi penyebaran Covid-19 akan berhasil.

Majelis Ulama Indonesia tempat berkumpulnya cendekiawan muslim, pada tanggal 16 Maret 2020 telah mengeluarkan Fatwa No 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Tengah Wabah Covid-19. Selanjutnya tanggal 24 Maret 2020 Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/EDR/1.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19, kemudian Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE, 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Semua keputusan tersebut intinya himbauan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah dan sholat jumat dan kegiatan ramadhan di masjid.

Namun apa yang kita saksikan saat ini sebagian besar umat tidak mengindahkan edaran tersebut. Masjid masih penuh oleh jamaah yang melaksanakan shalat berjamaah dan aktifitas lainya. Fatwa sudah

disampaikan namun masyarakat masih sibuk dengan kehendaknya sendiri. Kondisi ini bisa jadi disebabkan karena informasi yang disampaikan tidak dipahami secara utuh oleh umat. Oleh karenanya ini adalah tugas para cendekiawan muslim dalam memberikan informasi tersebut kepada umat.

Penyebab lainnya adalah penyebaran informasi tentang fatwa atau edaran yang dikeluarkan lembaga otoritatif tersebut disampaikan dengan komunikasi yang tidak mudah dipahami, sehingga apa yang difatwakan oleh cendekiawan muslim tidak ditaati oleh umat. Inilah yang menurut Ali Syariati kekurangan komunikasi antara umat dan cendekiawan muslim telah memisahkan dan menimbulkan hubungan yang serasi. Dibutuhkan komunikasi yang baik agar semua keputusan cendekiawan muslim ditaati umat. Ketika mewabahnya covid-19 cendekiawan muslim harus hadir menjadi uswah dan garda terdepan memberikan pemahaman tentang pentingnya memelihara atau melindungi diri hifdzu nafs dengan berdiam di rumah.

Tugas cendekiawan muslim lainya dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 ini adalah membangkitkan dan menanamkan dalam pikiran umat sebuah sikap optimis dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Persoalan covid-19 telah membuat masyarakat prustasi, karena telah berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang meresahkan umat. Masjid yang merupakan sarana atau media umat mengadukan, menenangkan dan melupakan persoalan hidup ditutup rapat oleh fatwa, oleh sebab itulah masih banyak masjid yang melakukan shalat berjamaah dan shalat jumat.

Dalam situasi dan kondisi inilah cendekiawan muslim harus memberikan harapan dan membangkitkan semangat dalam menjalani kehidupan. Sikap optimis akan bangkit dengan solusi yang diberikan oleh seorang cendekiawan muslim. Solusi yang ditawarkan oleh cendekiawan muslim berupa informasi tentang peluang bisnis, selain solusi bersifat spiritual. Tugas cendekiawan muslim terletak dalam usahanya memberikan solusi

dalam kehidupan umat yang dinamis dan penuh tantangan.

Cendekiawan muslim dalam pandangan Ali Syariati bagaikan seorang direktur film, ia adalah direktur pengarah umat. Tetapi sayangnya cendekiawan muslim telah memisahkan diri dari umat. Mereka memang membahas persoalan umat tetapi mereka menjaga jarak dengan umat. Sehingga ketika para cendekiawan muslim mengeluarkan fatwa, bagi sebagian umat hanya diketahui bukan ditaati. Inilah akibat dari jauhnya cendekiawan muslim dengan umat, sehingga dampaknya cendekiawan muslim tidak dapat memahami keinginan umat dan sebaliknya umat tidak memahami apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim.

Tugas cendikiawan muslim dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 sangat dibutuhkan, mereka menjadi sosok menjadi contoh yang diteladani umat untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah dan shalat jumat di masjid. Dengan begitu maka mereka sudah berusaha memutus mata rantai penyebaran covid-19 sehingga hal ini bisa meminimalisir korban covid-19.

*Penulis merupakan Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Dai Ambasador Dompet Dhuafa.

GAJI DIPOTONG KARENA COVID-19, BAGAIMANA HUKUM DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA?

Bobi Muliadi Sagala, S.H., M.H*

PENYEBARAN Coronavirus Disease (Covid-19) yang terjadi di beberapa negara membuat banyak kegiatan masyarakat yang terhalang/ terganggu, dan salah satunya di Indonesia. Sudah banyak korban yang meninggal dunia disebabkan Covid-19 dan jumlah masyarakat yang terbaring sakit positif Covid-19 terus bertambah.

Pemerintah Pusat saat ini terus bekerja sampai kejajaran yang paling bawah untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan sosial & physical distancing di segala kegiatan perkantoran, sekolah yang dilakukan di tempat pada umumnya (diluar rumah) dan mengikuti himbauan Pemerintah Pusat perlu dikakukan WFO (Work From Home) yaitu Bekerja, Belajar dan beribadah di rumah sehingga semua kegiatan-kegiatan dilakukan di rumah untuk mengurangi dan menghentikan penyebaran Covid-19.

Seluruh para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan, sesuai dengan himbauan Pemerintah Pusat aktifitas dilakukan di rumah melalui online, sistem management perusahaan seperti biasanya absensi para pekerja terus berjalan, saya ulangi lagi hanya tempat beraktifitasnya yang berubah menjadi di rumah. Lalu, Bagaimana dengan hak-hak para pekerja yang melaksanakan pekerjaannya dirumah? Apakah akan berdampak tidak baik atas Covid-19?.

Menurut saya, tentu berdampak tidak baik terhadap hak-hak anda selaku pekerja di salah satu perusahaan tersebut. Dikarenakan kegiatan perusahaan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan lancar atas terjadinya penyebaran Covid-19. Walau terjadi Covid-19 di Indonesia, perusahaan-perusahaan tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya memberikan hak-hak para pekerja yang tetap menjalankan aktifitas kegiatan pekerjaan yaitu gaji secara penuh tidak adanya dipotong atau dikurangi.

Sebelumnya saya sampaikan tentang upah, menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:" Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjungan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan akan dilakukan".

Apa saja yang terdapat di Upah para pekerja/buruh? Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu:

a. Upan tanpa tunjangan;
b. Upah Pokok dan tunjangan tetap; atau
c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Jika terjadinya pemotongan upah/gaji oleh pengusaha, pengusaha harus melihat dan mempelajari kembali pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan

atau peraturan kerja bersama terkait:

a. Denda;
b. Ganti rugi; dan/atau
c. Uang Muka Upah.

Upah/Gaji dalam suatu perusahaan yang berbadan hukum, dalam ketenagakerjaan selalu dituangkan didalam suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis, adapun pemotongan Upah yang dilakukan perusahaan selalu berhubungan dengan pembayaran hutang pekerja/buruh terhadap perusahaan atau cicilan dan/atau pekerja/buruh menyewa asset milik perusahaan untuk pemakaian pribadi. Perlu diketahui juga, pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.

Dampak Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan dilakukannya pemotongan upah, bahkan akan menimbulkan perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan hak yang akan merugikan perusahaan itu sendiri, karena wabah Covid-19 tidak berdasarkan hukum. Pemotongan Upah yang dilakukan karena Covid-19 akan menjadi Perselisihan Hubungan Industrial, dimana penyelesaian perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama."

Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang harus dilakukan diawali dengan Bipartit (secara musyawarah antara pengusaha dengan pekerja) untuk mencapai suatu mufakat yang diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila Bipartit tersebut tidak mencapai mufakat atau gagal, maka proses penyelesaiannya dilanjutkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerja dengan menyertakan bukti-bukti jika bipartit sudah dilakukan (nama penyelesaian disebut Tripartit yakni Pengusaha, Pekerja dan instansi sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi).

Jika penyelesaian secara Tripartit tidak terjadi mufakat/gagal, penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika salah satu pihak merasa keberatan atas rekomendasi yang disampaikan oleh instansi ketenagakerjaan. Maka, pengusaha ingin melakukan pemotongan gaji para pekerja harus disepakati bersama secara tertulis. Sehingga tidak ada yang dirugikan antara pengusaha dengan pekerja.

Saya memberikan saran kepada pengusaha, alangkah baiknya jika disepakati secara tertulis tidak dilakukan pemotongan upah agar tidak terjadi perselisihan hak. Tetapi pengusaha dapat melakukan beberapa hal:

1. Penangguhan Pembayaran Upah (jika pengusahan tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum) sebagaimana tertuang dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menguatkan jika pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum. Terkait tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
2. Melakukan kesepakatan secara tertulis dengan pekerja/buruh memberikan Upah Minimum yang atas wabah Coronavirus Disease (Covid-19), tetapi sisa Upah yang belum diterima akan diberikan setelah kembalinya kegiatan secara normal yang akan diberitahukan oleh Pemerintah Pusat (sistem pengembalian oleh pengusaha dibuat dalam surat kesepakatan tersebut) Dengan demikian Pekerja tidak dirugikan oleh pengusaha, dan pengusaha dibantu oleh pekerja atas kesepakatan secara tertulis itu.*

*) Penulis merupakan Pengacara di Law Office Bobi Muliadi Sagala & Partners

CORONA DAN MUNCULNYA PROBLEMATIKA FIQH

Nurhidayat*

SEJAK wabah virus corona masuk ke Indonesia, tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan dan ekonomi. Wabah ini juga menjadi persoalan bagi umat Islam.

Wabah corona menjadi problematika dalam fiqih, misalnya bolehkan kita merenggangkan shaf saat sholat berjamaah sampai meniadakan sholat berjamaah di masjid di wilayah yang terpapar virus corona. Dalam tulisan kali ini penulis mencoba menjelaskan hal tersebut.

Shaf Sholat Berjamaah Dalam Kondisi Darurat Corona

Mengenai hal ini penulis mencoba menjawab persoalan ini. Menukil dari kitab التحقيق الوافي على منية المصلي yang saya dapatkan dari Thailand pada tahun 2018 dari penulisnya wan daud bin wan abdullah bin idris al fathoni.

Mengenai shaf dalam sholat berjamaah terdapat penjelasan di dalam Shahih Muslim كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف Annasai كتاب الامامة باب ما يقول الامام اذا تقدم في تسوية الصفوف واقامتها Atturmudzi كتاب ابواب الصلاة Ibnu Majah كتاب اقامت الصلاة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استوا ولا تختلفوا فتختلف الى اخر الحديث

Artinya Rasulullah telah merapatkan bahu-bahu kami ketika hendak didirikan sholat sambil berkata betulkan, penuhkan dan rapatkan shaf-shaf kalian, jangan jadikan bengkok-bengkok niscaya nanti akan berselisih hati-hati kamu sekalian, hendaklah shaf paling dekat denganku terdiri dari orang cerdik pandai dan matang pikiranya dari kalangan kamu kemudian mengikuti shaf seterusnya orang baligh tetapi belum matang pemikiranya atau orang yang hampir mencapai umur baligh, kemudian hendaklah mengiringi shaf seterusnya anak anak yang telah mumayyiz.

Jelas berdasarkan hadis di atas shaf itu harus rapat dan lurus. Sehingga bisa disimpulkan tidak sah berdasarkan hadis shollu kama raitumuni usholli. Oleh karenanya kalau kita memang berniat sholat berjamaah ya harus tertib rapih bahkan di dalam surat shaf ayat 4 ان الله يحب اللذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص jelas

Muncul persoalan dalam kondisi darurat corona khawatir bersentuhan ketika sholat, penulis berpendapat shaf yang seperti banyak gambar yang beredar tentang renggangnya shaf sholat maka sholat berjamahnya sah namun tidak afdhal, mengenai pahalanya 25 atau 27 wallahu a'lam.

Persoalana Sholat Berjamaah

Kebijakan pemerintah dan fatwa MUI untuk meniadakan sholat berjamaah di masjid. Penulis membaca sumber pembanding di kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis Ibnu Rusyd mengenai hukum sholat berjamaah, dalam kitab ini memang hukum sholat berjamaah ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunah muakad sebagian menghukumi fardhu kifayah sedangkan Azahiri fardu ain.

Persoalanya sekarang sholat berjamaah dalam kondisi darurat. Kalau kita pakai kaidah المشقة تجليب التيسر al masyaqatu tajlibu taisir, kesulitan mendatang kemudahan. Kaidah lainya الضرورات تبيح المحظورات adh dharuratu tubihu al mahdzurat (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya diharmkan).

Maka saya berkesimpulan bahwa sholat berjamaah di masjid dalam kondisi darurat bisa dilakukan rumah saja bersama keluarga.

Sholat Jama atau Qashar bagi tenaga medis

Kita bisa mengqiyaskan peristiwa tenaga kesehatan menghadapi PDP Corona dengan peristiwa perang Khandaq atau perang Akhzab tahun kelima hijriyah. Nabi dan sahabat pernah mengqodlo empat shalat sekaligus di waktu Isya. Dhuhur, Ashar, dan Maghrib dilaksanakan pada waktu Isya sekaligus. Kondisi semacam ini bisa saja terjadi bila kekurangan tenaga medis untuk kerja dalam alur shift normal. Misal pasien membludak dan dia harus mengenakan APD dari pagi sampai malam.

Dasarnya:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

Dari Nafi' dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah,"Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya." (HR. At-Tirmizy dan AnNasa'i).

Perang melawan Corona ini urusan nyawa yang harus didahulukan. Dalam kondisi tenaga kesehatan menangani pasien dalam shift normal, misal 8 jam kerja. misalnya dia bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Maka dia masih memungkinkan jamak ta'khir dhuhur dan ashar di waktu ashar.

Masalah jama dan qashar shalat ini merupakan kajian diskusi dengan Dekan Fakultas Dakwah UIN Jakarta dan Jamaah WA Grup Muhammadiyah Cabe Ilir. [*]

*) (Dai Ambasador Dompet Dhuafa dan Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta/UMJ)

DAMPAK CORONA TERHADAP KEMISKINAN DAN CARA DOMPET DHUAFA MENGATASINYA

Nurhidayat*

BULAN Januari 2020, dunia diguncang wabah virus corona, virus tersebut pertama kali muncul di Kota Wuhan China. Dampaknya tidak hanya negara China yang merasakan negara-negara lainpun termasuk Indonesia merasakan guncang. Dampak yang ditimbulkan virus corona bersifat multidimensional sosial, ekonomi dan politik.

Seperti diketahui khalayak, merebaknya wabah virus corona jenis baru atau Covid-19, telah berdampak terhadap berbagai kehidupan sosial, politik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Akibat dari kebijakan social distancing ini semua aktifitas termasuk bisnis mengalami penurunan, para pedagang kecil berhenti berdagang sehingga mereka tidak memiliki income untuk bertahan hidup.

Dampak Corona Terhadap Kemiskinan

Penyebaran virus corona luar biasa dampaknya dalam kehidupan ekonomi sehingga kalau ini tidak dapat diatasi akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah kemisikinan. Ekonom World Bank Vivi Alatas mengemukakan hal tersebut berdasarkan perhitungan data ekonomi. Bahkan menurutnya masyarakat miskin ini menjadi salah satu kategori yang paling rentan terdampak virus corona. Apalagi jika pemerintah melakukan kebijakan lockdown dampak terhadap peningkatan kemiskinan akan semakin signifikan, kenapa hal itu bisa terjadi karena masyarakat tidak memiliki akses untuk beraktifitas ekonomi akibatnya mereka tidak memiliki income. Jika hal ini terjadi dampak sosialnya akan semakin besar.

Data dari BPS tahun 2019 menyebutkan terdapat 24,7 juta penduduk miskin di Indonesia. Jika persoalan virus corona ini tidak mampu diselesaikan maka pada tahun 2020 ini angka kemiskinan tersebut tidak mustahil akan mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan oleh kekuatan ekonomi yang semakin melemah sehingga seiring dengan itu tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan. Menurut Direktur Riset Centre of Reform on Economy (Core) Pieter Abdullah virus corona yang tidak kunjung reda akan berdampak kepada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Imbasnya adalah angka kemiskinan Indonesia diperkirakan meningkat.

Data dari harian Republika terkait dengan virus corona tersebut ternyata berdampak negatif kepada peningkatan harga barang selain karena kelangkaan barang juga diakibatkan oleh biaya transportasi yang meningkat, selain itu daya beli masyarakat mengalami penurunan, dampak dari ini perdagangan mengalami penurunan. Sektor pariwisata yang paling terkena imbasnya, kebijakan social distancing dan penutupan beberapa maskapai penerbangan yang dibuat pemerintah mengakibatkan orang enggan untuk melakukan bepergian. Hal tersebut berdampak kepada sepinya tempat-tempat pariwisata. Kondisi ini yang merasakan akibatnya adalah kelompok menengah ke bawah. Data BPS NTB menyebutkan karena pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan NTB, maka hal ini sangat berdampak kepada kalangan masyarakat bawah.

Dampak lain dari penyebaran virus corona ini adalah adanya kemungkinan gelombang PHK secara signifikan yang diakibatkan melemahnya kondisi ekonomi. Laporan hasil kajian INDEF menyimpulkan bahwa virus corona dapat mengakibatkan PHK, hal ini disebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomin 4-4,5 persen. Data dari Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organizations/ILO) memperkirakan virus corona, akan menghilangkan 24,7 juta pekerjaan di dunia. Skenario rendahnya sebesar 5,3 juta. Adapun skenario pertengahannya sebanyak 13 juta pekerjaan. Dari total jumlah itu, 7,4 juta berada di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikatnya

menyebut, pengangguran meningkat lebih buruk dari yang diperkirakan 70.000 menjadi 281.000 selama pekan yang berakhir 14 Maret 2020. Sementara di Cina, sebanyak 5 juta warganya kehilangan pekerjaan pada periode Januari hingga Februari 2020. Rilis Biro Statistik China menunjukkan angka pengangguran naik 6,2% per-Februari 2020 dari sebelumnya 5,3% di Januari 2020. Sebagian pihak bahkan memperkirakan angka ini seharusnya lebih tinggi.

Wabah virus corona memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global khususnya di kawasan Asia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia juga tidak lepas dari efek wabah yang telah banyak menyebabkan kematian. Hal ini jelas akan menyebabkan nilai perekonomian semakin turun. S&P Global memberikan sebuah laporan bahwa covid-19 ini dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian Asia sebesar US$ 211 miliar atau sama dengan lebih dari seperlima output perekonomian Indonesia dalam satu tahun. Kondisi global tersebut tentu akan berdampak kepada kondisi Indonesia, kalau dibiarkan bisa mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998 yang diakibatkan oleh krisis moneter.

Beberapa faktor penting yang membuat Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi adalah bila mayoritas pelaku ekonomi di hampir semua sektor tidak lagi dapat melakukan aktivitas perekonomian secara efektif. Kondisi ini akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi, sehingga kondisi kemiskinan akan dapat mudah kita jamah. Indonesia rentang masuk ke dalam kondisi krisis ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup tajam. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), perlambatan tersebut diperkirakan hanya 4,5-4,8 persen di tahun 2020.

Negara Indonesia juga makin rentan mengalami kepanikan pasar keuangan global. Asian Development Bank (ADB) memberikan informasi bahwa sebanyak 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia digenggam oleh investor asing. Lebih tinggi dari negara Asia lainnya. Hal ini apabila terjadi aksi jual secara kolektif tentunya ini beresiko tinggi terhadap krisis ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke China dalam rangka mengurangi penyebaran virus Corona. Seperti yang kita ketahui, bahwa virus berbahaya ini muncul pertama kali di China. Hal ini yang juga menjadi faktor

menurunnya nilai ekonomi di Indonesia. Sebab China adalah negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia sering melakukan aktivitas impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Apabila negara China mengalami penurunan produksi barang, maka global supply chain akan terganggu dan hal ini dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari China. Jelas, dengan adanya virus Corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk di Indonesia.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan global menurut M. Yunus disebabkan oleh dua hal. Pertama kemiskinan sudah menjadi ancaman bagi terwujudnya perdamaian dunia, ini terbukti bahwa di negara-negara yang berpenduduk miskin konflik dan perang sangat sulit diselesaikan. Perang masih menjadi penyelsaian akhir dari berbagai konflik. Penyebab kedua kemiskinan menjadi masalah global dikarenakan kemiskinan menjadi penghambat penegakan hak asasi manusia.

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang problem kemiskinan tidak lagi menjadi problem ekonomi, akan tetapi sudah menjadi problem sosial dan politik, ini menarik untuk dikaji, sebab problem ekonomi ini akan berdampak kepada problem sosial, pendidikan, kesehatan dan politik. Problem inilah yang ini dihadapai oleh negara-negara berpenduduk muslim. Sehingga hal ini dapat membahayakan dan mengancam akidah, akhlak kelogisan berfikir, keluarga dan mengancam masyarakat muslim. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa keterbelakangan ekonomi selain faktor eksternal, juga disebabkan karena umat Islam belum menjalankan ajaran agama dalam berekonomi.

Kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal disebabkan oleh penduduk sendiri contoh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya ketrampilan, dan budaya. Sedangkan kemiskinan yang diakibatkan faktor eksternal antara lain rendahnya kemampuan mengakses sumberdaya ekonomi, dan diakibatkan oleh bencana termasuk wabah corona bisa menjadikan seseorang menjadi miskin.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. Sehingga ada tiga tipe orang miskin, yakni miskin (poor), sangat miskin (very poor) dan termiskin (poorest). Penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahun. Orang miskin adalah orang yang disebabkan berpenghasilan rendah kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makan minimum (1,900 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 240 kg sampai 320 kg beras/orang/tahun, dan orang yang digolongkan sebagai termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg, 240 kg beras/orang/tahun.

Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya di bawah 2,100 kalori berdasarkan kategori food dan nonfood diukur menurut infrastruktur antara lain jalan raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan. Menurut ketentuan BPS kebutuhan makanan minimum per kapita penduduk yaitu sebanyak 2.100 kalori per hari. Mengingat bahan makanan penduduk berbeda-beda, maka ukuran konsumsinya dilihat dari jumlah rupiahnya.

Cara Lembaga Zakat Mengatasi

Upaya luar biasa yang sudah dilakukan Lembaga Zakat Dompet Dhuafa dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Pertama melakukan upaya preventif kedua upaya kuratif.

Upaya preventif pertama mengedukasi masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan islami hal ini sebagaimana seruan Rasulullah dalam sebuah hadisnya“mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah (HR. Muslim). Kedua menyadarkan umat akan pentingnya memutus mata rantai dengan cara berdiam diri di rumah. Inilah seruan yang disampaikan oleh Rasulullah disaat menghadapi wabah penyakit yang mematikan Rasulullah mengingatkan umat Tha'un (penyakit menular) merupakan teguran dari Allah sebagai ujian untuk hamba apabila terjadi maka berdiamlah di tempat kamu berada jangan kamu lari (HR Bukhari Muslim).

Upaya preventif kedua mengajak masyarakat untuk melakukan isolasi diri (social distance) inipun sesuai dengan seruan Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Dalam hadis disebutkan: Janganlah yang sakit disatukan dengan yang sehat (HR Bukhari dan Muslim).

Upaya kuratif yang dilakukan Lembaga Zakat Dompet Dhuafa adalah dengan membangun Rumah Sakit yang siap menampung pasien corona, mereka harus menyiapkan tenaga medis dan relawan yang siap melayani masyarakat yang terdampak corona. Yang kedua bantuan konsumtif sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang terdampak virus corona. Apalagi jika diberlakukan lockdown lembaga zakat menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat [*].

*) Penulis merupakan Dai Ambasador Dompet Dhuafa dan Ketua Prodi Zakat dan Wakaf FAI UMJ

CARA PANDANG LAINNYA TERHADAP COVID-19

BUKALAH media mana saja hari-hari ini. Maka pembahasan virus corona alias Covid-19 begitu mendominasi. Was was, hoaks, harapan, menjadi paket emosi yang dapat muncul dari pembacaan terhadap berita-berita tersebut. Yang jelas dikarenakan Covid-19 sejumlah adaptasi dilakukan serta terjadinya sejumlah dampak dimana-mana.

Sebut saja diantaranya work from home yang ternyata membuka beberapa lapis cara pandang yang selama ini tersembunyi. Perihal struktur ekonomi kita, bagaimana begitu banyak pekerja harian yang bergantung pada tatap muka-mobilitas di luar, kesiapan kita untuk bekerja dari rumah (dari segi infrastruktur-etos kerja, dan sebagainya). Pilihan dari Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih opsi lockdown pun bisa jadi karena menimbang diantaranya struktur ekonomi kita yang cukup banyak pekerja harian. Memang lockdown akan berimbas dan harus menyiapkan berbagai aspek. Dan tentu saja ekonomi dimasukkan dalam variabel hitungan tersebut.

Mungkin ada beberapa orang yang menghujat mereka yang tetap "berkeras" tidak bekerja di rumah. Tapi dengan melihat dari sisi yang lain, mungkin mereka memang harus keluar rumah untuk bekerja. Entah perusahaan yang berkeras tidak mengizinkan bekerja dari rumah, entah model pekerjaan yang tidak memungkinkan bekerja dari rumah, ataupun seperti mereka yang berkiprah di ranah medis yang menjadi garda terdepan menghadapi Covid-19 ini. Hubungan industrial antara pengusaha-buruh serta kaitannya dengan pemerintah juga menarik untuk dikaji lebih jauh.

Beralih ke lapak pembahasan lainnya, yakni belajar di rumah bagi para pelajar. Jika menilik tri pusat pendidikan (sekolah-keluarga-masyarakat), maka bisa jadi peristiwa Covid-19 ini memantik kembali peran keluarga untuk menghadirkan ekosistem pendidikan. Siapkah para orang tua untuk menjadi orang yang ditanya, membantu tugas sekolah anaknya? Perkara pendidikan bukan berarti lepas tangan saja dan diserahkan kepada sekolah. Pembelajaran jarak jauh membuat orang tua diingatkan dan didekatkan dengan kemelut tugas ala anak-anak sekolah.

Orang tua pun dapat mengkritisi misalnya, jika ada guru yang terlampau memberatkan siswa dengan tugas ini-itu. Dari pihak guru dan sekolah pun bisa jadi beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh; sesuatu yang mungkin kurang tersentuh diantara riuhnya jam pembelajaran serta tatap muka guru-murid.

BUMN UNTUK INDONESIA

BNI
Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Bisa Transaksi Apa Aja, Dimana Aja, Kapan Aja

Top Up Uang Elektronik

Beli Paket Data & Pulsa

Beli Voucher & Bayar Listrik

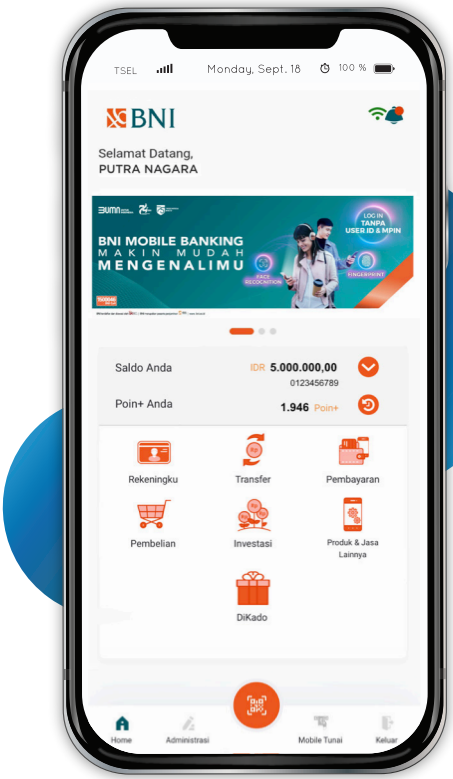

Bayar Kartu Kredit

Transfer

Bayar Tagihan

Download Sekarang di :

GET IT ON Google play

Available on the App Store

1500046 BNI Call

74 Tahun BNI

BNI terdaftar dan diawasi oleh OJK | BNI merupakan peserta penjaminan LPS | www.bni.co.id